



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN



# LAPORAN KINERJA PANGKALAN PSDKP TUAL

*TAHUN 2023*



 Pangkalan Psdkp Tual  
 @PSDKP\_Tual  
 psdkp.tual

 bangga  
melayani  
bangsa

BerAKHLAK

# Kata Pengantar

Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (Lkj) Tahun 2023 dapat terselesaikan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) di Tahun 2023 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target, di samping beberapa capaian indikator yang belum memenuhi target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 Unit Pelaksana Teknis Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual (UPT Pangkalan PSDKP Tual)

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada UPT Pangkalan PSDKP Tual dalam kurun waktu Tahun 2023. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Kami berharap, Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staff UPT Pangkalan PSDKP Tual dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi yang telah tumbuh dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Tual, 15 Januari 2024

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya  
Kelautan dan Perikanan Tual



**Sigit Bintoro, S.Pi**

NIP. 196211022 199803 1 004

# Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) UPT Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen. PSDKP Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2023 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Penyusunan LKj pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun bersangkutan.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, UPT Pangkalan PSDKP Tual telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), juga ditujukan untuk:

1. Menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*);
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Sasaran Program UPT Pangkalan PSDKP Tual bermuara pada 10 Sasaran Kegiatan , yaitu:

1. Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif;
2. Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif;
3. Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan;
4. Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan;
5. Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan;
6. Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan
7. Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan;
8. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas;
9. Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas;
10. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Program, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada Tahun 2023, terdapat 27 Indikator Kinerja yang menjadi komitmen kinerja UPT Pangkalan PSDKP Tual dengan nilai NKO 106,76.

Realisasi anggaran pada Tahun 2023 yang telah dicapai oleh Pangkalan Pengawasan SDKP Tual sebesar 99,80% atau sebesar Rp54.283.587.512,- (*Lima Puluh Empat Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah*) dari alokasi anggaran Rp54.389.879.000,- (*Lima Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

Melalui Laporan Kinerja Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja guna mendorong pencapaian target pada tahun berikutnya.

# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	i
Ikhtisar Eksekutif .....	ii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Tabel .....	vi
BAB I .....	8
PENDAHULUAN .....	8
A. Latar Belakang.....	8
B. Maksud dan Tujuan.....	9
C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan .....	9
D. Data Umum Organisasi .....	10
E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja .....	15
BAB II .....	16
PERENCANAAN KINERJA .....	16
A. Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2020-2024.....	16
B. Rencana Strategis Pangkalan Pengawasan SDKP Tual Tahun 2020 – 2024 .....	18
C. Program Kerja Pengawasan SDKP .....	18
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	19
E. Pengukuran Capaian Kinerja .....	23
BAB III .....	25
AKUNTABILITAS KINERJA .....	25
A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2023 25	
1. Capaian Sasaran Kegiatan Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2023 .....	25
2. Capaian Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2023 Tahunan.....	26
B. Analisis Pencapaian Kinerja.....	29
1. Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif .....	29
2. Sasaran Kegiatan 2: Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif .....	32
3. Sasaran Kegiatan 3: Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan .....	41
4. Sasaran Kinerja 4: Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan .....	101
5. Sasaran Kegiatan 5: Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan .....	103
6. Sasaran Kegiatan 6: Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan.....	126

7. Sasaran Kegiatan 7: Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan .....	128
8. Sasaran Kegiatan 8: Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas.....	130
9. Sasaran Kegiatan 9: Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas .....	136
10. Sasaran kinerja 10: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP .....	137
C. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	152
D. Akuntabilitas Keuangan.....	153
BAB IV.....	154
PENUTUP.....	154
A. Kesimpulan.....	154
B. Saran dan Rekomendasi.....	154

## Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Data Armada.....	14
Tabel 1. 2 Komposisi Pegawai Pangkalan Pengawasan SDKP Tual berdasarkan Unit Kerja .....	14
Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2023 .....	21
Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Pangkalan PSDKP Tual Tahunan Tahun 2023 .....	26
Tabel 3. 2 Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2023 .....	29
Tabel 3. 3 Capaian IKU SK. 1 .....	30
Tabel 3. 4 Perbandingan IKU UPT SK. 1 .....	30
Tabel 3. 5 Capaian IKU SK. 2 .....	33
Tabel 3. 6 Perbandingan IKU UPT SK. 2 .....	33
Tabel 3. 7 Capaian IKU SK. 3 .....	42
Tabel 3. 8 Perbandingan IKU UPT SK. 3 .....	42
Tabel 3. 9 Tahapan pemeriksaan IKU 5.....	43
Tabel 3. 10 Rekap Pengawasan Pencemaran .....	45
Tabel 3. 11 Kawasan konservasi Perairan Nasional (KKPN) yang dikelola lingkup Pangkalan PSDKP Tual .....	64
Tabel 3. 12 Data Pengawasan KKPN .....	65
Tabel 3. 13 Rekap Pengawasan PRL .....	73
Tabel 3. 14 Rekap pengawasan jenis ikan dilindungi.....	82
Tabel 3. 15 Rekap pengawasan Jasa Kelautan.....	96
Tabel 3. 16 Rekap pengawasan PWP3K .....	97
Tabel 3. 17 Rekap pengawasan DF.....	99
Tabel 3. 18 Capaian IKU SK. 4 .....	101
Tabel 3. 19 Perbandingan IKU UPT SK. 4 .....	102
Tabel 3. 20 Capaian IKU SK. 5 .....	103
Tabel 3. 21 Perbandingan IKU UPT SK. 5 .....	104
Tabel 3. 22 Pemeriksaan IKU 7 .....	104
Tabel 3. 23 Pengawasan penangkapan kapal perikanan.....	108
Tabel 3. 24 Rekap Pengawasan Pengolahan .....	115
Tabel 3. 25 Rekap Pengawasan Distribusi/ Pemasaran .....	116
Tabel 3. 26 Rekap pengawasan budidaya.....	118
Tabel 3. 27 Capaian IKU SK. 6 .....	126
Tabel 3. 28 Perbandingan IKU UPT SK. 6 .....	126
Tabel 3. 29 Capaian IKU SK. 7 .....	128
Tabel 3. 30 Perbandingan IKU UPT SK. 7 .....	128
Tabel 3. 31 Capaian IKU SK. 8 .....	131
Tabel 3. 32 Perbandingan IKU UPT SK. 8 .....	131
Tabel 3. 33 Rekap penerapan sanksi administratif.....	132
Tabel 3. 34 Rekapitulasi SPKP .....	134
Tabel 3. 35 Capaian IKU SK. 9 .....	136
Tabel 3. 36 Perbandingan IKU UPT SK.9 .....	136
Tabel 3. 37 Capaian IKU SK. 10.....	137
Tabel 3. 38 Perbandingan IKU UPT SK.10 .....	138
Tabel 3. 39 IKPA 2023 Pangkalan PSDKP Tual .....	150
Tabel 4. 1 Saran dan Rencana Tindak Lanjut atas pencapaian kinerja Pangkalan PSDKP Tual Periode Tahun 2023 .....	154

## Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Tual .....	12
Gambar 1. 2 Wilayah Kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual .....	13
Gambar 1. 3 Sistematika Penyusunan Lkj Pangkalan PSDKP Tual .....	15
Gambar 3. 1 Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) Pangkalan PSDKP Tual.....	25
Gambar 3. 2 NKA 2023 Pangkalan PSDKP Tual.....	151

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan dan pengelolaan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja (LKj) UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual Tahun 2023 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah diseminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Pangkalan Pengawasan SDKP Tual untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan "*good governance*".

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud :**

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2023 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP setiap Tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

### **2. Tujuan :**

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap Tahun, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

## **C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP di Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Tual, antara lain:

### **1. Bidang Perikanan Tangkap**

- a. Masih maraknya kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) baik yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) di Wilayah Pangkalan PSDKP Tual;
- b. Adanya dugaan kegiatan *transshipment* di laut;
- c. Tidak terpantaunya kapal – kapal perikanan melalui radar VMS;
- d. Hasil tangkapan yang tidak dilaporkan kepada Pengawas Perikanan.
- e. Masih terdapat kegiatan penangkapan yang merusak.

### **2. Bidang Perikanan Budidaya**

- a. Pengangkutan ikan hidup yang tidak terkontrol dengan baik.

- b. Masih terdapat pelaku usaha yang belum memiliki perizinan dasar yaitu PKKPR.

### **3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan**

- a. Masih banyaknya UPI yang tidak memiliki SIUP dan SKP.

### **4. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil**

- a. Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun, dan *strum*.
- b. Eksploitasi mangrove.
- c. Penambangan pasir besi dan pasir laut yang menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
- d. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.

## **D. Data Umum Organisasi**

### **1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan Pengawasan SDKP Tual merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pangkalan PSDKP Tual menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- f) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

## **2. Struktur Organisasi**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Pangkalan membawahi Kepala Sub Bagian Umum serta membawahi Kelompok Jabatan Fungsional, dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti berikut :

### **a. Kepala Pangkalan:**

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

### **b. Kepala Subbagian Umum:**

Melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

### **c. Kelompok Jabatan Fungsional:**

Fungsional Pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

### **f. Satuan Pengawasan SDKP:**

Melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja masing-masing dan dipimpin oleh seorang Koordinator. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengawasan SDKP secara baik sampai ke daerah, maka telah dibentuk

Satuan Pengawasan SDKP dan Wilker dibawah koordinasi UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual meliputi 5 (lima) Satuan Pengawasan (Satwas) dan 9 (sembilan) Wilayah Kerja (Wilker) sebagaimana Struktur Organisasi pada Gambar 1 dibawah ini :



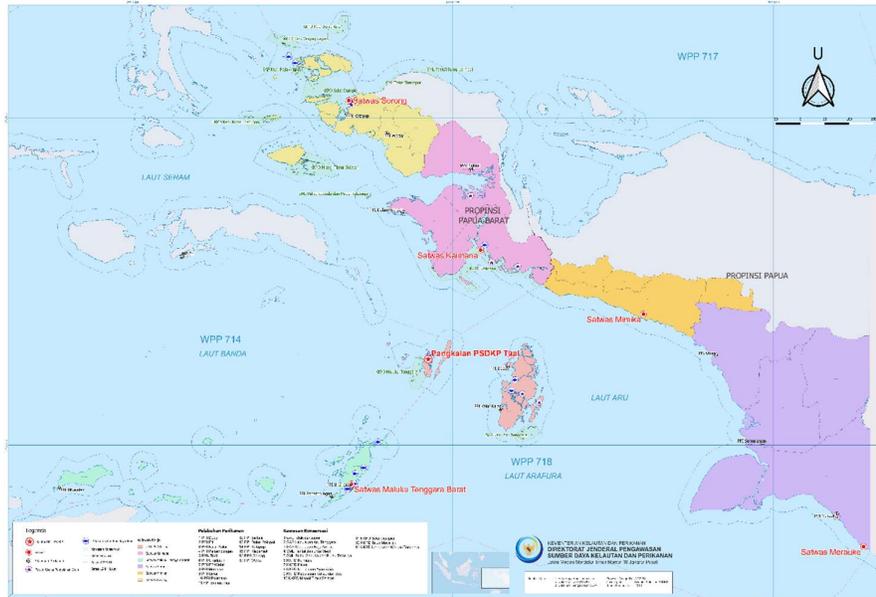
Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Tual

### 3. Wilayah Kerja

Wilayah kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual meliputi 3 Propinsi (Maluku, Papua dan Papua Barat) dan 3 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yakni :

- a. WPP 714, meliputi perairan Laut Banda
- b. WPP 715, meliputi perairan Laut Seram, Laut Halmahera dan Teluk Bintuni
- c. WPP 718, meliputi Laut Aru dan Laut Arafuru

Untuk lebih jelasnya ditunjukkan pada Gambar berikut:



Gambar 1. 2 Wilayah Kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual  
 Dalam pelaksanaan operasional pengawasan di wilayah kerja, Pangkalan Pengawasan SDKP Tual membawahi 5 Satuan Pengawasan SDKP, yaitu:

- 1) Wilker PSDKP Dobo
- 2) Wilker PSDKP Warabal
- 3) Satuan Pengawasan SDKP Maluku Tenggara Barat (MTB)
  - Wilker PSDKP Kisar
- 4) Satuan Pengawasan SDKP Sorong
  - Wilker PSDKP Sorong Selatan
  - Wilker PSDKP Raja Ampat
- 5) Satuan Pengawasan SDKP Kaimana
  - Wilker PSDKP Fak Fak
  - Wilker PSDKP Wimro / Teluk Bintuni
  - Wilker PSDKP Avona
- 6) Satuan Pengawasan SDKP Mimika
- 7) Satuan Pengawasan SDKP Merauke
  - Wilker PSDKP Wanam
  - Wilker PSDKP Asmat

#### 4. Armada Pengawas dan *Speedboat* Pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Tual

Pangkalan PSDKP Tual dalam melaksanakan kegiatan operasi pengawasan SDKP didukung dengan armada kapal pengawas dan *speedboat* pengawas. Berikut data kapal pengawas, *speedboat* pengawas dan RIB dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 1. 1 Data Armada

No	Nama Kapal	Ukuran Kapal	Lokasi / Pangkalan
1	Hiu 14	32 Meter	Pangkalan PSDKP Tual
2	Hiu Macan 06	36 Meter	Pangkalan PSDKP Tual
3	Sea Rider	8 meter	Pangkalan PSDKP Tual
4	Rubber Boat	5 meter	Wilker Raja Ampat
5	Albacore 002	16 Meter	Pangkalan PSDKP Tual
6	Napoleon 025	12 Meter	Satwas SDKP Mimika
7	Napoleon 042	12 Meter	Wilker Raja Ampat
8	Napoleon 049	12 Meter	Wilker PSDKP Warabal
9	Napoleon 050	12 Meter	Satwas SDKP MTB
10	Napoleon 018	12 Meter	Satwas SDKP Sorong
11	Marlin 014	6 Meter	Wilker PSDKP Fak Fak
12	Jetski 1	3 Meter	Pangkalan PSDKP Tual
13	Jetski 2	3 Meter	Pangkalan PSDKP Tual

Armada Kapal Pengawas, *Speedboat* dan RIB siap operasi

Sumber: Bagian Operasi Armada Pangkalan PSDKP Tual

## 5. Kepegawaian

Jumlah keseluruhan pegawai Pangkalan Pengawasan SDKP Tual sampai Tahun 2023 sebanyak 143 orang, yang terdiri dari PNS Pusat Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP sebanyak 85 orang, 5 orang PPPK dan tenaga kontrak sebanyak 51 orang, untuk lebih jelasnya ditunjukkan pada Tabel di bawah:

Tabel 1. 2 Komposisi Pegawai Pangkalan Pengawasan SDKP Tual berdasarkan Unit Kerja

No.	Unit Kerja	PNS Pusat	PPPK	Tenaga Kontrak	Jumlah (Orang)
1	<b>Pangkalan Pengawasan SDKP Tual</b>	27	3	23	53
	- Wilker Pengawasan SDKP Dobo	2	-	3	5
	- Wilker Pengawasan SDKP Warabal	0	-	2	2
2	<b>Satuan Pengawasan SDKP Sorong</b>	7	-	4	11
	- Wilker Pengawasan SDKP Sor Sel	-	-	-	-
	- Wilker Pengawasan SDKP Raja Ampat	2	-	1	3
3	<b>Satwas Pengawasan SDKP Merauke</b>	9	-	3	12
	- Wilker Pengawasan SDKP Wanam	-	-	-	-
4	<b>Satuan Pengawasan SDKP Maluku Tenggara Barat</b>	3	-	2	5
	- Wilker Pengawasan SDKP Kisar	-	-	-	-
5	<b>Satuan Pengawasan SDKP Kaimana</b>	2	-	3	5
	- Wilker Pengawasan SDKP Wimro	-	-	1	1
	- Wilker Pengawasan SDKP Fak Fak	2	-	2	4

6	<b>Satuan Pengawasan SDKP Mimika</b>	4	-	3	7
	- Wilker Pengawasan SDKP Asmat	-	-	-	-
7	<b>KP. Hiu Macan 06</b>	14	-	3	17
8	<b>KP. Hiu 14</b>	10	1	1	12
9	<b>KP. Orca 3</b>	-	1	-	1
10	<b>Tugas Belajar</b>	4	-	-	4
	<b>Total</b>	<b>86</b>	<b>5</b>	<b>51</b>	<b>142</b>

Sumber: Bagian Kepegawaian Sub Bagian Tata Usaha Pangkalan PSDKP Tual

## E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut :



Gambar 1. 3 Sistematika Penyusunan Lkj Pangkalan PSDKP Tual

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: <sup>(1)</sup>Rencana Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2020 - 2024; <sup>(2)</sup>Informasi Indikator Kinerja Tahun 2023; <sup>(3)</sup>Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023; <sup>(4)</sup>Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2023.

### A. Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020 - 2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan.

Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020 – 2024 sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP 2020 - 2024. Renstra tersebut juga disusun dengan menggunakan berbagai asumsi serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP periode 2020 – 2024 diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Pernyataan Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

Visi :

“Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan”

Sejalan dengan visi Ditjen. PSDKP, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP.

Misi :

- a. Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
- b. Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
- c. Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
- d. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen PSDKP

## **2. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 s/d 5 tahun. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Ditjen. PSDKP. Berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan Ditjen. PSDKP dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan Strategis:

- a. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan

perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

- b. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen PSDKP.

## **B. Rencana Strategis Pangkalan Pengawasan SDKP Tual Tahun 2020 – 2024**

Rencana Strategis (Renstra) UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual 2020 - 2024 menitik beratkan kegiatan operasional pengawasan yaitu memadu serasikan kebijakan pusat dan UPT Pangkalan PSDKP Tual adalah pemokus kegiatan pengawasan kepada perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal PSDKP.

Adapun visi dan misi UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual mengacu pada visi dan misi Ditjen PSDKP, yang dijabarkan oleh UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual melalui tujuan dan sasaran sebagai berikut :

*Tujuan* : Melakukan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan perikanan secara berkelanjutan di wilayah kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual.

*Sasaran* : Indonesia bebas *illegal fishing* serta kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan.

## **C. Program Kerja Pengawasan SDKP**

### **1. Program**

Program merupakan instrument kebijakan yang berisikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual 2020 – 2024 yaitu: PROGRAM PENGAWASAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

## 2. Kegiatan

Rumusan kegiatan tingkat UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual, yang merupakan turunan dari fungsi eselon II Ditjen PSDKP, meliputi:

- Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada;
- Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan;
- Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
- Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan; dan
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pangkalan PSDKP Tual.

Selain kegiatan di atas Pangkalan PSDKP Tual juga berperan aktif dan terlibat dalam mendukung program ekonomi biru Menteri kelautan dan perikanan

### D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: <sup>(1)</sup> Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; <sup>(2)</sup> Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; <sup>(3)</sup> Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Pangkalan PSDKP Tual telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:

1. Menerjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*);
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Arah kebijakan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran lebih detail arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 khususnya pada kebijakan "membangun kedaulatan yang

mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan". Sehingga kebijakan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Tahun 2020-2024, ditetapkan yaitu "Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan guna menegakkan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan kedaulatan dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan". Guna mewujudkan kebijakan tersebut ditetapkan melalui 6 strategi *implementatif* yaitu :

1. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pengawasan SDKP, Peningkatan Kapasitas SDM dan Pemenuhan Regulasi
2. Pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran dan penguatan koordinasi dengan lintas institusi penegak hukum di laut
3. Penguatan Sistem Pengawasan Terpadu (*Integrated Surveillance System/ISS*).
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan SDKP.
5. Meningkatkan Pengawasan Kepatuhan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
6. Meningkatkan Kerjasama Pengawasan SDKP di tingkat Nasional, Regional dan Internasional.

Selama Tahun 2023 Pangkalan PSDKP Tual telah melaksanakan 2 kali revisi PK dengan rincian berikut:

1. Revisi I, merupakan revisi yang dilaksanakan bulan September 2023 dengan melakukan perubahan nomenklatur beberapa indeks kinerja utama, selain itu melakukan penambahan 6 indikator kinerja yaitu
  - Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks);
  - Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%);
  - Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%);
  - Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%);
  - Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks);
  - Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks).

2. Revisi II, dilaksanakan bulan Desember 2023 dengan mengganti 2 indikator kinerja serta beberapa target capaian antara lain;

- Perubahan indeks kinerja Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (90) menjadi Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (80,5);
- Perubahan indeks kinerja nilai Pembangunan zona integritas menuju WBK lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual menjadi Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual
- Merubah Nilai target indek kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual dari 89 menjadi 93,75

Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut targetnya pada setiap Sasaran Kegiatan (SP) ditunjukkan pada Tabel berikut;

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2023

NO.	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>KEGIATAN 1. KESADARTAHUAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN SDKP MENINGKAT</i>				
<b>SK. 1</b>	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	01	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	80
<i>KEGIATAN 2. PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG EFEKTIF</i>				
<b>SK. 2</b>	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	02	Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	87.6
		03	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	87.6
		04	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)	100%
<b>SK. 3</b>	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan	05	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Nilai)	100
<b>SK. 4</b>	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan	06	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)	100%

<b>SK. 5</b>	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan	07	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Nilai)	100
<b>SK. 6</b>	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	08	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)	100%
<b>SK. 7</b>	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	09	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)	100%

***KEGIATAN 3. PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG EFEKTIF***

<b>SK. 8</b>	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	10	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	80
		11	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	80
		12	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	80

***KEGIATAN 4. PENANGANAN TINDAK PIDANA BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG EFEKTIF***

<b>SK. 9</b>	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	13	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	93
--------------	---	----	---	----

***KEGIATAN 5. TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK LINGKUP DITJEN. PSDKP***

<b>SK. 10</b>	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	14	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) kapal perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	80
		15	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	80
		16	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas	75

	Korupsi (WBK) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	
17	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)	100
18	Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	78
19	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	80,5
20	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	75%
21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	21
22	Inovasi yang dihasilkan UPT Pangkalan PSDKP Tual (inovasi)	1
23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	92%
24	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	77.5%
25	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	77.5%
26	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	93,75
27	Nilai kinerja anggaran (NKA) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Nilai)	82

### E. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Tahunan didukung dengan pengukuran pada aplikasi "Kinerjaku" yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja berbasis informasi teknologi (dapat diakses di [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id)).

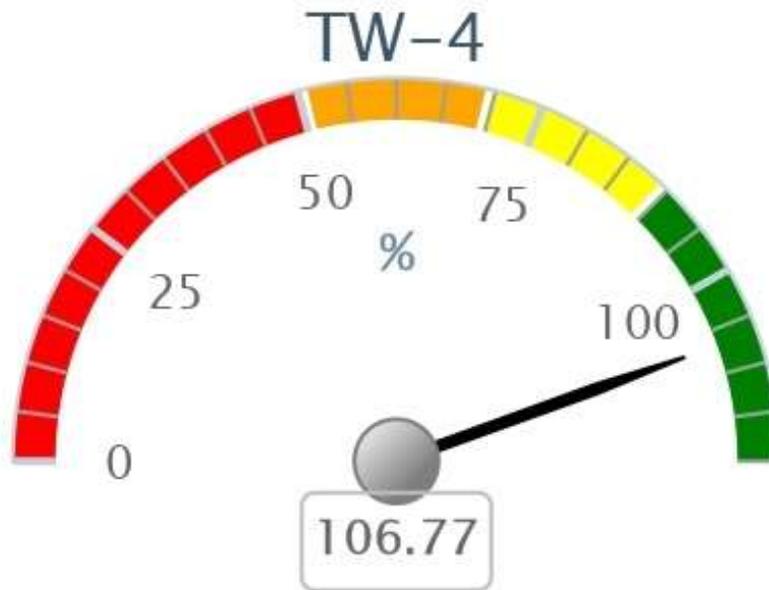
## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2023

#### 1. Capaian Sasaran Kegiatan Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2023

Berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2023, Pangkalan PSDKP Tual telah menyempurnakan dan menetapkan 10 Sasaran Kegiatan dengan 27 Indikator Kinerja yang terdiri atas 13 IKU dan 14 IKM. Nilai Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Program (NPSS) Pangkalan PSDKP Tual sebesar 106,77% untuk triwulan IV atau 106,76% untuk Tahun 2023, capaian dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber: SAPK ([kinerjaku.kkp.go.id](http://kinerjaku.kkp.go.id))

Gambar 3. 1 Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) Pangkalan PSDKP Tual

Rata-rata NPSK diperoleh dari akumulasi penghitungan capaian seluruh sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi kontrak kinerja antara Kepala Pangkalan PSDKP Tual dengan Direktur Jenderal PSDKP. Adapun Nilai setiap sasaran kegiatan merupakan hasil penghitungan atas 27 indikator kinerja utama yang menjadi parameter tercapainya sasaran kegiatan. Capaian masing-masing sasaran kegiatan dan IKU serta IKM pembentuk NPSK akan diuraikan lebih lanjut.

## 2. Capaian Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2023 Tahunan

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya pada Tahun 2023 Pangkalan PSDKP Tual telah menyempurnakan dan menetapkan 10 Sasaran Kegiatan dengan 27 Indikator Kinerja. Capaian kinerja Tahun 2023 ditabulasikan seperti tercantum dalam Tabel berikut.

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Pangkalan PSDKP Tual Tahunan Tahun 2023

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Target 2023	Capaian s/d DESEMBER	%
<b>S.01</b>	<b>Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif</b>				<b>120</b>	
1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	Indeks	Maximize	80	100	120
<b>S.02</b>	<b>Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif</b>				<b>106,38</b>	
2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	Indeks	Maximize	87,6	96,88	110,59
3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	Indeks	Maximize	87,6	97,87	111,72
4	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)	Persen (%)	Maximize	100	100	100
<b>S.03</b>	<b>Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan</b>				<b>100</b>	
5	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Nilai)	Nilai	Maximize	100	200	100
<b>S.04</b>	<b>Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan</b>				<b>100</b>	
6	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)	Persen (%)	Maximize	100	100	100
<b>S.05</b>	<b>Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan</b>				<b>100</b>	

7	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Nilai)	Nilai	Maximize	100	200	100
<b>S.06</b>	<b>Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan</b>				<b>120</b>	
8	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)	Persen (%)	Maximize	100	140	120
<b>S.07</b>	<b>Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan</b>				<b>100</b>	
9	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)	Persen (%)	Maximize	100	100	100
<b>S.08</b>	<b>Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas</b>				<b>108,44</b>	
10	Indeks pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	Indeks	Maximize	80	100	120
11	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	Indeks	Maximize	80	58,99	73,74
12	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	Indeks	Maximize	80	100	120
<b>S.09</b>	<b>Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas</b>				<b>100</b>	
13	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	Indeks	Maximize	93	93	100
<b>S.10</b>	<b>Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP</b>				<b>112,9</b>	
14	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) kapal perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	Indeks	Maximize	80	190,77	119,23

15	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	Indeks	Maximize	80	192,99	120
16	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	Nilai	Maximize	75	81,52	108,69
17	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)	Persen	Maximize	100	200	100
18	Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	Indeks	Maximize	78	90,63	116,19
19	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	Nilai	Maximize	80,5	82,65	102,67
20	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	Persen	Maximize	75	100	120
21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	Nilai	Maximize	21	29,84	120
22	Inovasi yang dihasilkan UPT Pangkalan PSDKP Tual (inovasi)	Inovasi	Maximize	1	1	100
23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	Persen	Maximize	92	227,35	120
24	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	Persen	Maximize	77,5	100	120
25	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	Persen	Maximize	77,5	95,04	120
26	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	Persen	Maximize	93,75	92,82	99,01
27	Nilai kinerja anggaran (NKA) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Nilai)	Persen	Maximize	82	87,58	106,8

Pada Tahun 2023 Pangkalan PSDKP Tual menetapkan 27 Indeks Kinerja dan dalam aktualisasinya 27 IK dilaksanakan dengan kriteria 12 IK dengan predikat baik, 14 IK dengan predikat istimewa, sedangkan 1 IK dengan predikat cukup. Pelaksanaan kegiatan dalam pemenuhan IK dimaksud terdapat kendala maupun faktor pendukung yang mendorong tercapainya kegiatan atas IK yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan sepanjang tahun 2023. Pada Tahun 2023 Pangkalan PSDKP Tual berhasil memperoleh realisasi anggaran sebesar 99,80% atau sebesar Rp54.283.587.512,- (*Lima Puluh Empat Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah*) dari alokasi anggaran Rp54.389.879.000,- (*Lima Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*). Realisasi Pangkalan PSDKP Tual Sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3. 2 Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2023

NO	Kode   Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja								Total	
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain		Transfer
1	2350   Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	PAGU	0	33,010,185,000	120,000,000	0	0	0	0	0	0	33,130,185,000
		REALISASI	0.00%	32,918,016,070 (99.72%)	119,999,063 (100.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33,038,015,133 (99.72%)
		SISA	0	92,168,930	937	0	0	0	0	0	0	92,169,867
2	2351   Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	PAGU	0	235,400,000	0	0	0	0	0	0	0	235,400,000
		REALISASI	0.00%	235,393,270 (100.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	235,393,270 (100.00%)
		SISA	0	6,730	0	0	0	0	0	0	0	6,730
3	2352   Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	PAGU	0	753,564,000	0	0	0	0	0	0	0	753,564,000
		REALISASI	0.00%	753,540,436 (100.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	753,540,436 (100.00%)
		SISA	0	23,564	0	0	0	0	0	0	0	23,564
4	2353   Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	PAGU	0	740,000,000	0	0	0	0	0	0	0	740,000,000
		REALISASI	0.00%	726,306,585 (98.15%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	726,306,585 (98.15%)
		SISA	0	13,693,415	0	0	0	0	0	0	0	13,693,415
5	2355   Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	PAGU	10,737,188,000	8,125,740,000	667,802,000	0	0	0	0	0	0	19,530,730,000
		REALISASI	10,737,164,730 (100.00%)	8,125,379,008 (100.00%)	667,788,350 (100.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19,530,332,088 (100.00%)
		SISA	23,270	360,992	13,650	0	0	0	0	0	0	397,912
<b>GRAND TOTAL</b>		PAGU	10,737,188,000	42,864,889,000	787,802,000	0	0	0	0	0	0	54,389,879,000
		REALISASI	10,737,164,730 (100.00%)	42,758,635,369 (99.75%)	787,787,413 (100.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	54,283,587,512 (99.80%)
		SISA	23,270	106,253,631	14,587	0	0	0	0	0	0	106,291,488

## B. Analisis Pencapaian Kinerja

Sampai dengan Tahun 2023 Pangkalan PSDKP Tual telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Terdapat 27 indeks kinerja yang dapat dicapai oleh Pangkalan PSDKP Tual pencapaian terhadap evaluasi dan analisis pada setiap sasaran kegiatan diuraikan sebagai berikut:

### 1. Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif

Sasaran kegiatan ini menurunkan 1 indeks kinerja utama yaitu, Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks) dengan target 80, IKU ini pada

beberapa tahun sebelumnya belum pernah dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Tual sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya.

Tabel 3. 3 Capaian IKU SK. 1

Indikator Kinerja	Capaian				
	2022	Target 2023	2023	%	Renstra
<b>Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas</b>					
<b>Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)</b>	-	80	100	120	-

Tabel 3. 4 Perbandingan IKU UPT SK. 1

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Tual	Batam	Jakarta	Bitung	Benoa	Lampulo
<b>SK.1</b>	<b>Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif</b>	IKU 1 Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	100	100	100	100	100	100

### a. IKU 1: Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)

Indeks kualitas pembinaan pokmaswas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual merupakan indeks kinerja utama yang pada awal tahun bukan merupakan IKU yang dijalankan. Seiring berjalannya waktu terjadi pergeseran anggaran dan kegiatan POKMASWAS yang sebelumnya dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Biak dialihkan ke Pangkalan PSDKP Tual dengan lokasi pelaksanaan kegiatan pembinaan pada Provinsi Papua Selatan yaitu di Merauke yang merupakan wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual.

Untuk mendukung pergeseran kegiatan dan anggaran tersebut Pangkalan PSDKP Tual melaksanakan revisi dengan melampirkan justifikasi antara lain, Pergeseran anggaran dari Stasiun PSDKP Biak ke Pangkalan PSDKP Tual sebesar Rp54.570.000 dari 2350.QDD.001 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP pada Stasiun PSDKP Biak ke 2350.QDD.001 Pangkalan PSDKP Tual. Setelah melakukan perencanaan dan kalkulasi maka anggaran yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan pokmaswas dirasa tidak mencukupi sehingga Pangkalan PSDKP Tual Kembali mendapatkan penambahan anggaran dari pusat sebesar Rp45.430.000 sehingga total pagu untuk kegiatan pokmaswas yang dilaksanakan di Merauke sejumlah Rp100.000.000. Pergeseran anggaran dilakukan untuk memperkuat peran serta masyarakat di dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Merauke,

mengingat kegiatan pemanfaatan di wilayah tersebut semakin meningkat sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran. Di Kabupaten Merauke sendiri sepanjang Tahun 2023 terdapat 4 (empat) pelanggaran yang dikenakan Sanksi Administratif diantaranya pelanggaran DPI (Daerah Penangkapan Ikan) di daerah perairan Papua Nugini, pelanggaran jalur penangkapan ikan, serta Denda Administratif dengan pelanggaran melakukan penangkapan Ikan Hiu Martil Besar yang termasuk dalam Appendiks II Cites yang tidak memiliki kuota pengambilan. Pelanggaran masih mungkin terjadi seperti pelanggaran *Transshipment*, pelanggaran batas negara, serta penangkapan di jalur yang terlarang. Ketiga hal tersebut merupakan bagian risiko yang akan dihadapi jika pergeseran anggaran ini tidak dilaksanakan maka salah satu pencegahan terjadinya pelanggaran di Kabupaten Merauke melalui peran serta Masyarakat (Pokmaswas) menjadi tidak optimal.

Komponen penilaian kegiatan pembinaan POKMASWAS antara lain:

- a. Rencana kerja kegiatan pembinaan;
- b. Pendataan keaktifan POKMASWAS;
- c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan.

**Formula:**

$$x = \frac{(a + b + c)}{100} \times 100$$

**Keterangan:**

$x$  : Indeks Kualitas Supervisi Pembinaan POKMASWAS

$a$  : Rencana kerja kegiatan pembinaan (bobot: 20)

$b$  : Pendataan keaktifan POKMASWAS (bobot: 30)

$c$  : Pelaksanaan kegiatan pembinaan (bobot: 50)

Selama kurun waktu Tahun 2023 Pangkalan PSDKP Tual melaksanakan kegiatan pembinaan pokmaswas yang merupakan kegiatan yang menjadi IKU dengan hasil capaian 100 atau sebesar 120% dengan melaksanakan semua tahapan meliputi rencana kerja, pendataan keaktifan POKMASWAS, dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dengan output kegiatan sebanyak 2 kelompok yaitu Pokmaswas Lampu Satu sebanyak 80 orang dan Pokmaswas Gudang Arang sebanyak 20 orang.

Jika dibandingkan dengan target yang tertuang pada renstra maka ada penyesuaian terhadap pengukuran kinerja POKMASWAS yang sebelumnya, tentunya tidak relevan untuk dikomparasikan.

Pelaksanaan kegiatan pembinaan POKMASWAS dapat berhasil dan melebihi target dikarenakan beberapa Analisa penyebab keberhasilan diantaranya;

- UPT Pangkalan PSDKP Tual melalui Satwas Merauke turut serta memantau keaktifan POKMASWAS, dengan membangun komunikasi yang intens dengan pokmaswas maupun lembaga terkait;
- Aktif membangun komunikasi dengan pusat dan daerah dalam hal ini Direktorat POA dan DKP terkait penyelenggaraan kegiatan baik pemateri dan lokasi serta mobilisasi kehadiran POKMASWAS dalam kegiatan dimaksud;

Realisasi anggaran dalam penyelenggaraan kegiatan pembinaan POKMASWAS sebesar 99,99% atau sebesar Rp99.998.020,- (*Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Rupiah*) dari total anggaran sebesar Rp100.000.000 (*Seratus Juta Rupiah*)

Dalam pelaksanaan pembinaan POKMASWAS kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah perencanaan dan program, hal ini dikarenakan kegiatan pembinaan pokmaswas merupakan kegiatan yang sejak awal tahun tidak melekat pada anggaran Pangkalan PSDKP Tual melainkan pelimpahan Stasiun PSDKP Biak. Perhitungan akan kebutuhan anggaran bahkan kekurangan setelah pelimpahan menjadi sangat penting untuk menentukan besaran anggaran atas kegiatan, mengingat pelaksanaan kegiatan yang cukup jauh dari Pangkalan PSDKP Tual.

## **2. Sasaran Kegiatan 2: Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif**

Sasaran Kegiatan kedua menghasilkan 3 Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Pangkalan PSDKP Tual diantaranya

1. Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks);
2. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks);
3. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)

Kondisi ini sedikit berbeda dimana pada tahun 2022 dari sasaran kegiatan yang sama menghasilkan 3 IKU yang kemudian pada tahun 2023 IKU Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP Lingkup Pangkalan PSDKP Tual (Indeks), dihilangkan dan diganti dengan Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual.

Tabel 3. 5 Capaian IKU SK. 2

Indikator Kinerja	Capaian				
	2022	Target 2023	2023	%	Renstra
<b>Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)</b>	92,92	87,6	96,88	110,59	89
<b>Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)</b>	104,33	87,6	97,87	111,72	89
<b>Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual</b>	-	100%	100%	100	-

Tabel 3. 6 Perbandingan IKU UPT SK. 2

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Tual	Batam	Jakarta	Bitung	Benoa	Lampulo	
SK.2	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif	IKU 2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	96,88	100	100	100	98,33	100
		IKU 3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	97,87	95,54	98,05	90,28	92,26	94,88
		IKU 4	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	100%	100%	100%	100%	100%	100%

### a. IKU 2: Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Tual (indeks)

Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Tual merupakan salah satu indikator kinerja yang dipakai untuk menentukan sejauh mana Pangkalan PSDKP Tual mengoptimalkan armada pengawasan dalam hal ini kapal pengawas dalam mengoptimalkan pengawasan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual terutama di WPP NRI 718, 714, 715. Secara sederhana dalam informasi indikator kinerja IKU ini didefinisikan sebagai sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap

operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif.

Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- a. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan;
- b. Cakupan wilayah pengawasan;
- c. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
- d. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Formula:

$$i_{kp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot } (\%) \times \left( \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

**Keterangan:**

- Ikp = Indeks kinerja Kapal Pengawas  
Bobot (%) = Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi  
Capaian = Realisasi capaian kinerja Kapal Pengawas  
Target = Sasaran kinerja Kapal Pengawas

Variabel Pembentuk:

**1. Pemeriksaan : Bobot 40%**

- Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal): Bobot 70%
- Pemeriksaan Kelautan (kali) ]: Bobot 30%, Pemeriksaan Kelautan antara lain: [Pemeriksaan Kawasan Konservasi, Pemanfaatan Ruang Laut, Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi, dll]
- Setiap Kapal Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 2 (dua) unit kapal ikan per hari.

**2. Cakupan wilayah pengawasan (Bobot 40%)**

- Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara;
- Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015).

- Masing-masing kapal pengawas diberikan target cakupan per tahun. Dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis kapal dan alokasi kapal setiap WPPNRI.

### 3. Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 15%)

- Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan : Bobot 60%
- Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%
- Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.

### 4. Hasil dukungan operasi lainnya (Bobot 5%)

- Penyitaan Alat Tangkap terlarang : Bobot 30%
- Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 30%
- Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi: Bobot 40%
- Komponen ini juga bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.

Selama tahun 2023 Pangkalan PSDKP Tual berhasil memperoleh capaian **96,88** dengan persentasi **110,59%** sampai dengan akhir tahun 2023 sebagaimana tertuang pada tabel di atas, jika dibandingkan dengan **target renstra sebesar 89**. IKU ini baru diterapkan pada tahun 2022 dan berlanjut hingga 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan pencapaiannya sampai beberapa tahun kebelakang.

analisa penyebab keberhasilan nilai IKU yang optimal, diantaranya:

1. Menyusun rencana operasi yang matang dan tepat sasaran, penyusunan rencana operasi dibuat dengan memperhitungkan aspek pendukung seperti wilayah potensi pelanggaran, pemeriksaan atas aktifitas pada Kawasan konservasi maupun data analisis SPKP;
2. Melakukan pemetaan terhadap wilayah operasi berdasarkan peta kerawanan dan laporan masyarakat, terus mengupdate data kerawanan yang berbasis pelaporan maupun pemantauan;
3. Melakukan follow up terhadap hasil pengawasan SPKP sebagai dasar pelaksanaan operasi, hal ini maksudkan agar hasil pengawasan sebelumnya bisa menjadi dasar pelaksanaan operasi;
4. Memastikan kebutuhan personil dan kesiapan armada terpenuhi dan terlaksana, hal ini berkaitan dengan indeks kinerja pemenuhan kebutuhan logistik kapal baik berupa BBM, pelumas, dan air bersih, maupaun kebutuhan logistik personil baik berupa bahan makanan maupun kebutuhan alat tulis kantor maupun bahan komputer;

5. Melakukan evaluasi terhadap capaian hari operasi dan hasil pengawasan yang dilakukan, hal ini dimaksudkan agar Pangkalan PSDKP Tual dapat membantu dan menilai pada saat operasi dilaksanakan apa saja yang menyebabkan kegiatan operasi tidak optimal dan dapat menentukan langkah pencegahannya.

Realisasi anggaran selama tahun 2023 untuk IKU Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual yaitu sebesar Rp28.109.435.916,- atau sebesar 99,99%.

Dalam mendukung tercapainya IKU ini Pangkalan PSDKP Tual dibekali 2 Unit Kapal Pengawas yaitu KP. Hiu 14 dan KP. Hiu Macan 06. Selama tahun 2023 KP. Hiu 14 telah melaksanakan gelar operasi sebanyak 105 hari operasi dari target 94 hari, sedangkan KP. Hiu Macan 06 melaksanakan 105 hari gelar operasi dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 94 hari operasi. Kapal perikanan yang berhasil diperiksa sampai selama tahun 2023 untuk KP. Hiu 14 sebanyak 249 KII, 16 di addhoc, untuk KP Hiu Macan 06 sebanyak 296 KII, 1 di addhoc, dengan wilayah operasi pada WPP NRI 714, 715, 718.

Capaian IKU indeks kinerja operasi kapal pengawas dapat tercapai tidak hanya karena aspek keberhasilan yang telah dijabarkan tetapi dikarenakan adanya dukungan dari beberapa kegiatan maupun IKU lain yang sangat erat kaitannya antara lain

- Pemenuhan logistik kapal pengawas, diantaranya penyediaan BBM, pelumas, air bersih, belanja natura, dan penyediaan alat tulis kantor maupun bahan computer yang dalam pemenuhannya dilaksanakan baik secara swakelola maupun kontraktual;
- Perawatan armada baik secara rutin, darurat, dan prefentif merupakan kegiatan rutin yang dilakukan untuk menunjang performa armada pengawasan dimulai dari pemeliharaan, pembelian suku cadang dan kegiatan lainnya seperti perawatan deck,;
- Perencanaan dan program yang secara kontinu melakukan pembaruan atas kebutuhan BBM kapal yang mengalami kenaikan harga jauh dari patokan dalam penyusunan RKA tahun 2023, sehingga terjadi penambahan anggaran untuk menutupi kekurangan hari operasi dalam mencapai target.

### **b. IKU 3: Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)**

Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Tual merupakan indeks kinerja yang dipakai untuk mengukur optimalitas dari armada *speedboat* yang berada di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup

Pangkalan PSDKP Tual dapat didefinisikan sebagai sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speedboat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif.

Indeks Kinerja Kinerja Operasional Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- 1) Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan;
- 2) Cakupan wilayah pengawasan;
- 3) Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
- 4) Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Formula:

$$i_{sp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot } (\%) \times \left( \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

Isp	=	Indeks kinerja Speedboat Pengawas
Bobot (%)	=	Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi
Capaian	=	Realisasi capaian kinerja Speedboat Pengawas
Target	=	Sasaran kinerja Speedboat Pengawas

Formula:

$$i_{sp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot } (\%) \times \left( \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

Isp	=	Indeks kinerja Speedboat Pengawas
Bobot (%)	=	Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi
Capaian	=	Realisasi capaian kinerja Speedboat Pengawas
Target	=	Sasaran kinerja Speedboat Pengawas

#### VARIABEL PEMBENTUK

Daftar Faktor Penghitung Indeks Kinerja Speedboat Pengawas

1. Jumlah Pemeriksaan [Bobot 40%] yang terdiri dari:
  - Pemeriksaan Kapal (unit kapal) : Bobot 50%
  - Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 50%

- Setiap Speedboat Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 1 unit kapal ikan per hari.
2. Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan [Bobot 40%];
    - Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015)
    - Masing-masing speedboat pengawas diberikan target cakupan per tahun, dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis speedboat pengawas.
  3. Jumlah Tindak Lanjut Target Operasi [Bobot 15%] yang terdiri dari:
    - Intercept indikasi pelanggaran kelautan dan perikanan : Bobot 60%
    - Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%
    - Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.
  4. Jumlah dukungan operasi lainnya [Bobot 5%] yang terdiri dari:
    - Penyitaan Alat Tangkap Terlarang : Bobot 40%
    - Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 40%
    - Dukungan Operasi Bersama : Bobot 20%
    - Komponen bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.

Dalam kurun waktu sampai akhir Tahun 2023 Pangkalan PSDKP Tual telah melaksanakan operasi *speedboat* pengawasan yang berada dan tersebar diseluruh wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual. Capaian yang diperoleh sebesar **97,87** dengan persentase sebesar **111,72%** dari **target sebesar 87,6 pada 2023** sedangkan target yang ditetapkan pada **renstra sebesar 89**. Capaian yang diperoleh pangkalan PSDKP Tual sangat baik walapun sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan **tahun 2022 dengan capaian 104,33** dan belum bisa dibandingkan beberapa tahun sebelumnya dikarenakan merupakan IKU yang baru ditetapkan pada tahun 2022.

Analisa penyebab keberhasilan capaian IKU dimaksud, diantaranya:

1. Menyusun rencana pengawasan yang matang dan tepat sasaran, rencana pengawasan dengan speedboat dilaksanakan dengan memperhitungkan data pengawasan terdahulu sebagai informasi awal dalam penetapan RO;

2. Melakukan pemetaan terhadap wilayah operasi, hal ini dimaksudkan agar memudahkan menentukan target operasi ataupun potensi wilayah pengawasan baik pengawasan perikanan maupun kelautan;
3. Memenuhi kebutuhan logistic awak *speedboat* dalam menunjang kegiatan operasi, dengan melengkapi awak dengan perbekalan maupun sarana keselamatan sehingga pelaksanaan patrol lebih optimal;
4. Memenuhi kebutuhan *speedboat* diantaranya melaksanakan perawatan dan pemenuhan suku cadang dalam menjaga performa armada, secara teori keberhasilan atas IKU ini bergantung kepada kelayakan operasi armada speed sehingga perlu diperhatikan komponen yang menunjang semisal performa mesin maupun suku cadang;
5. Mengidentifikasi armada yang sudah tidak dapat beroperasi, armada yang sudah tidak layak guna segera dilaksanakan pelaporan sehingga tidak lagi memperoleh anggaran operasi yang nantinya bisa menghambat pencapaian kinerja;

Realisasi anggaran yang dicapai dalam mendukung capaian Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Tual adalah sebesar Rp2.030.611.868,- atau sebesar 99,99% dari total pagu yang dianggarkan. Capaian atas IKU indeks kerja operasi speedboat pengawas didukung oleh kegiatan lain yang berhubungan era tantara lai

- Perencanaan operasi berdasarkan data pengawasan dari tim kerja terkait;
- Kegiatan pemantauan ketaatan kapal perikanan;
- Perencanaan anggaran atas kebutuhan yang mendukung indeks operasi speedboat pengawas.

Capaian hari operasi selama kurun tahun 2023 seluruh armada *speedboat* yang tersebar di seluruh satwas dan wilker Pangkalan PSDKP Tual telah melaksanakan 352 hari operasi dari total keseluruhan 10 armada speedboat pengawasan dan melaksanakan pemeriksaan kepada 645 KII dan 23 objek pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga total pemeriksaan sebanyak 668 unit.

#### **1. IKU 4: Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)**

Indeks kinerja persentase pemenuhan logistik kapal pengawas merupakan IKU yang berbicara tentang asoek pemenuhan kebutuhan logistic kapal pengawas meliputi logistic kapal dan logistic personal. Logistik kapal antara lain, BBM, Pelumas, dan Alat Pelayanan, sedangkan logistik personal meliputi, bahan makanan AKP, air bersih, senjata api.

Kegiatan pemenuhan logistik dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Tual dan dikatakan tercapai dengan beberapa kriteria yaitu tersedianya berita acara sisa BBM akhir bulan, dokumen pembelian pelumas, dokumen pemenuhan bahan makanan, dokumen pemenuhan air bersih, dokumen pemenuhan atk dan bahan komputer, serta dokumen laporan senjata api dan amunisi.

**FORMULA:**

$$Xp = (30\%. x_a) + (20\%. x_b) + (25\%. x_c) + (15\%. x_d) + (5\%. x_e) + (5\%. x_f)$$

**Keterangan:**

- $X_a$  : Pemenuhan Kebutuhan BBM KP (bobot: 30)
- $X_b$  : Pemenuhan Kebutuhan Pelumas KP (bobot: 20)
- $X_c$  : Pemenuhan Bahan Makanan AKP (bobot: 25)
- $X_d$  : Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP (bobot: 15)
- $X_e$  : Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP (bobot: 5)
- $X_f$  : Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api (bobot : 5)

Pada tahun 2023 Pangkalan PSDKP Tual berhasil memperoleh **capaian sebesar 100%**, sesuai dengan target yang ditetapkan pada PK 2023. Capaian ini diperoleh dengan landasan Pangkalan PSDKP Tual telah memenuhi setiap komponen logistik kapal maupun logistik personil, dimana pemenuhan itu telah dijalankan selama tahun berjalan dan terprogram setiap bulannya ataupun triwulan sesuai dengan kebutuhan kapal pengawas. IKU ini baru ditetapkan pada tahun 2022 dan kemudian dihapus pada awal tahun 2023 kemudian ditetapkan pada revisi ke 2 PK Pangkalan PSDKP Tual berdasarkan matriks cascading terbari ditjen PSDKP.

Analisis keberhasilan atas IKU persentase pemenuhan logistik kapal pengawas antara lain dikarenakan;

- Melaksanakan monitoring atas kebutuhan kapal pengawas, monitoring dapat dilaksanakan melalui pengajuan kebutuhan logistik yang berasal dari awak kapal pengawas;
- Memastikan pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas maupun logistic personil, telah memiliki dokumen yang sesuai. Pangkalan PSDKP Tual melalui mekanisme maupun petugas yang diberikan wewenang harus memastikan

pemenuhan logistic atas kebutuhan kapal dan awak kapal terdokumentasikan dengan baik berupa pelaporan maupun pertanggungjawaban;

- Memastikan kebutuhan logistic kapal pengawas dapat terpenuhi minimal dalam setiap triwulan, Pangkalan PSDKP Tual melalui tim kerja Prasarana dan sarana operasi kapal pengawas wajib memastikan kebutuhan logistik kapal terpenuhi dengan monitoring dan tindak lanjut atas permohonan kebutuhan logistik yang diajukan kapal.

Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas selama tahun anggaran 2023 telah menghasilkan realisasi sebesar Rp28.106.989.256,- (*Dua Puluh Delapan Miliar Seratus Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*) dari total anggaran operasional sebesar Rp28.107.280.000,- (*Dua Puluh Delapan Miliar Seratus Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) atau sebesar 99,99%.

Selain analisa keberhasilan capaian IKU terdapat kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain:

- Analisis kebutuhan BBM, pada tahun 2023 terjadi kenaikan BBM yang menyebabkan adanya penyesuaian kebutuhan BBM sehingga dilakukan perhitungan kebutuhan BBM untuk memenuhi target operasi;
- Perencanaan anggaran, hal ini meliputi perencanaan awal maupun revisi yang bertujuan memenuhi aspek logistic kapal pengawas, kegiatan ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan analisis kebutuhan BBM;
- Pemetaan kebutuhan kapal terkait pembiayaan, hal ini maksudkan agar Pangkalan PSDKP Tual dapat melakukan plot terhadap kebutuhan logistic kapal yang pembiayaannya dapat ditanggulangi dengan menggunakan mekanisme GUP, TUP ataukah LS, sehingga skala prioritas tetap dapat berjalan pemenuhan dapat terlaksana;
- Monitoring dan evaluasi kebutuhan kapal pengawas akan ketepatan dokumen yang dihasilkan dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

### **3. Sasaran Kegiatan 3: Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan**

Sasaran kegiatan terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan menurunkan 1 Indeks Kinerja Utama yang ditetapkan Pangkalan PSDKP Tual yaitu "Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Nilai)". IKU ini merupakan IKU lama yang sudah berjalan tahun sebelumnya. Berikut tabelnya.

Tabel 3. 7 Capaian IKU SK. 3

Indikator Kinerja	Capaian					Renstra
	2021	2022	Target 2023	2023	%	
Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Nilai)	100	100	100	100	100	-

Tabel 3. 8 Perbandingan IKU UPT SK. 3

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian					
			Tual	Batam	Jakarta	Bitung	Benoa	Lampulo
SK.3	terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan	IKU 5 Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Tual (%)	100	100	100	100	100	100

#### a. IKU 5: Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Nilai)

IKU Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual merupakan IKU yang berbicara tentang tupoksi organisasi dalam pengawasan kelautan. Pemeriksaan pelaku usaha kelautan dilaksanakan oleh Polsus PWP3K. Pelaksanaan pengawasan pelaku usaha kelautan berpedoman pada Peraturan yang berlaku sebagaimana jenis kegiatan pengawasan yang dilaksanakan. IKU ini terdiri atas beberapa jenis pengawasan kelautan diantaranya:

1. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya;
2. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan Kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya;
3. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya;
4. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya;

5. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya;
6. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
7. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak.

Formula:

$$x_{sdk} = \sum_{i=1}^n \frac{(Xi + \dots + Xn)}{n}$$

Keterangan:

- X<sub>sdk</sub>* : Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan
- X<sub>i</sub>* : Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan sumber daya kelautan ke-i
- n* : Jumlah komponen objek pengawasan sumber daya kelautan yang diperiksa

Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan mengacu pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 9 Tahapan pemeriksaan IKU 5

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : 1. Membuat jadwal pemeriksaan; 2. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; 3. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau 4. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDK	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Tahun 2023 capaian IKU ini berhasil dicapai dengan nilai yang baik yaitu 100, sebagaimana target Tahunan yang ditetapkan. Capaian dapat diraih dengan memenuhi tahapan

pemeriksaan sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas. Terjadi perubahan nomenklatur pada IKU ini dan tahapan penilaian pada triwulan IV, akan tetapi secara substantif penilaian IKU ini masih mengacu pada tahapan pemeriksaan sebagaimana tertuang pada Perdirjen PSDKP Nomor 6 Tahun 2021.

Adapun analisa penyebab keberhasilan yang dilaksanakan Pangkalan PSDKP Tual agar mendapatkan capaian yang sempurna dalam memenuhi IKU dimaksud antara lain:

1. Melakukan rapat perencanaan yang baik terkait objek pengawasan, sehingga pelaksanaan pengawasan sesuai dengan regulasi yang berlaku;
2. Mengumpulkan informasi pendahuluan, yang bertujuan agar meminimalisir masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan misalnya lokasi unit usaha, transportasi yang akan digunakan, potensi persoalan yang timbul karena pengawasan;
3. Melakukan pemantapan terhadap peraturan yang berhubungan langsung dengan objek pengawasan, dengan internalisasi peraturan maupun kebijakan terbaru yang berkaitan dengan objek pengawasan;
4. Melakukan *sharing session* dengan dinas terkait guna menyamakan persepsi dan penguasaan kondisi terhadap objek pengawasan agar pelaksanaan pengawasan lebih professional dan bertanggungjawab;
5. Segera melakukan pulbaket terkait laporan yang masuk, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan prima dan meningkatkan kepercayaan Masyarakat serta menambah target pengawasan insidental yang dilaksanakan;
6. Memenuhi tahapan pelaksanaan sebagaimana yang termuat dalam informasi indikator kinerja, agar pelaksanaan pengawasan terstruktur serta pengukuran kinerja dapat terlaksana.

Adapun kendala dalam melaksanakan IKU Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Tual (%) antara lain:

1. Wilayah pengawasan yang jauh;
2. Kurangnya informasi pendahuluan terkait objek yang diawasi;
3. Adanya perbedaan persepsi terkait peraturan yang berlaku;
4. Benturan tradisi dengan peraturan yang masih perlu dilakukan pendekatan secara kekeluargaan maupun jalur keagamaan.

Raihan atas IKU juga didukung oleh kegiatan lain yang menunjang pencapaian yaitu:

1. Bimtek dan sosialisasi terkait regulasi dan kebijakan terkait pengawasan kepada Polsus PWP3K;
2. Pengadaan fasilitas penunjang pengawasan seperti peralatan, media dokumentasi, dan perangkat pengolahan data;
3. Sosialisasi kepada kelompok masyarakat terkait regulasi, serta dampak dari aktifitas yang melanggar baik secara ekologis maupun hukum.

Pengawasan dilaksanakan secara rutin maupun insidental dengan menggunakan longboat atau dengan kunjungan yang dapat diakses melalui perjalanan darat. Pengawasan perlu ditingkatkan dengan upaya komunikatif maupun pendekatan sanksi administratif. Realisasi anggaran selama tahun anggaran 2023 untuk mendukung IKU ini sebesar Rp753.540.436,- atau 99,99% dari pagu sebesar Rp753.564.000,-.

**a.1 Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya**

Pencapaian kinerja Tahun 2023 diperoleh dari kegiatan Pengawasan terhadap 60 Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Pangkalan PSDKP Tual dari 10 target yang ditetapkan dari 60 lembaga 50 diantaranya sudah memenuhi regulasi dan 10 belum memenuhi.

Kegiatan pendukung utama pengawasan Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Pangkalan PSDKP Tual meliputi pengawasan pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan dan non perikanan. Perlu untuk diketahui bahwa pada wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual belum banyak terdapat pabrik atau industri skala besar yang berpotensi melakukan pencemaran.

Tabel 3. 10 Rekap Pengawasan Pencemaran

NO	LOKASI PENGAWASAN	PELAKU USAHA	DOKUMEN PERIZINAN	IPAL	HASIL PENGAWASAN	KETAATAN		REKOMENDASI
						TAAT	TDK TAAT	

1.	jl. Dullah raya Km.8 Desa Ngadi, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, Propinsi Maluku	PT. Samudera Indo Sejahtera	NIB : 8120103840915 PKKPRL : 30092210218172002 Perijinan Berusaha : 8120103840914 Amdal	Ada	Tidak ditemukan indikasi pencemaran dan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Indo Sejahtera	Taat	
2	PT. Industri Perikanan Namatota Titik Koordinat : 03°50'57"LS – 133°55'40"BT	UPI, pengolahan minyak ikan dan tambat labuh Kapal Perikanan	□ NIB : 9120010110054 □ Nomor Ijin Usaha : Surat Izin Usaha Perikanan (570/653/PTSP-IV/2018) & Penangkapan dan pengangkutan ikan (04.14.01.0033.7301) izin pusat (11.21.04.9198.0180) izin provinsi □ Nomor Ijin lokasi : 660/12/BAPP-KIT/2020 □ AMDAL : 04/KPTS- KP/KMN/2009	Ada	Secara umum Limbah buangan dari kapal dan limbah dari UPI dan buangan sampah rumah tangga menimbulkan warna air sedikit keruh disekitar dermaga perusahaan sehingga di khawatirkan dapat mengganggu kelestarian sumberdaya biota air laut yang berada di sekitaran dermaga, jika dibiarkan dapat terjadi degradasi lingkungan dan perubahan tingkah laku ikan/biota di perairan tersebut	Taat	Menuangkan hasil pengawasan dalam Berita Acara pengawasan pencemaran dan memberikan sosialisasi/pembinaan kepada manajemen perusahaan dan orang-orang yang bekerja di kapal perikanan untuk tidak membuang sampah secara sembarangan, selanjutnya bekerjasama dengan instansi terkait membangun kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan sosialisasi yang lebih masif tentang pentingnya menjaga kebersihan laut
3	dermaga PT. Industri Perikanan Namatota, Distrik Kaimana Kota, Kabupaten Kaimana, dengan titik koordinat 03°50'57"LS – 133°55'39"BT	PT. Industri Perikanan Namatota UPI, pengolahan minyak ikan dan tambat labuh Kapal Perikanan	□ NIB : 9120010110054 □ Nomor Ijin Usaha : Surat Izin Usaha Perikanan (570/653/PTSP-IV/2018) & Penangkapan dan pengangkutan ikan (04.14.01.0033.7301) izin pusat (11.21.04.9198.0180) izin provinsi □ Nomor Ijin lokasi : 660/12/BAPP-KIT/2020 □ AMDAL : 04/KPTS- KP/KMN/2009	Ada	Secara umum Limbah buangan dari kapal dan limbah dari UPI dan buangan sampah rumah tangga menimbulkan warna air sedikit keruh disekitar dermaga perusahaan sehingga di khawatirkan dapat mengganggu kelestarian sumberdaya biota air laut yang berada di sekitaran dermaga, jika dibiarkan dapat terjadi degradasi lingkungan dan perubahan tingkah laku ikan/biota di perairan tersebut	Taat	Menuangkan hasil pengawasan dalam Berita Acara pengawasan pencemaran dan memberikan sosialisasi/pembinaan kepada manajemen perusahaan dan orang-orang yang bekerja di kapal perikanan untuk tidak membuang sampah secara sembarangan, selanjutnya bekerjasama dengan instansi terkait membangun kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan sosialisasi yang lebih masif tentang pentingnya menjaga kebersihan laut
4	dermaga pasar ikan Kaimana, distrik Kaimana Kota, Kabupaten Kaimana, dengantitik koordinat 03°38'45.102"L S – 133°43'59.916" BT	La Madi	-	Tidak Ada	Secara umum Limbah buangan dari aktifitas penjualan ikan yakni air rendaman ikan dan sisa sisa ikan menimbulkan wama air keruh dan berbau disekitar dermaga tempat pembongkaran ikan sehingga di khawatirkan dapat mengganggu kelestarian sumberdaya biota air laut yang berada di sekitaran dermaga, jika dibiarkan dapat terjadi degradasi lingkungan dan perubahan tingkah laku ikan/biota di perairan tersebut	Tidak Taat	Menuangkan hasil pengawasan dalam Berita Acara pengawasan pencemaran dan memberikan sosialisasi/pembinaan kepada manajemen perusahaan dan orang-orang yang bekerja di kapal perikanan untuk tidak membuang sampah secara sembarangan, selanjutnya bekerjasama dengan instansi terkait membangun

							kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan sosialisasi yang lebih masif tentang pentingnya menjaga kebersihan laut
5	Desa marsi, Kab.Kaimana, Provinsi Papua Barat 3041'29" S 133048'39" E	PT. Amera Nus	-	Tidak Ada	Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di perairan teluk Bicarai, Desa Marsi kepada PT. AMERA NUS, diperoleh hasil bahwa usaha/kegiatan (sesuai/tidak sesuai)* dalam pelaksanaan kegiatan dengan persyaratan, kewajiban dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam (PKKPRL/KKPRL/AMDAL/UKLU PL/SPPL/Perizinan lainnya)* yaitu: Belum memiliki - PKKPRL - KKPRL - AMDAL - UKL-UPL - SPPL Sudah memiliki - Nomor Induk Berusaha, dan Perizinan Usaha Berbasis Resik	Tidak Taat	Tindak Lanjut : Memberikan sosialisasi/pemahaman terkait dampak yang di timbulkan dari tidak adanya pengendalian, pengelolaan limbah  Tindakan lain yang diusulkan: Segera melakukan pemenuhan Dokumen Pencegahan Pencemaran yaitu: - PKKPRL - KKPRL - AMDAL - UKL-UPL - SPPL
6	Desa Coa, Kab.Kaimana, Provinsi Papua Barat (3037'9" S 133042'14" E)	Philip Heinrich ( Pembekuan Ikan)	-	Tidak Ada	Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di perairan teluk Bicarai, Desa Marsi kepada Philip Heinrich ( Pembekuan Ikan), diperoleh hasil bahwa usaha/kegiatan (sesuai/tidak sesuai) Belum memiliki - PKKPRL - KKPRL - AMDAL - UKL-UPL - SPPL Sudah memiliki - Nomor Induk Berusaha, dan Perizinan Usaha Berbasis Resik	Tidak Taat	Tindak Lanjut : Memberikan sosialisasi/pemahaman terkait dampak yang di timbulkan dari tidak adanya pengendalian, pengelolaan limbah  Tindakan lain yang diusulkan: Segera melakukan pemenuhan Dokumen Pencegahan Pencemaran yaitu: - PKKPRL - KKPRL - AMDAL - UKL-UPL - SPPL
7	Titik koordinat 3039'45" S - 133043'30" E Titik koordinat 3039'45" S - 133043'30" E	KM. Welcome Sir milik PT. Industri Perikanan Namatota	Nomor Induk Berusaha : 9120010110054	Tidak Ada IPAL (kapal ikan)	KM. Welcome Sir tidak menimbulkan pencemaran yang sangat signifikan karena oli bekas dan sampah kapal dibuang di tempat yang sudah tersedia dengan baik	Taat	Disarankan kepada KM. Welcome Sir untuk menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah langsung ke laut

8	pelabuhan umum Kaimana, kab. Kaimana, provinsi Papua Barat Koordinat : 3039'44' S - 133045'30" E	KM. Barokah Jaya Abadi 2 GT.12 (Risaldi)	Nomor Induk Berusaha 1309220030939	Tidak Ada IPAL (kapal ikan)	Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan danlingkungannya yang dilaksanakan di KM. Barokah Jaya Abadi 2 yang berada di pelabuhan umum Kabupaten Kaimana diperoleh hasil bahwa usaha/kegiatan sesuai dalam pelaksanaan kegiatan dengan persyaratan, kewajiban dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam Nomor Induk Berusaha, dan Perizinan Usaha Berbasis Resiko dan tidak ditemukan dugaan pencemaran	Taat		disarankan kepada KM. Barokah Jaya Abadi 2 untuk tetap turut membantu dan menyukseskan program Menteri Kelautan dan Perikanan dalam menjaga laut dari sampah lainya yang dapat mencemari laut
9	Koordinat : 3039'45' S - 133045'28" E	KM. Barokah Jaya Abadi 3 (PU.Kaimana)	Nomor Induk Berusaha 1309220030939	Tidak Ada IPAL (kapal ikan)	1. Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di KM. Barokah Jaya Abadi 3 yang berada di pelabuhan umum Kabupaten Kaimana diperoleh hasil bahwa usaha/kegiatan sesuai dalam pelaksanaan kegiatan dengan persyaratan, kewajiban dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam Nomor Induk Berusaha, dan Perizinan Usaha Berbasis Resiko.  2. Memiliki alat pendukung dalam mencegah terjadinya pencemaran di laut berupa : Penyediaan tempat penampungan oli bekas dari hasil penggantian kembali oli mesin induk dan tempat penampungan sampah plastik  3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan danlingkungannya diperoleh bahwa pada lokasi/lingkungan	Taat		Memberikan sosialisasi/pemahaman terkait dampak yang di timbulkan dari tidak adanya sistem pengendalian, pengelolaan limbah kapal yang mana dapat membahayakan ekosistem kelautan dan perikanan yang berkelanjutan

					usaha/kegiatan tidak ada pencemaran yaitu: Tidak ditemukan aktivitas yang dapat menimbulkan terjadinya indikasi pencemaran perairan.			
10	Desa Namatota, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Koordinat : 3050'58' S - 133055'39" E	KM. Minaraya 06 79 GT (Imam Subagyo)	Nomor Induk Berusaha : 9120010110054	Tidak Ada IPAL (kapal ikan)	Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan di KM Mina Raya 06 tidak ditemukan duggan pencemaran yang ditimbulkan dari aktifitas kapal	Taat		Memberikan sosialisasi/pemahaman terkait dampak yang di timbulkan dari tidak adanya sistem pengendalian, pengelolaan limbah kapal yang mana dapat membahayakan ekosistem kelautan dan perikanan yang berkelanjutan
11	dermaga PT. Industri Perikanan Namatota, kab. Kaimana, provinsi Papua Barat	KM. Arawala 9 (30 GT)	Nomor Induk Berusaha : 9120010110054	Tidak Ada IPAL (kapal ikan)	Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di KM. Arawala 9 yang berada di dermaga PT. Industri Perikanan Namatota, Kabupaten Kaimana diperoleh hasil bahwa usaha/kegiatan sesuai dalam pelaksanaan kegiatan dengan persyaratan, kewajiban dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam yaitu:- Nomor Induk Berusaha, dan Perizinan Usaha Subsektor penangkapan Ikan	Taat		Memberikan sosialisasi/pemahaman terkait dampak yang di timbulkan dari tidak adanya sistem pengendalian, pengelolaan limbah kapal yang mana dapat membahayakan ekosistem kelautan dan perikanan yang berkelanjutan
12	KM. Yoko Putra 17 yang berada di dermaga PT. Industri Perikanan Namatota, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat	KM. Yoko Putra 17 57 GT	Nomor Induk Berusaha : 1711210030564	Tidak Ada IPAL (kapal ikan)	Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di KM. Yoko Putra 17 yang berada di dermaga PT. Industri Perikanan Namatota, Kabupaten Kaimana diperoleh hasil bahwa usaha/kegiatan sesuai dalam	Taat		Memberikan sosialisasi/pemahaman terkait dampak yang di timbulkan dari tidak adanya sistem pengendalian, pengelolaan limbah kapal yang mana dapat membahayakan ekosistem kelautan dan perikanan yang berkelanjutan

					pelaksanaan kegiatan dengan persyaratan, kewajiban dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam Perizinan lainnya yaitu: - Nomor Induk Berusaha, dan Perizinan Usaha Subsektor Pengangkutan Ikan			
13	KM. IPN 1 yang berada di dermaga PU. Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat	KM. IPN 1 27 GT	Nomor Induk Berusaha : 9120010110054	Tidak Ada IPAL (kapal ikan)	Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di KM. IPN 1 yang berada di dermaga PU. Kaimana, Kabupaten Kaimana diperoleh hasil bahwa usaha/kegiatan sesuai dalam pelaksanaan kegiatan dengan persyaratan, kewajiban dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam Perizinan lainnya yaitu: - Nomor Induk Berusaha, dan Perizinan Usaha Subsektor Pengangkutan Ikan	Taat		Memberikan sosialisasi/pemahaman terkait dampak yang di timbulkan dari tidak adanya sistem pengendalian, pengelolaan limbah kapal yang berpotensi membahayakan ekosistem kelautan dan perikanan yang berkelanjutan
14	Karamba Jaring Apung PT Rajawali Laut Timur di Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku Titik Koordinat : 007 09' 10" S 131 42' 50" E	PT Rajawali Laut Timur	Nomor Ijin Usaha : 9120200161673	Tidak Ada IPAL (kapal ikan)	Usaha pembudidayaan ikan ini tidak menimbulkan pencemaran yang sangat signifikan, karena tidak menggunakan pakan buatan	Taat		Disarankan kepada kepala karamba jaring apung untuk menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah langsung ke laut
15	Bunga Kembar 05 di Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku Titik Koordinat : 007' 58' 39" S 131' 17' 55" E	KM. Bunga Kembar 05 Arsady	Nomor Ijin Usaha : 9120006241691	Tidak Ada IPAL (kapal ikan)	Usaha penangkapan ikan ini tidak menimbulkan pencemaran yang sangat signifikan, karena menurut keterangan dari pelaku usaha limbah B3 tidak dibuang dilaut	Taat		Disarankan kepada pelaku usaha untuk dapat mendaur ulang limbah B3 dari kapal perikanan yang dimilikinya
16	Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan	Kapal Perikanan KM. Bunga Kembar 04 Arsady	Nomor Induk Berusaha : 9120006241691	Tidak Ada IPAL (kapal ikan)	Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya	Taat		

	Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku Lin. 007' 58°39'S Buj. 131° 17'55"E				yang dilaksanakan di KM. Bunga Kembar 04 kepada Usaha Penangkapan Ikan milik Arsady, diperoleh hasil bahwa pada lokasi/lingkungan usaha/kegiatan tidak ditemukan pencemaran akibat aktifitas perikanan			
17	Waturu Kromomolin Kep.Tanimbar Lin. 0070 30°12'S Buj. 1310 39'24"E	Kapal Perikanan KM. Jundry Jaya III (Usaha Pengangkutan Ikan)	Nomor Induk Berusaha : 2709210030045	Tidak Ada IPAL (kapal ikan)	Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di KM. Jundry Jaya III milik Lie Alfianto Lijaya, diperoleh hasil bahwa pada lokasi/lingkungan usaha/kegiatan tidak ditemukan pencemaran akibat aktifitas kapal perikanan	Taat		Perlu dilakukan sosialisasi dan pengawasan tentang pentingnya tidak membuang limbah bahan bakar dan limbah rumah tangga di sekitar kolam bandar pelabuhan dan di perairan / laut
18	Saumlaki Tanimbar Selatan Kep.Tanimbar Lin. 0070 58°33'S Buj. 1310 17'58"E	Heni Khotimah (Usaha Pengolahan Ikan)	Nomor Induk Berusaha : 1801220026177	Tidak Ada	berdasarkan hasil pengawasan tidak ditemukan indikasi pencemaran yang bersumber dari aktifitas ini tetapi perusahaan ini belum memiliki dokumen perincian dan ketersediaan IPAL yang memadai	Tidak Taat		dari uraian hasil pengawasan diberikan rekomendasi untuk segera mengurus kelengkapan dokumen perincian dan membuat IPAL
19	Weratan Wer Maktian Kepulauan Tanimbar Lin. 0070 30°53'S Buj. 1310 01'47"E	Usaha Pengolahan Ikan CV Weru (Sengky Sukendy)	Nomor Induk Berusaha : 2308210012126 PKKPRL/KKRL: 24112110218103002	Ada	Tidak ditemukan aktifitas yang mencemari lingkungan sekitar	Taat		
20	Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku Lin. 0070 58°33'S Buj. 1310 17'58"E	KM. Rido Jaya 01 (Benediktus Sakliresi)	Nomor Induk Berusaha : 2105220003302	Tidak Ada IPAL (kapal ikan)	Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di Lokasi Usaha Penangkapan Ikan KM. Rido Jaya 01 milik Benediktus Sakliresi, diperoleh hasil bahwa usaha/kegiatan sesuai dalam pelaksanaan kegiatan dengan persyaratan, kewajiban dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam Perizinan lainnyayaitu: Nomor Induk Berusaha, Tanda Daftar Kapal Perikanan, dan Perizinan usaha Berbasis Resiko.	Taat		Perlu dilakukan sosialisasi dan pengawasan tentang pentingnya tidak membuang limbah bahan bakar dan limbah rumah tangga di sekitar kolam bandar pelabuhan dan di perairan / laut

21	Saumlaki Tanimbar Selatan Kep. Tanimbar Lin. 0070 58°34'S Buj. 1310 17°58'E	Ikan KM. Sinetron III (Nurohim)	Nomor Identitas : 2172042704790002	Tidak Ada IPAL (karena pengawasannya di lakukan pada Kapal Perikanan)	Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di Lokasi Usaha Penangkapan Ikan KM. Sinetron III milik Hui Eng dengan Nakhoda Nurohim, diperoleh hasil bahwa usaha/kegiatan sesuai dalam pelaksanaan kegiatan dengan persyaratan, kewajiban dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam Perizinan lainnya Nomor Induk Berusaha, Tanda Daftar Kapal Perikanan, dan Perizinan Usaha Berbasis Resiko. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di Lokasi Usaha Penangkapan Ikan KM. Sinetron III milik Hui Eng dengan Nakhoda Nurohim, diperoleh hasil bahwa pada lokasi/lingkungan usaha/kegiatan tidak adapencemaran	Taat	Perlu dilakukan sosialisasi dan pengawasan tentang pentingnya tidak membuang limbah bahan bakar dan limbah rumah tangga di sekitar kolam bandar pelabuhan dan di perairan / laut
22	Saumlaki Tanimbar Selatan Kep. Tanimbar Lin. 0070 58°53'S Buj. 1310 17°48'E	KM. Molagina (Husein)	Nomor Induk Berusaha : 9120101161256	Tidak Ada IPAL (karena pengawasannya di lakukan pada Kapal Perikanan)	Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di Lokasi Usaha Penangkapan Ikan KM. Molagina milik Husein dengan Nakhoda Husein, diperoleh hasil bahwa usaha/kegiatan sesuai dalam pelaksanaan kegiatan dengan persyaratan, kewajiban dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam Perizinan lainnya yaitu: Nomor Induk Berusaha, Tanda Daftar Kapal Perikanan, dan Perizinan Usaha Berbasis Resiko.	Taat	Perlu dilakukan sosialisasi dan pengawasan tentang pentingnya tidak membuang limbah bahan bakar dan limbah rumah tangga di sekitar kolam bandar pelabuhan dan di perairan / laut

					Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di Lokasi Usaha Penangkapan Ikan KM. Molagina milik Husein dengan Nakhoda Husein, diperoleh hasil bahwa pada lokasi/lingkungan usaha/kegiatan tidak ada pencemaran			
23	Ridol, Tanimbar Utara Kep. Tanimbar Lin. 0070 09°07'S Buj. 1310 42'49"E	PT Duta Maluku Perkasa (Tantriady Setiawan)	Nomor Induk Berusaha : 1502230004146	Tidak Ada	Dari hasil pengawasan yang dilakukan di PT Duta Maluku Perkasa ditemukan beberapa hal sebagai berikut : 1. Tidak tersedianya IPAL 2. Tidak ditemukan indikasi pencemaran	Tidak Taat	Rekomendasi yang diajukan adalah segera melengkapi dokumen perijinan yang belum lengkap dan membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah	
24	Desa Namtabung Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku	Usaha Pembudidayaan Ikan PT Rajawali Laut Timur	Nomor Induk Berusaha : 9120200161673		berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di Lokasi Usaha Pembudidayaan Ikan PT Rajawali Laut Timur di Namtabung, diperoleh hasil bahwa pada lokasi/lingkungan usaha/kegiatan tidak ada pencemaran	Taat		
25	PT Rashid Lintas Bahari, Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku	Usaha Pengolahan Ikan PT Rashid Lintas Bahari.	Nomor Identitas : 0811220006895	Ada	Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di Lokasi Usaha Pengolahan Ikan PT Rashid Lintas Bahari milik Ahmat Robin, diperoleh hasil bahwa usaha/kegiatan sesuai dalam pelaksanaan kegiatan dengan persyaratan, kewajiban dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam /Perizinan lainnya yaitu: Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Cara Pengolahan Ikan yang Baik	Taat		

26	PT. Amest Samudra Jaya dengan armada kapal KMN. Victory V, dengan titik koordinat : Lat - 8.470443°, Long 140.395336°	PT. Amest Samudra Jaya (KMN. Victory V)	Nomor Induk Berusaha: 0220103122493 SIUP : 04170103509016	Tidak Ada IPAL (kapal ikan)	Tidak adanya sumber pencemaran yang signifikan, karena limbah dari kapal tidak dibuang ke laut.	Taat		Agar kedepannya pelaku usaha dapat mengolah / mendaur ulang limbah dari kapal perikanan
27	Pelabuhan Tangkahan Gudang Arang Kab. Merauke milik PT. Aru Jaya / Benny Tandra pada KMN. ARU JAYA XVII, dengan kordinat 8° 28'.11" S - 140° 23'.43" E	PT. Aru Jaya (KMN. ARU JAYA XVII)	Nomor Induk Berusaha : 1509210001508 Siup : 02160103598029	Tidak Ada IPAL (kapal ikan)	Secara umum belum ada dampak dari pencemaran karena penanganan limbah telah dilakukan dengan baik	Taat		Perlu dilakukan sosialisasi dan pengawasan tentang pentingnya tidak membuang limbah bahan bakar dan limbah rumah tangga di sekitar kolam bandar pelabuhan dan di perairan / laut
28	Pelabuhan Tangkahan Sidomulyo Kab. Merauke milik Saenal, dengan kordinat 8° 27'.19" S - 140° 24'.58" E	Sajudin / Perorangan (KMN. Bantimurung XI)	Nomor Induk Berusaha : 2308220068901	Tidak Ada IPAL (kapal ikan)	Tidak adanya sumber pencemaran yang signifikan, karena limbah dari kapal tidak dibuang ke laut.	Taat		Agar kedepannya pelaku usaha dapat mengolah / mendaur ulang limbah dari kapal perikanan
29	Pelabuhan Tangkahan Gudang Arang Kab. Merauke Titik Koordinat : 8° 28'.11" S - 140° 23'.43" E	Pelabuhan Tangkahan Gudang Arang Kab. Merauke (PT. Aru Jaya / Benny Tandra pada KMN. ARU JAYA XX)	Nomor Induk Berusaha : 1509210001508 Siup : 02160103598029	Tidak Ada IPAL (kapal ikan)	1.Dampak dari aktifitas perikanan dan non perikanan di Pelabuhan Tangkahan Sidomulyo Merauke bagi lingkungan dapat kami simpulkan tidak mengalami pencemaran terhadap air laut karena penanganan limbah dari KMN. ARU JAYA XXI sudah dilakukan dengan baik. 2.Berdasarkan hasil pengawasan sumber pencemaran adalah berupa limbah rumah tangga dari masyarakat yang tinggal di sekitar area pelabuhan tangkahan Gudang Arang.	Taat		1.Perlu peninjauan dari berbagai instansi terkait untuk melihat dampak dan pengaruh dari aktifitas pencemaran di Kompleks Pelabuhan Tangkahan Gudang Arang Merauke; Rekomendasi lanjutan untuk dapat melakukan uji sampel kualitas air dengan dilakukan pengujian dengan berbagai metode pada laboratorium yang sudah tersertifikasi.
30	Pelabuhan Tangkahan Gudang Arang Kab. Merauke kordinat 8° 28'.14" S - 140° 23'.42" E	Ricky Hendra / Perorangan (KMN. VICTORY III)	Nomor Induk Berusaha : 0220001840475	Tidak Ada IPAL (kapal ikan)	Tidak adanya sumber pencemaran yang signifikan, karena limbah dari kapal tidak dibuang ke laut.	Taat		Rekomendasi lanjutan untuk dapat melakukan uji sampel kualitas air dengan dilakukan pengujian dengan berbagai metode pada laboratorium yang sudah tersertifikasi

31	Jl. Noari Komplek Pelabuhan Perikanan, Kelurahan Karang Indah, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan kordinat 8° 47'.93" S - 140° 37'.97" E	PT. Perikanan Indonesia (Perindo) Unit Merauke UPI	INomor Induk Berusaha : 8120110232884	Ada	PT. Perikanan Indonesia Unit Merauke telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan OSS Pemerintah Republik Indonesia, Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP); IPAL yang terpasang Sudah ada tetapi belum memiliki Surat Izin Lingkungan dari Dinas terkait	Taat	Perbaikan IPAL yang sudah Terpasang Sesuai dengan Standar Dari Dinas Lingkungan Hidup; Perlu adanya monitoring dan pengawasan rutin yang dilakukan agar para pelaku usaha dapat menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dibidang perikanan.
32	Pelabuhan Tangkahan Sidomulyo Kab. Merauke milik bapak H. Saenal pada KMN. Mekar Sari - 6, dengan kordinat 8° 27'30" S - 140° 25'00" E	KMN. MEKAR SARI - 6	INomor Induk Berusaha : 0709210029584	Tidak Ada IPAL (kapal ikan)	1.Dampak dari aktifitas perikanan dan non perikanan di Pelabuhan Tangkahan Sidomulyo Kab. Merauke milik bapak H. Saenal bagi lingkungan dapat kami simpulkan tidak mengalami pencemaran terhadap air laut karena penanganan limbah dari KMN. MEKAR SARI - 6 sudah dilakukan dengan baik.  2.Berdasarkan hasil pengawasan sumber pencemaran adalah berupa limbah rumah tangga dari masyarakat yang tinggal di sekitar area Pelabuhan Tangkahan Sidomulyo Kab. Merauke milik bapak H. Saenal.	Taat	Rekomendasi lanjutan untuk dapat melakukan uji sampel kualitas air dengan dilakukan pengujian dengan berbagai metode pada laboratorium yang sudah tersertifikasi.
33	Pelabuhan Tangkahan Gudang Arang Kab. Merauke milik PT. Aru Jaya / Benny Tandra pada KMN. ARU JAYA XX, dengan kordinat 8° 28'.11" S - 140° 23'.43"	Benny Tandra / Perorangan (KMN. Aru Jaya XX)	INomor Induk Berusaha : 1509210001508 SIup : 02160103598029	Tidak Ada IPAL (kapal ikan)	1.Dampak dari aktifitas perikanan dan non perikanan di Pelabuhan Tangkahan Gudang Arang Kab. Merauke milik PT. Aru Jaya / Benny Tandra bagi lingkungan dapat kami simpulkan tidak mengalami pencemaran terhadap air laut karena penanganan limbah dari KMN. ARU JAYA XX sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan Berita Acara Pengawasan nomor B.74/PSDKPLan.6-MRK/PW.210/VIII/2023, tanggal 24 Agustus 2023;	Taat	1.Perlu peninjauan dari berbagai instansi terkait untuk melihat ada atau tidaknya dampak dan pengaruh dari aktifitas kegiatan perikanan dan non perikanan di sekitar Pelabuhan Tangkahan Gudang Arang Kab. Merauke milik PT. Aru Jaya / Benny Tandra terhadap pencemaran perairan;  2.Rekomendasi lanjutan untuk dapat melakukan uji sampel kualitas air dengan dilakukan pengujian dengan berbagai metode pada laboratorium yang sudah tersertifikasi.

					2. Berdasarkan hasil pengawasan sumber pencemaran adalah berupa limbah rumah tangga dari masyarakat yang tinggal di sekitar area Pelabuhan Tangkahan Gudang Arang Kab. Merauke milik PT. Aru Jaya / Benny Tandra.			
34	Jl. Noari Komplek Pelabuhan Perikanan, Kelurahan Karang Indah, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan titik koordinat : 8 ° 28' . 46" LS - 140° 22' 47" BT	PT. Mitra Timur Rayatama	INomor Induk Berusaha : 9120310131255	Ada	1. Kegiatan pengawasan dilaksanakan di usaha pengolahan ikan PT. Mitra Timur Rayatama terletak di Jl. Noari, Kompleks Pelabuhan Perikanan Nusatara, Kel. Karang indah, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan; 2. PT. Mitra Timur Rayatama telah memiliki NIB, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Surat Ijin Lingkungan, dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diterbitkan OSS Pemerintah Republik Indonesia, Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan HACCP masih dalam proses perpanjangan; 3. IPAL pada UPI sudah ada.	Taat		Tetap menerapkan GMP dan SSOP di UPI dengan baik
35	Jl. Menara Lampu Satu, Kelurahan Samkai, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan titik koordinat : 8 ° 50' . 38" LS - 140° 37' 43" BT	UD. Nelayan Barokah	INomor Induk Berusaha : 0267010102703	Ada	1. Kegiatan pengawasan dilaksanakan di usaha pengolahan ikan UD. Nelayan Barokah terletak di Jl. Menara Lampu Satu, Kelurahan Samkai, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan; 2. UD. Nelayan Barokah telah memiliki NIB, Surat Ijin Usaha dan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) namun belum memiliki Surat Ijin Lingkungan serta Surat Pernyataan Kesanggupan	Taat		Tetap menerapkan GMP dan SSOP di UPI dengan baik

					Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL); 3.IPAL pada UPI sudah ada.			
36	Pelabuhan Tangkahan Sidomulyo Kab. Merauke	KMN. LEONORA 02	Nomor Induk Berusaha : 1412210053556	Tidak Ada IPAL (kapal ikan)	Dampak dari aktifitas perikanan dan non perikanan di Pelabuhan Tangkahan Sidomulyo Kab. Merauke milik H. Saenal bagi lingkungan dapat kami simpulkan tidak mengalami pencemaran terhadap air laut karena penanganan limbah dari KMN. LEONORA 02 sudah dilakukan dengan baik	Taat		Perlu peninjauan dari berbagai instansi terkait untuk melihat ada atau tidaknya dampak dan pengaruh dari aktifitas kegiatan perikanan dan non perikanan di sekitar Pelabuhan Tangkahan Sidomulyo Kab. Merauke milik H. Saenal terhadap pencemaran perairan
37	Pelabuhan Tangkahan Gudang Arang Kab. Merauke	PT. Aru Jaya / Benny Tandra pada KMN. RAMA 99	omor Induk Berusaha : 1509210001508	Tidak Ada IPAL (kapal ikan)	ampak dari aktifitas perikanan dan non perikanan di Pelabuhan Tangkahan Gudang Arang Kab. Merauke milik PT. Aru Jaya / Benny Tandra bagi lingkungan dapat kami simpulkan tidak mengalami pencemaran terhadap air laut karena penanganan limbah dari KMN. RAMA 99 sudah dilakukan dengan baik	Taat		Perlu peninjauan dari berbagai instansi terkait untuk melihat ada atau tidaknya dampak dan pengaruh dari aktifitas kegiatan perikanan dan non perikanan di sekitar Pelabuhan Tangkahan Gudang Arang Kab. Merauke milik PT. Aru Jaya / Benny Tandra terhadap pencemaran perairan
38	Km. Cahaya Papua di area dermaga PPI Pomako, Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika Provinsi Papua	Km. Cahaya Papua ( Kapal Perikanan) Nur Cholis	Nomor SIUP : 04.16.01.0032.7718 Nomor SIPI : 33.23.0001.104.01084	Tidak Ada IPAL (kapal ikan)	1. Berdasarkan hasil pengawasan sumber pencemaran adalah berupa limbah cair dan sampah domestik (di Km. Cahaya Papua) terkontrol dengan baik, dan tidak di temukan tindakan membuang sampah sembarangan  2. Dampak dari aktifitas perikanan dan non perikanan di Km. Cahaya Papua bagi lingkungan dapat kami simpulkan tidak menyebabkan penurunan kualitas air dan hasilnya masih berada kisaran normal baku mutu air laut sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu air Laut untuk biota	Taat		1. Perlu peninjauan dari berbagai instansi terkait untuk melihat dampak dan pengaruh dari aktifitas kapal-kapal di dermaga pelabuhan pendaratan ikan poumako. 2. Rekomendasi lanjutan untuk dapat menunjukan data yang akurat dan parameter yang lebih lengkap sampel kualitas air agar dilakukan pengujian dengan berbagai metode pada laboratorium yang sudah tersertifikasi.

					perairan			
39	Km. Anugerah di area dermaga PPI Pomako, Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika Provinsi Papua	Km. Anugerah (kapal Penangkap) Riyadi	Nomor SIUP : 02.16.01.0032.7826 Nomor SIPI : 33.23.0001.104.01934	Tidak Ada IPAL (kapal ikan)	Mengganggu kelestarian sumber daya biota yang berada di sekitar pelabuhan pendaratan ikan poumako. (spawning, feeding ground) jika dibiarkan dapat memutuskan rantai makanan akibat degradasi lingkungan	Taat		Rekomendasi lanjutan untuk dapat melakukan uji sampel kualitas air dengan dilakukan pengujian dengan berbagai metode pada laboratorium yang sudah tersertifikasi membuang sampah sembarangan
40	Dermaga PPI Pomako, Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika Provinsi Papua.	Km. Asia Popeye 08 (Wahyudi)	Nomor SIUP : 02.16.01.0032.7757 Nomor SIPI : 33.22.0001.104.61486	Tidak Ada IPAL (kapal ikan)	Mengganggu kelestarian sumber daya biota yang berada di sekitar pelabuhan pendaratan ikan poumako. (spawning, feeding ground) jika dibiarkan dapat memutuskan rantai makanan akibat degradasi lingkungan	Taat		Menuangkan hasil pengawasan dalam berita acara pengawasan pencemaran dan memberikan sosialisasi/ pembinaan kepada masyarakat sekitar dermaga untuk tidak membuang sampah sembarangan
41	Pelabuhan PPI Poumako, Kecamatan Mimika Timur Koordinat: 136.7717230B T -- 4.7975690LS	SURYANA (KM. YESINDO A)	Nomor Induk Berusaha : 0223010201768	Tidak ada IPAL (karena pengawasannya di lakukan pada Kapal Perikanan	Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di Poumako - Mimika kepada KM. YESINDO A, diperoleh hasil bahwa pada lokasi/lingkungan usaha/kegiatan tidak ada pencemaran yakni: Tidak ditemukan aktivitas yang dapat menimbulkan terjadinya indikasi pencemaran perairan	Taat		Perlu adanya pelaksanaan Pengawasan rutin Sehingga dapat mencegah terjadinya resiko pembuangan limbah Rumah Tangga/masyarakat maupun limbah yang disebabkan oleh kapal
42	pelabuhan perikanan PPI. Poumako Koordinat: 136.7717230B T -- 4.7975690LS	KM. YESINDO A (SURYANA	Nomor Induk Berusaha : 0223010201768	Tidak Ada IPAL (kapal ikan)	Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di Poumako - Mimika kepada KM. YESINDO A, diperoleh hasil bahwa usaha/kegiatan sesuai dalam pelaksanaan kegiatan dengan persyaratan, kewajiban dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam Memiliki alat pendukung dalam mencegah terjadinya	Taat		Perlu adanya pelaksanaan Pengawasan rutin Sehingga dapat mencegah terjadinya resiko pembuangan limbah Rumah Tangga/masyarakat maupun limbah yang disebabkan oleh kapal

					pencemaran di laut berupa : Penyediaan Kantong plasrik dan tong sampah untuk penyimpanan sampah dan, memiliki tepat untuk penampungan oli bekas hasil penggantian kembali oli mesin induk dan mesin pendingin freeser			
43	Pelabuhan PPI Poumako, Kecamatan Mimika Timur Koordinat: 136.7717230B T - - 4.7975690LS	KM. Bandar Nelayan IIA milik Dua Sekawan Sempurna Mandiri. PT	Nomor Induk Berusaha : 8120107870498	Tidak Ada IPAL (kapal ikan)	Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di Poumako - Mimika kepada KM. Bandar Nelayan IIA, diperoleh hasil bahwa usaha/kegiatan sesuai dalam pelaksanaan kegiatan dengan persyaratan, kewajiban dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam Memiliki alat pendukung dalam mencegah terjadinya pencemaran di laut berupa : Penyediaan Kantong plasrik dan tong sampah untuk penyimpanan sampah dan, memiliki tepat untuk penampungan oli bekas hasil penggantian kembali oli mesin induk dan mesin pendingin freeser	Taat		Perlu adanya pelaksanaan Pengawasan rutin Sehingga dapat mencegah terjadinya resiko pembuangan limbah Rumah Tangga/masyarakat maupun limbah yang disebabkan oleh kapal
44	Mimika Timur - Poumako, Pelabuhan Perikanan Poumako Koordinat: 136.7717230B T - - 4.7975690LS	KM. Hampan Segera Niaga 8	Nomor Induk Berusaha : 8120018011561	Tidak Ada IPAL (kapal ikan)	tidak ditemukan Dugaan Pencemaran Tidak ditemukan adanya dugaan pencemaran karena, pada KM. Hampan Segera Niaga 8 telah menjalankan prosedur penanganan limbah kapal dengan baik dan benar.	Taat		Perlu adanya pelaksanaan Pengawasan rutin Sehingga dapat mencegah terjadinya resiko pembuangan limbah Rumah Tangga/masyarakat maupun limbah yang disebabkan oleh kapal

45	Pelabuhan PPI Poumako, Kecamatan Mimika Timur Koordinat: 136.7717230B T - - 4.7975690LS	KM. Permata Jati (IR. Budi Sulistyio)	Nomor Induk Berusaha : 9120001500173	Tidak Ada IPAL (kapal ikan)	Tidak ditemukan adanya dugaan pencemaran karena, pada KM. Permata Jati telah menjalankan prosedur penanganan limbah kapal dengan baik dan benar	Taat	Perlu adanya pelaksanaan Pengawasan rutin Sehingga dapat mencegah terjadinya resiko pembuangan limbah Rumah Tangga/masyarakat maupun limbah yang disebabkan oleh kapal
46	Pelabuhan PPI Poumako, Kecamatan Mimika Timur Koordinat: 136.7717230B T - - 4.7975690LS	KM. Tiara Kencana ( Rosida)	Nomor Induk Berusaha : 8120008882413	Tidak Ada IPAL (kapal ikan)	Tidak ditemukan adanya dugaan pencemaran karena, pada KM. Permata Jati telah menjalankan prosedur penanganan limbah kapal dengan baik dan benar	Taat	Perlu adanya pelaksanaan Pengawasan rutin Sehingga dapat mencegah terjadinya resiko pembuangan limbah Rumah Tangga/masyarakat maupun limbah yang disebabkan oleh kapal
47	Mimika Timur - Poumako, Pelabuhan Perikanan Poumako Koordinat: 136.7717230B T - - 4.7975690LS	KM. Handayani Jaya	Nomor Identitas : 1224000330447	Tidak Ada IPAL (kapal ikan)	Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di Poumako - Mimika kepada KM. Handayani Jaya, diperoleh hasil bahwa usaha/kegiatan sesuai dalam pelaksanaan kegiatan dengan persyaratan, kewajiban dan ketentuan lainnya yang tercantum yaitu:Memiliki alat pendukung dalam mencegah terjadinya pencemaran di laut berupa : Penyediaan Kantong plastik dan tong sampah untuk penyimpanan sampah dan, memiliki tempat untuk penampungan oli bekas hasil penggantian kembali oli mesin induk dan mesin pendingin freeser	Taat	Perlu adanya pelaksanaan Pengawasan rutin Sehingga dapat mencegah terjadinya resiko pembuangan limbah Rumah Tangga/masyarakat maupun limbah yang disebabkan oleh kapal
48	Mimika Timur - Poumako, Pelabuhan Perikanan Poumako	KM. Surya Wijaya y	Nomor Induk Berusaha : 8120206860396	Tidak Ada IPAL (kapal ikan)	Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan di Poumako - Mimika kepada KM. Surya Wijaya, diperoleh hasil bahwa usaha/kegiatan sesuai dalam pelaksanaan kegiatan dengan persyaratan, kewajiban dan ketentuan lainnya	Taat	Perlu adanya pelaksanaan Pengawasan rutin Sehingga dapat mencegah terjadinya resiko pembuangan limbah Rumah Tangga/masyarakat maupun limbah yang disebabkan oleh kapal

					yang tercantum dalam (PKKPRL/KKPRL/AMDAL/UKLUP/SP PL/Perizinan lainnya)* yaitu:Memiliki alat pendukung dalam mencegah terjadinya pencemaran di laut berupa : Penyediaan Kantong plastik dan tong sampah untuk penyimpanan sampah dan, memiliki tepat untuk penampungan oli bekas hasil penggantian kembali oli mesin induk dan mesin pendingin freeser		
49	PT. Raja 4 Divers, Pulau Pef Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat	PT. Raja 4 Divers,	-	Tidak Ada	1.Kondisi perairan di sekitar. PT. Raja 4 Divers masih terjaga dengan baik. 2. Pelaku usaha PT. Raja 4 Divers sadar dan mendukung akan pentingnya menjaga kondisi perairan guna keberlanjutan sumberdaya alam yang ada..	Tidak Taat	1. Perlunya penambahan sarana pengawasan berupa peralatan lab mini guna mengukur kadar limbah atau kondisi perairan yang menjadi objek pengawasan. 2. Perlunya sosialisasi kepada para pelaku usaha maupun masyarakat secara umum tentang aturan beserta dampak hukumnya.
50	PT. Waruna Indah Pulau Yeben Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat	Cove Eko Resort	NIB : 8120104971609	Tidak Ada	1. Kondisi perairan di sekitar. Cove Eko Resort masih terjaga dengan baik. 2. Pelaku usaha PT. Waruna Indah Nusantara sadar dan mendukung akan pentingnya menjaga kondisi perairan guna keberlanjutan sumberdaya alam yang ada	Tidak Taat	1. Perlunya penambahan sarana pengawasan berupa peralatan lab mini guna mengukur kadar limbah atau kondisi perairan yang menjadi objek pengawasan. 2. Perlunya sosialisasi kepada para pelaku usaha maupun masyarakat secara umum tentang aturan beserta dampak hukumnya.
51	pualau Agusta kampung Sawandarek distrik Meosmansar Kabupaten Raja Ampat	PT. Agusta	NIB: 9120305312194	Ada	1. Kondisi perairan di sekitar Agusta Eco Resort masih terjaga dengan baik. 2. Pelaku usaha PT. Agusta sadar dan mendukung akan pentingnya menjaga kondisi perairan guna keberlanjutan sumberdaya alam yang ada.	Taat	1. Perlunya penambahan sarana pengawasan berupa peralatan lab mini guna mengukur kadar limbah atau kondisi perairan yang menjadi objek pengawasan. 2. Perlunya sosialisasi kepada para pelaku usaha maupun masyarakat secara umum tentang aturan beserta dampak hukumnya.

52	Pulau Gam Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat	PT. Raja Ampat Biodiversity (Raja Ampat Biodiversity Nature Resort)	NIB : 920202779097 Sertifikat standar : 912020277900970001	Ada	1. Kondisi perairan di sekitar Raja Ampat Biodiversity Nature Resort masih terjaga dengan baik. 2. Pelaku usaha PT. Raja Ampat Biodiversity sadar dan mendukung akan pentingnya menjaga kondisi perairan guna keberlanjutan sumberdaya alam yang ada	Taat		1. Perlunya penambahan sarana pengawasan berupa peralatan lab mini guna mengukur kadar limbah atau kondisi perairan yang menjadi objek pengawasan. 2. Perlunya sosialisasi kepada para pelaku usaha maupun masyarakat secara umum tentang aturan beserta dampak hukumnya
53	Kampung Selpele Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat	PT. Cendana Indopearls	NIB : 8120101931048	Ada	Kondisi perairan di sekitar. PT. Cendana Indopearls masih terjaga dengan baik. 2. Pelaku usaha PT. Cendana Indopearls sadar dan mendukung akan pentingnya menjaga kondisi perairan guna keberlanjutan sumberdaya alam yang ada	Taat		1. Kondisi perairan di sekitar. PT. Cendana Indopearls masih terjaga dengan baik. 2. Pelaku usaha PT. Cendana Indopearls sadar dan mendukung akan pentingnya menjaga kondisi perairan guna keberlanjutan sumberdaya alam yang ada
54	Pulau Gam Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat	PT. Ocean Explorers	NIB : 8120101911203	Ada	1. Kondisi perairan di sekitar. Resort Papua Explorers masih terjaga dengan baik. 2. Pelaku usaha PT. Ocean Explorers sadar dan mendukung akan pentingnya menjaga kondisi perairan guna keberlanjutan sumberdaya alam yang ada..	Taat		1. Perlunya penambahan sarana pengawasan berupa peralatan lab mini guna mengukur kadar limbah atau kondisi perairan yang menjadi objek pengawasan. 2. Perlunya sosialisasi kepada para pelaku usaha maupun masyarakat secara umum tentang aturan beserta dampak hukumnya.
55	Pulau Birie, Kampung Arefi Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat	Papua Paradise PT. Seahorse Paradise (PMA)	NIB :9120300371036	Ada	Limbah yang dihasilkan oleh resort ini bersumber dari operasional resort sehari-hari. Limbah ini berupa limbah padat seperti sisa makanan, bahan bangunan, sedangkan limbah cair yaitu limbah dari MCK. Untuk limbah padat penanganannya dilakukan dengan cara di buang ke TPA dan selanjutnya dibakar. Sedangkan untuk limbah cair yang dihasilkan dialirkan ke tangki penampungan sementara untuk mengendapkan atau memisahkan limbah antara limbah padat dan cair dan kemudian dialirkan ke tangki penampungan akhir	Taat		1. Perlunya penambahan sarana pengawasan berupa peralatan lab mini guna mengukur kadar limbah atau kondisi perairan yang menjadi objek pengawasan. 2. Perlunya sosialisasi kepada para pelaku usaha maupun masyarakat secara umum tentang aturan beserta dampak hukumnya.

					yang. Semua limbah yang dihasilkan ditangani dengan baik dan dikelola sesuai dengan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Dari hasil pemeriksaan tidak ada limbah yang dibuang ke laut atau perairan sekitarnya. Kondisi perairan disekitar lokasi Papua Explorers masih terlihat baik			
56	Pulau Tamagui, Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat	Home Stay dengan nama Helda Homestay	-	Tidak Ada	1. Terpantainya kondisi lingkungan perairan di sekitar Helda Homestay di Pulau Tamagui, Kabupaten Raja Ampat. 2. Terawasinya kegiatan di Pulau Tamagui dari kegiatan yang mencemari lingkungan dan tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;	Taat	Tidak Taat	Outcome yang diharapkan dari kegiatan pengawasan pencemaran perairan di bulan Agustus Tahun 2023 ini adalah terlindunginya sumber daya kelautan dan perikanan dari kegiatan pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan perikanan dan non perikanan
57	Kabuy Kec, Meos Mansar, Kepulauan Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya	PT. Kabui Mutiara Sejahtera	NIB 0306230124774	Ada	1. Kondisi perairan di sekitar. PT. Kabui Mutiara Sejahteramasih terjaga dengan baik. 2. Pelaku usaha PT. Kabui Mutiara Sejahtera sadar dan mendukung akan pentingnya menjaga kondisi perairan guna keberlanjutan sumberdaya alam yang ada	Taat		1. Perlunya penambahan sarana pengawasan berupa peralatan lab mini guna mengukur kadar limbah atau kondisi perairan yang menjadi objek pengawasan. 2. Perlunya sosialisasi kepada para pelaku usaha maupun masyarakat secara umum tentang aturan beserta dampak hukumnya.
58	Kampung Rutum Distrik Kepulauan Ayau, Kepulauan Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya	CV. Putra Raja Bahari	Nomor Induk Berusaha dengan nomor 1308230047815	Ada	Dari hasil pelaksanaan kegiatan ini dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Kondisi perairan di sekitar. CV. Putra Raja Bahari masih terjaga dengan baik. 2. Pelaku usaha CV. Putra Raja Bahari sadar dan mendukungakan pentingnya menjaga kondisi perairan guna keberlanjutan sumberdaya alam yang ada	Taat		1. Perlunya penambahan sarana pengawasan berupa peralatan lab mini guna mengukur kadar limbah atau kondisi perairan yang menjadi objek pengawasan. 2. Perlunya sosialisasi kepada para pelaku usaha maupun masyarakat secara umum tentang aturan beserta dampak hukumnya.

59	Pulau Urai Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat	Katembe Private Island			1. Kondisi perairan di sekitar. Resort Katembe Private Island masih terjaga dengan baik. 2. Pelaku usaha Katembe Private Island sadar dan mendukung penting menjaga kondisi perairan guna keberlanjutan sumberdaya alam yang ada.	Tidak Taati	Perlunya sosialisasi kepada para pelaku usaha maupun masyarakat secara umum tentang aturan beserta dampak hukumnya.
60	Jl. Yos Sudarso Kelurahan Dulan Pokpok Kecamatan Pariwari Kabupaten FakFak Titik Koordinat : - 2.93203252093 3003 - 132.293232344 09097	PT. Mulia Perikanan Indonesia (UPI)	NIB : 9120210040477	Tidak Ada	Menurunnya tingkat kecerahan perairan disekitarnya.	Tidak Taati	Segera membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah

### a.2. Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan Kawasan konservasi perairan dilaksanakan di wilayah konservasi

Pelaksanaan kegiatan pengawasan pelaku usaha pemanfaatan Kawasan konservasi perairan dilaksanakan di wilayah konservasi yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang dikategorikan dalam Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN). Kawasan konservasi yang dikelola di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual berjumlah 3 kawasan. Kawasan tersebut ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dalam menunjang capaian ini adalah pengawasan pemanfaatan pelaku usaha pada kawasan konservasi serta kesesuaian lokasi usaha dengan zonasi yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri tersebut.

Kawasan konservasi perairan yang dikelola oleh Pangkalan PSDKP Tual tercantum dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 11 Kawasan konservasi Perairan Nasional (KKPN) yang dikelola lingkup Pangkalan PSDKP Tual

No.	Nama Kawasan	Lokasi	Dasar Hukum
1.	SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat	Sorong, Papua Barat	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.65/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat
2.	SAP Raja Ampat	Raja Ampat, Papua Barat	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.64/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan

			Nasional Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat
3.	SAP Aru Bagian Tenggara	Kepulauan Aru, Maluku	Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.63/Men/2009 Tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Aru Bagian Tenggara Dan Laut Di Sekitarnya Di Provinsi Maluku

Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan pengawasan pelaku usaha pada Kawasan konservasi perairan Nasional (KKPN). Pelaksanaan pengawasan Kawasan konservasi dilaksanakan pada Kawasan Konservasi Perairan Nasional SAP Raja Ampat yang dilaksanakan oleh Wilker PSDKP Raja Ampat serta pengawasan Kawasan konservasi perairan nasional SAP Aru Bagian Tenggara yang dilaksanakan oleh Wilker PSDKP Dobo, Kepulauan Aru. Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan pada Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kei Kecil dalam rangka mendukung peningkatan kegiatan pengawasan Kawasan konservasi daerah.

Kegiatan pendukung utama pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Tual meliputi : Pengawasan ekosistem mangrove dan terumbu karang, serta Pengawasan Pengelolaan Kawasan Konservasi. Pada Tahun 2023 dari 9 target Pangkalan PSDKP Tual telah memeriksa 46 pelaku usaha.

Tabel 3. 12 Data Pengawasan KKPN

NO	PELAKU USAHA	JENIS KEGIATAN	DOKUMEN PERIZINAN	MASA BERLAKU	HASIL PENGAWASAN	PELANGGARAN	REKOMENDASI
1.	Kolaka Jaya (13 GT) (KAMARUDDIN)	Berlindung dari cuaca buruk	-	-	1. Kegiatan yang terpantau didalam kawasan konservasi didominasi oleh nelayan yang sedang berlindung maupun yang sedang beristirahat didalam kawasan konservasi perairan SAP Aru Bagian Tenggara. 2. Masih adanya kapal-kapal perikanan di dalam zona kawasan konservasi perairan yang tidak memiliki izin. 3. Tidak ditemukan Kegiatan yang merusak dalam kawasan konservasi perairan nasional SAP Aru bagian tenggara selama pengawasan.	Tidak memiliki dokumen perijinan	Pembinaan/Penyitaan dokumen Kapal dan mengarahkan kapal Kembali ke dobo untuk melengkapi dokumen Perikanan

2	KM Mekar Lestari (99 GT)	Kapal Melintas dalam Kawasan Konservasi	SIPI : 33.22.0001.120.5 9593 SIKPI : 38.22.0001.123.5 3650	SIPI : 22 September 2023 SIKPI: 23 Juni 2023	-	Kapal diarahkan Keluar dari Kawasan konservasi dan tidak melakukan kegiatan apapun didalam KKPN
3	KM Ratu Permata (9 GT)	Berlindung dari cuaca buruk	-	-	Tidak memiliki dokumen perijinan	Sosialisasi untuk mengurus SLO dan SPB ketika akan melakukan aktifitas pelayaran dan kegiatan perikanan
4	KM. Mangar Kabal Tobar Fanugu	Berlindung dari cuaca buruk	-	-		Sosialisasi Kawasan konservasi
5	KM. Senyum CUek (10 GT)	Berlindung dari cuaca buruk	-	-		Sosialisasi untuk mengurus SLO dan SPB ketika akan melakukan aktifitas pelayaran dan kegiatan perikanan.
6	Jitro Rahayaan	Melakukan Aktifitas Penangkapan ikan dengan Menggunakan kapal ukuran ≤5 dengan alat pancing Handline	Tidak Ada			Tidak/belum memiliki Bukti Pendaftaran Kapal Perikanan (BPKP) dan Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan (TDKPI)  Tindak lanjut dari hasil pemeriksian terhadap diatas adalah terhadap kapal/nelayan yang tidak/belum memiliki Bukti Pendaftaran Kapal Perikanan (BPKP) dan Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan (TDKPI) didalam kawasan konservasi dilakukan pembinaan berupa teguran dan penghalauan dari dalam kawasan konservasi dan pemanggilan pemilik kapal agar didampingi dalam pengurusan dokumen yang belum ada. Terhadap kapal/nelayan yang melanggar ketentuan zonasi didalam kawasan konservasi dilakukan pembinaan berupa teguran dan sosialisasi ketentuan zonasi didalam kawasan konservasi serta penghaluan dari zona yang dilarang
7	Endy	Melakukan Aktifitas Penangkapan ikan dengan Menggunakan kapal ukuran ≤5 dengan alat pancing Handline	Tidak Ada			Tidak/belum memiliki Bukti Pendaftaran Kapal Perikanan (BPKP) dan Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan (TDKPI)

8	Absalom	Melakukan Aktifitas Penangkapan ikan dengan Menggunakan kapal ukuran ≤5 dengan alat pancing Handline	Tidak Ada			Tidak/belum memiliki Bukti Pendaftaran Kapal Perikanan (BPKP) dan Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan (TDKPI)	
9	Lambert Mambrasar	Melakukan Aktifitas Penangkapan ikan dengan Menggunakan kapal ukuran ≤5 dengan alat pancing Handline	Tidak Ada			Tidak/belum memiliki Bukti Pendaftaran Kapal Perikanan (BPKP) dan Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan (TDKPI)	
10	Serki Dimara	Melakukan Aktifitas Penangkapan ikan dengan Menggunakan kapal ukuran ≤5 dengan alat pancing Handline	Tidak Ada			Tidak/belum memiliki Bukti Pendaftaran Kapal Perikanan (BPKP) dan Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan (TDKPI)	
11	Naftali	Melakukan Aktifitas Penangkapan ikan dengan Menggunakan kapal ukuran ≤5 dengan alat pancing Handline	Tidak Ada			Tidak/belum memiliki Bukti Pendaftaran Kapal Perikanan (BPKP) dan Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan (TDKPI)	
12	Raja 4 Divers	Snorkling Diving	Tidak Ada			belum memiliki tanda daftar usaha pariwisata didalam kawasan konservasi (TDKP)	berdasarkan laporan yang diterima dari pihak pengelola kawasan belum pernah membayar karcis masuk kawasan. Penanggung jawab resort yang ditemui diarahkan untuk segera melengkapi tanda daftar sesuai ketentuan yang ada
13	Cove Eco Resort	Snorkling Diving	Tidak Ada			belum memiliki tanda daftar usaha pariwisata didalam kawasan konservasi (TDKP)	

14	Kapal MV. Indian Partnership (GT : 95.00)	berlabuh jangkar di sekitar kawasan konservasi Area IV perairan Misool.	IMO/MMSI : 9521409/235110641 LOA : 292 meter Jenis : Bulk Carrier (tidak ada dokumen perijinan masuk wilayah konservasi)	-	Nama Kapal : MV. Indian Partnership Bendera : United Kingdom GT : 95.009 IMO/MMSI : 9521409/235110641 LOA : 292 meter Jenis : Bulk Carrier Pelabuhan Asal : Australia Pelabuhan Tujuan : China Nahkoda : Manish Kumar Muatan : Bauksit Draft Kapal : 20 Meter Agen Kapal : PT. Pelayaran Bahtera Diserindo Call center +62 778 7490 805 HP. +62 813 1754 5251 Email.operation@diserindo.co.id/ diserindo.agency@gmail.com Website.www.diserindo.co.id	1. Kapal MV. Indian Partnership telah melintas didalam kawasan konservasi tanpa mematuhi ketentuan yang ada dibidang kelautan dan perikanan. 2. MV. Indian Partnership diduga menabrak koloni terumbu karang didalam kawasan konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat Area IV Perairan Kepulauan Misool.	1. Perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap titik lokasi yang diduga terjadi kerusakan terumbu karang. 2. Perlunya koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait dalam pengurusan perizinan kegiatan usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan oleh masyarakat local. 3. Sarana dan prasarana pengawasan perlu ditingkatkan agar pengawasan yang ada dapat berhasil dengan baik.
15	Kapal MV. Indian Partnership (GT : 95.00)	berlabuh jangkar di sekitar kawasan konservasi Area IV perairan Misool.	IMO/MMSI : 9521409/235110641 LOA : 292 meter Jenis : Bulk Carrier (tidak ada dokumen perijinan masuk wilayah konservasi)	-	Pada pencarian tanggal 10 Mei 2023 ditemukan titik lokasi kerusakan terumbu karang yang disebabkan oleh MV. Indian Partnership pada titik koordinat - 2,049936; 130,803939. Koordinat tersebut merupakan jalur tracking MV. Indian Partnership yang diperoleh dari Nahkoda Kapal dan beberapa sumber terpercaya lainnya.  Luasan kerusakan diperkirakan mencapai 500,15 m2 (Panjang 29,9 meter dengan Lebar bervariasi mulai dari 15,3 hingga 19,6 meter) pada kedalaman 14 hingga 17 meter, dengan tingkat kerusakan terumbu karang 100% pada area yang terdampak.	1. Incident kebocoran MV. Indian Partnership diakibatkan menabrak koloni terumbu karang di perairan Misool Selatan. dengan luas kerusakan karang sebesar 500,15 m2. 2. Operator dan pemilik wajib bertanggungjawab atas kerusakan yang ada.	1. Perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap titik yang telah ditemukan. 2. Perlunya koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait dalam tindak lanjut kerusakan terumbu karang yang disebabkan oleh MV. Indian Partnership.
16	A7 Travel	Snorkling Diving	-	-	Kegiatan pengawasan Pengelolaan Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya pada Oktober tahun 2023 adalah ketaatan terhadap ketentuan zonasi sudah lebih baik tetapi masih ditemukan pelanggaran dibidang perizinan berusaha	Tidak memiliki karcis masuk kawasan	1. Perlunya koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait dalam pengurusan perizinan kegiatan usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan oleh masyarakat local. 2. Sarana dan prasarana pengawasan perlu ditingkatkan agar pengawasan yang ada dapat berhasil dengan baik.

17	Jerry	Snorkling Diving	-	-		Tidak memiliki karcis masuk kawasan	
18	Hendrik Maisan	Penangkapan Ikan dengan alat tangkap handline	-	-		Tidak/belum memiliki Bukti Pendaftaran Kapal Perikanan (BPKP) dan Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan (TDKPI)	
19	Yopi Warmasen	Penangkapan Ikan dengan alat tangkap handline	-	-		Tidak/belum memiliki Bukti Pendaftaran Kapal Perikanan (BPKP) dan Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan (TDKPI)	
20	Septinus Tuberwaer	Penangkapan Ikan dengan alat tangkap handline	-	-		Tidak/belum memiliki Bukti Pendaftaran Kapal Perikanan (BPKP) dan Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan (TDKPI)	
21	Jeky Mayor	Penangkapan Ikan dengan alat tangkap handline	-	-		Tidak/belum memiliki Bukti Pendaftaran Kapal Perikanan (BPKP) dan Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan (TDKPI)	
22	Maharudin (5GT)	Penangkapan Ikan dengan alat tangkap handline	-	-	Adapun Kesimpulan dari hasil Kegiatan pengawasan Pengelolaan Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya, dan Kawasan konservasi perairan di Kepulauan Raja Ampat pada Novembertahun 2023 adalah, ketaatan terhadap ketentuan zonasi sudah lebih baik dan disektor pariwisata alam perairan sudah memenuhi ketentuan yang ada, tetapi masih ditemukan pelanggaran dibidang perizinan berusahaterhadap kegiatan pengangkutan ikan	Tidak/belum memiliki Bukti Pendaftaran Kapal Perikanan (BPKP) dan Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan (TDKPI)	1. Perlunya koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait dalam pengurusan perizinan kegiatan usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan oleh masyarakat local. 2. Sarana dan prasarana pengawasan perlu ditingkatkan agar pengawasan yang ada dapat berhasil dengan baik.
23	Du Ngunyen	Snorkling Diving	Pass 210974150 Valid 25/11/2023 - 25/11/2024	Valid 25/11/2023 - 25/11/2024		-	

24	Jill harwood	Snorkling Diving	Pass 525180067 Valid 25/11/2023 - 25/11/2024	Valid 25/11/2023 - 25/11/2024	-		
25	Maria Villaverde	Snorkling Diving	Pass AAJ972701 Valid 25/11/2023 - 25/11/2024	Valid 25/11/2023 - 25/11/2024	-		
26	Bernhard Bauer	Snorkling Diving	Pass JZZTNNYL7 Valid 25/11/2023 - 25/11/2024	Valid 25/11/2023 - 25/11/2024	-		
27	Gabriel Barbosa	Snorkling Diving	Pass FV049000 Valid 25/11/2023 - 25/11/2024	Valid 25/11/2023 - 25/11/2024	-		
28	Amanda Katrin	Snorkling Diving	Pass YA7780920 Valid 25/11/2023 - 25/11/2024	Valid 25/11/2023 - 25/11/2024	-		
29	Michael Regele j	Snorkling Diving	Pass C8NF7W60V Valid 25/11/2023 - 25/11/2024	Valid 25/11/2023 - 25/11/2024	-		
30	Felix bauer	Snorkling Diving	Pass CZZTCXHW6 Valid 25/11/2023 - 25/11/2024	Valid 25/11/2023 - 25/11/2024	-		
31	Daniel Harwood	Snorkling Diving	Pass 120829356 Valid 25/11/2023 - 25/11/2024	Valid 25/11/2023 - 25/11/2024	-		
32	Dagmara	Snorkling Diving	Pass FB 2911474 Valid 25/11/2023 - 25/11/2024	Valid 25/11/2023 - 25/11/2024	-		
33	KM Vella/ Cahaya Selamat 01 (17 GT)	Kapal Pengangkut	-	-	Adapun Kesimpulan dari hasil Kegiatan pengawasan Pengelolaan Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya, dan Kawasan konservasi Kepulauan Raja Ampat pada Desember tahun 2023 adalah, ketaatan terhadap ketentuan zonasi sudah lebih baik dan disektor pariwisata alam perairan sudah memenuhi ketentuan yang ada.	Tidak/belum memiliki Bukti Pendaftaran Kapal Perikanan (BPKP) dan Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan (TDKPI)	1. Perlunya koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait dalam pengurusan perizinan kegiatan usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan oleh masyarakat local. 2. Sarana dan prasarana pengawasan perlu ditingkatkan agar pengawasan yang ada dapat berhasil dengan baik
34	KM Vella/Ni Wayan Putri D	Wisata Tontonan	03702/BKKPN KUPANG - KK KEPULAUAN WAIGIO SEBELAH BARAT/PAR.H/XI I/2023	Berlaku dalam sekali tontonan	-		
35	KM Vella/Mark Tamas Lefler	Wisata Tontonan	03702/BKKPN KUPANG - KK KEPULAUAN WAIGIO SEBELAH BARAT/PAR.H/XI I/2023	Berlaku dalam sekali tontonan	-		
36	KM Vella/Christina May S	Wisata Tontonan	03702/BKKPN KUPANG - KK KEPULAUAN WAIGIO SEBELAH BARAT/PAR.H/XI I/2023	Berlaku dalam sekali tontonan	-		

37	KM Vella/Daniel Peter Hall	Wisata Tontonan	03702/BKKPN KUPANG - KK KEPULAUAN WAIGIO SEBELAH BARAT/PAR.H/XI I/2023	Berlaku dalam sekali tontonan		-	
38	KM Vella/Emile Henry K	Wisata Tontonan	03702/BKKPN KUPANG - KK KEPULAUAN WAIGIO SEBELAH BARAT/PAR.H/XI I/2023	Berlaku dalam sekali tontonan		-	
39	KM Vella/Karin Linnea K	Wisata Tontonan	03702/BKKPN KUPANG - KK KEPULAUAN WAIGIO SEBELAH BARAT/PAR.H/XI I/2023	Berlaku dalam sekali tontonan		-	
40	KM Vella/Rachel Imogen B	Wisata Tontonan	03702/BKKPN KUPANG - KK KEPULAUAN WAIGIO SEBELAH BARAT/PAR.H/XI I/2023	Berlaku dalam sekali tontonan		-	
41	KM Vella/Addrien	Wisata Tontonan	03702/BKKPN KUPANG - KK KEPULAUAN WAIGIO SEBELAH BARAT/PAR.H/XI I/2023	Berlaku dalam sekali tontonan		-	
42	KM Vella/Dimitri, Lie m Tran	Wisata Tontonan	03702/BKKPN KUPANG - KK KEPULAUAN WAIGIO SEBELAH BARAT/PAR.H/XI I/2023	Berlaku dalam sekali tontonan		-	
43	WAISILIP - 01 (6 GT)	Melakukan aktifitas penangkapan dengan menggunakan jaring	-	-	Hasil Kegiatan pengawasan Pengelolaan Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya pada tahun 2023 adalah ketaatan terhadap ketentuan zonasi sudah lebih baik tetapi masih ditemukan pelanggaran dibidang perizinan berusaha	Tidak/belum memiliki Bukti Pendaftaran Kapal Perikanan (BPKP) dan Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan (TDKPI)	1.Perlunya koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait dalam pengurusan perizinan kegiatan usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan oleh masyarakat local. 2.Rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang mendiami wilayah tersebut untuk menjaga Kawasan Konservasi Kepulauan Waigeo sebelah Barat dan Laut Sekitarnya dan Kawasan Konservasi Raja Ampat dan laut sekitarnya agar mereka menjaga alam sekitar tempat tinggal mereka tetap lestari dan bersih. 3.Sarana dan prasarana pengawasan perlu ditingkatkan agar pengawasan yang ada dapat berhasil dengan baik.

44	PUTRI RAISA 01 (6 GT)	Melakukan aktifitas penangkapan dengan menggunakan Jaringan	-	-		Tidak/belum memiliki Bukti Pendaftaran Kapal Perikanan (BPKP) dan Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan (TDKPI)	
45	WAHYU ABADI 02 (6 GT)	Melakukan aktifitas penangkapan dengan menggunakan Jaringan	-	-		Tidak/belum memiliki Bukti Pendaftaran Kapal Perikanan (BPKP) dan Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan (TDKPI)	
46	BAGAN KARAKA 02 (6 GT)	Melakukan aktifitas penangkapan dengan menggunakan Jaringan (Bagan )	-	-		Tidak/belum memiliki Bukti Pendaftaran Kapal Perikanan (BPKP) dan Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan (TDKPI)	

### **a.3 Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya**

Pencapaian kinerja Tahun 2023 diperoleh dari kegiatan Pengawasan terhadap 20 pelaku usaha di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil. Dari sejumlah unit usaha tersebut, masih ada yang belum sesuai ketentuan peraturan perundangan dalam melaksanakan kegiatannya. Terdapat 1 target yang ditetapkan dan telah terpenuhi.

Kegiatan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang laut adalah kegiatan yang tidak berdiri sendiri, dimana PKKPRL adalah perizinan dasar, selama pelaku usaha memanfaatkan ruang laut. pengawasan PKKPRL erat kaitannya dengan pengawasan budidaya dan pengawasan perikanan lainnya sehingga kedudukan perizinan PKKPRL sangat urgent diawasi untuk memastikan kelaikan dokumen lainnya.

Tabel 3. 13 Rekap Pengawasan PRL

NO	LOKASI PENGAWASAN	PELAKU USAHA	SURAT TUGAS	WAKTU PENGAWASAN	KETAATAN		URAIAN	REKOMENDASI
					TAAT	TIDAK TAAT		
1	Ohoi Kolser, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara titik koordinat 5°39'27"S - 132°42'11" E	Nama Perusahaan : Forganza Nama Pelaku Usaha : Petronela Meyke Taliaso Jenis Usaha : Resto dan Cafe No TDUP : 503/042/VIII/TDUP/ 2019 Instansi Penerbit : Dinas P Luas Pemanfaatan : 240m <sup>2</sup>	B.28/PSDKPL an.6/PW.210//2023 tanggal 04 Januari 2023	27 Januari 2023		V	Pemanfaatan Ruang Laut forganza bergerak pada usaha cafe n resto dengan memanfaatkan pemandangan laut yang untuk tempat makan, 1 bangunan darat yang di paergunakan untuk memasak, dan 1 kamar untuk menginap. Namun belum memiliki izin penggunaan ruang laut KPPRL. setelah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan perizinan, bahwa izin KPPRL. pemilik resto n cafe forganza tersebut masih dalam proses pengurusan.	Mengurus NIB, KKPRL, dan Izin Pengelolaan Ruang Laut
2	Lokasi : PT. Samudera Indo Sejahtera yang beralamat di Jl. Dullah Raya KM.8, Desa/Kelurahan Ngadi, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Provinsi Maluku Titik 1. 132°45'06,863" BT 5°34'28,958" LS Titik 2. 132°44'59,260" BT 5°34'20,110" LS Titik 3. 132°45'11,070" BT 5°34'11,190" LS Titik 4. 132°45'17,710" BT 5°34'19,060" LS Titik 5. 132°45'17,837" BT 5°34'19,127" LS	Nama Perusahaan : PT. Samudera Indo Sejahtera Nama Pelaku Usaha : PT. Samudera Indo Sejahtera Jenis Usaha : Aktivitas Pelabuhan Perikanan (KBLI 52224) Nomor Ijin Usaha (NIB) : 81220103840915 Instansi Penerbit : Menteri Investasi/BKPM Luas Pemanfaatan : 13.92 Ha	B.584/PSDKP Lan.6/PW.210/III/2023 tanggal 02 Maret 2023	27 Maret 2023	V		PT. Samudera Indo Sejahtera adalah salah satu usaha yang memanfaatkan ruang laut yaitu Aktivitas Pelabuhan Perikanan (KBLI 52224) dan menggunakan ruang laut dengan luas pemanfaatan 13.92 Ha, telah memiliki NIB, izin Lokasi, izin PKKPR serta Izin PKKPRL. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan ditemukan adanya ketidaksesuaian antara peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan hasil floating yang dilakukan oleh Petugas lapangan.	Mengkonfirmasi Kembali perizinan PKKPR dan PKKPRL  PT. SIS Agar segera menyampaikan Laporan berkala pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut

3	Lokasi : Jl. Gajah Mada Desa Taar, Kec. Dullah Selatan, Desa / Kelurahan Taar, Kec.Pulau Dullah Selatan,Kota Tual, Provinsi Maluku	Nama Perusahaan : PT. Globalindo Mutiara Nama Pelaku Usaha : Gabriel Ridolfo Gongga Jenis Usaha : Pembenihan Ikan Laut (KBLI 03212) berupa kerang mutiara NIB : 9120402282266 Instansi Penerbit : Menteri Investasi/BKPM Luas Pemanfaatan : ± 5000 m <sup>2</sup>	B.1099 /PSDKPLan.6/ PW.210/V/202 3 tanggal 03 Mei 2023.	24 Mei 2023	-	V	PT. Globalindo Mutiara adalah usaha yang bergerak di bidang pembenihan ikan laut (KBLI 03212) dan menggunakan ruang laut dengan luas pemanfaatan ± 5000 m <sup>2</sup> , telah memiliki NIB, izin Lingkungan, berdasarkan hasil pemeriksaan PT. Globalindo Mutiara belum memiliki UKL-UPL IPAL, AMDAL serta izin PKKPR serta izin PKKPRL masih dalam pengurusan sampai saat ini dalam tahap asistensi kelengkapan dokumen proposal permohonan PKKPRL. Dengan demikian diderikan sosialisasi agar segera mengurus dokumen perizinan PKKPR dan PKKPRL	Pertunya sosialisasi tentang dokumen perizinan, usaha pemanfaatan ruang laut oleh instansi terkait sesuai kegunaannya
---	--	--	---	-------------	---	---	---	---

4	Lokasi : Jl.Desu Debut, Desa/Kelurahan Debut, Kec.Manyeuw, Kab.Maluku Tenggara, Provinsi Maluku	Nama Perusahaan :PT. Bintang Karya Sejati Nama Pelaku Usaha : Hendy Timex Jenis Usaha : Perdagangan Eceran Hasil Perikanan (KBLI 47215), Industri Pembekuan Ikan (KBLI 10213) NIB : 120201482142 Instansi Penerbit : Menteri Investasi/BKPM Luas Pemanfaatan : ± 1000 m <sup>2</sup>	B.1415 /PSDKPLan.6/ PW.210/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023.	28 Juni 2023	-	V	Berdasarkan hasil pemeriksaan PT. Bintang Karya Sejati menggunakan ruang laut dengan luas pemanfaatan ± 1000 m <sup>2</sup> adalah usaha yang bergerak di bidang Perdagangan Eceran Hasil Perikanan (KBLI 47215), Industri Pembekuan Ikan (KBLI 10213), pembangunan dermaga dengan ukuran panjang ±300 m dan lebar ±1.5, serta pembangunan gedung kantor yang menggunakan ruang laut PT. Bintang Karya Sejati telah memiliki NIB, izin Lingkungan, belum memiliki UKL-UPL IPAL, AMDAL serta izin PKKPR serta izin PKKPRL atau masih dalam proses pengurusan. Dengan demikian diderikan sosialisasi agar segera mengurus dokumen perizinan PKKPR dan PKKPRL.	Pertunya sosialisasi tentang dokumen perizinan, usaha pemanfaatan ruang laut oleh instansi terkait sesuai kegunaannya
5	Lokasi : PT. Rajawali Laut Timur yang beralamat di Desa Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku	Nama Perusahaan : PT. Rajawali Laut Timur Nama Pelaku Usaha : Hasan Jenis Usaha : Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut (KBLI 03211) Ijin Lokasi : 25/IUP.B-C//19K Instansi Penerbit : DPM PTSP Prov. Maluku NIB : 9120200161673 Tanggal penerbitan : 17 Januari 2019 Luas Pemanfaatan : 108 m <sup>2</sup>	B.28/PSDKPL an.6/PW.210// 2023 tanggal 04 Januari 2023	20 Januari 2023		V	Berdasarkan hasil pengawasan bahwa PT. Rajawali Laut Timur telah memiliki NIB, dan SIUP namun belum memiliki dokumen PKKPRL, untuk itu disampaikan agar segera mempercepat proses pengurusan dokumen tersebut.	Mengurus Izin Pengelolaan Ruang Laut (PKKPRL)

6	Lokasi :Pelabuhan Perikanan Ukurlaran yang beralamat di Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku Titik 1. 07°56'22,065"S - 131°17'36,165"E Titik 2. 07°56'34,543"S - 131°17'30,857"E Titik 3. 07°56'25,729"S - 131°17'08,991"E Titik 4. 07°56'09,364"S - 131°17'15,671"E Titik 5. 07°56'14,924"S - 131°17'30,196"E Titik 6. 07°56'20,721"S - 131°17'33,147"E	Nama Lembaga : Pelabuhan Perikanan Ukurlaran Penanggung Jawab : Putat Yanu Sungkono, S.St.Pi PKKPRL : B.355/MEN-KP/II/2021 Tanggal terbit : 15 Juli 2021 Jenis Kegiatan :Pengembangan Pelabuhan Perikanan Ukurlaran untuk Mendukung SKPT Saumlaki Luas Pemanfaatan : 37,38 ha	B.299/PSDKP Lan.6/PW.210 /II/2023 tanggal 01 Februari 2023	10 Februari 2023	V		Berdasarkan hasil pengawasan bahwa Pengembangan Pelabuhan Perikanan Ukurlaran untuk Mendukung SKPT Saumlaki telah memiliki dokumen PKKPRL dan AMDAL serta kesesuaian antara peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan hasil floating yang dilakukan oleh Petugas di lapangan	
7	Lokasi : PT. Rajawali Laut Timur yang beralamat di Desa Matakus, Kecamatan Tanimbar Selatan,, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku dengan titik koordinat 08°05'00"S 131°10'30"E	Nama Perusahaan : PT. Rajawali Laut Timur Nama Penanggung Jawab : Hasan Jenis Usaha : Pembesaran Pisces/ikan Bersirip Laut (KBLI 03211) Ijin Lokasi : 25/IUP.B-C/II/19K Instansi Penerbit : DPM PTSP Prov. Maluku NIB : 9120200161673 Tanggal penerbitan : 17 Januari 2019 Luas Pemanfaatan : 108 m <sup>2</sup>	B.584/PSDKP Lan.6/PW.210/ III/2023 tanggal 02 Maret 2023	20 Maret 2023	V		Berdasarkan hasil pengawasan bahwa PT. Rajawali Laut Timur telah memiliki NIB, dan SIUP namun belum memiliki dokumen PKKPRL, untuk itu disampaikan agar segera mempercepat proses pengurusan dokumen tersebut.	Mengurus Izin Pengelolaan Ruang Laut (PKKPRL)
8	Lokasi : UD. Sinar Mutiara Tanimbar yang beralamat di Desa Teineman, Kecamatan Wuarlabobar Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, dengan titik koordinat 07°07'40"S 131°26'51"E	Nama Perusahaan : UD. Sinar Mutiara Tanimbar Nama Pelaku Usaha : Thomson Sarjono Jenis Usaha : Pembesaran Mollusca Laut (KBLI 03215) Ijin Lokasi/SITU : 503/103/SITU-UD/III/2021 Instansi Penerbit : Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Tanimbar NIB : 9120307372713 Tanggal penerbitan : 21 Maret 2019 Luas Pemanfaatan : 90.000 m <sup>2</sup>	B.883/PSDKP Lan.6/PW.210/ IV/2023 tanggal 05 April 2023.	17 April 2023	V		Berdasarkan hasil pengawasan bahwa UD. Sinar Mutiara Tanimbar telah memiliki NIB, dan SITU namun belum memiliki dokumen PKKPRL, untuk itu disampaikan agar segera mempercepat proses pengurusan dokumen tersebut.	Agar segera mempercepat proses pengurusan dokumen tersebut. Izin Pengelolaan Ruang Laut (PKKPRL)

9	Lokasi : PT. Tanimbar Mutiara Indopasifik (P.Ungar) yang beralamat di Desa Labobar, Kecamatan Wuarlabobar Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, dengan titik koordinat 07°07'27"S 131°39'35"E	Nama Perusahaan : PT. Tanimbar Mutiara Indopasifik (P.Ungar) Nama Penanggung Jawab : Sakka Jenis Usaha : Pembesaran Mollusca Laut (KBLI 03215) Ijin Lokasi/SITU : 503/1277/SITU-PT/XI/2016 Instansi Penerbit : Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Tanimbar SIUP : 03/010/SIUP-PT/KP2TPM-MTB/2016 Penerbit :Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tanggal Penerbitan : 10 November 2016 Luas Pemanfaatan : 2000 M <sup>2</sup>	B.1099 /PSDKPLan.6/ PW.210/V/2023 tanggal 03 Mei 2023.	26 Mei 2023		V	Berdasarkan hasil pengawasan bahwa PT. Tanimbar Mutiara Indopasifik (P.Ungar) belum memiliki NIB, dokumen yang ada yaitu SIUP dan SITU dan juga belum memiliki dokumen PKKPRIL, untuk itu disampaikan agar segera melakukan proses pengurusan dokumen tersebut.	Agar segera mempercepat proses pengurusan dokumen tersebut. Izin Pengelolaan Ruang Laut (PKKPRIL)
10	Lokasi : PT. Tanimbar Mutiara Indopasifik yang beralamat di Dusun Tatuun, Desa Ridool, KecamatanTanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, dengan titik koordinat 07°15'31"S 131°24'14"E	Nama Perusahaan : PT. Tanimbar Mutiara Indopasifik Nama Penanggung Jawab : Ade Gunawan Selly Jenis Usaha : Pembesaran Mollusca Laut (KBLI 03215) Ijin Lokasi/SITU : 503/1277/SITU-PT/XI/2016 Instansi Penerbit : Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Tanimbar SIUP : 03/010/SIUP-PT/KP2TPM-MTB/2016 Penerbit :Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tanggal Penerbitan : 10 November 2016 Luas Pemanfaatan : 2000 M <sup>2</sup>	B.1415 /PSDKPLan.6/ PW.210/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023.	06 Juni 2023		V	Berdasarkan hasil pengawasan bahwa PT. Tanimbar Mutiara Indopasifik (P.Ungar) belum memiliki NIB, dokumen yang ada yaitu SIUP dan SITU dan juga belum memiliki dokumen PKKPRIL, untuk itu disampaikan agar segera melakukan proses pengurusan dokumen tersebut.	Agar segera mempercepat proses pengurusan dokumen tersebut. Izin Pengelolaan Ruang Laut (PKKPRIL)

11	Lokasi : CV. Weru yang beralamat di Desa Weratan, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, dengan titik koordinat 07°31'30"S 131°01'30"E	Nama Perusahaan : CV. Weru Nama Penanggung Jawab : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Jenis Usaha : Pengembangan Pelabuhan Perikanan Tiakur untuk Mendukung SKPT Moa NIB : 2308210012126 Ijin Lokasi/SITU : 503/1058/SITU-CV/VII/2016 Instansi Penerbit : Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tanggal Penerbitan : 10 November 2016 Luas Pemanfaatan : 2000 M <sup>2</sup>	B.1700/PSDK PLan.6/PW.21 0/VII/2023 tanggal 06 Juli 2023	10 Juli 2023		V	Berdasarkan hasil pengawasan bahwa CV. Weru telah memiliki NIB, SIUP, dan SITU namu belum memiliki dokumen PKKPRL, untuk itu disampaikan agar segera melakukan proses pengurusan dokumen PKKPRL tersebut.	Agar segera mempercepat proses pengurusan dokumen tersebut. Izin Pengelolaan Ruang Laut (PKKPRL)
12	Lokasi : Pelabuhan Perikanan yang beralamat Ukurlaran yang berlokasi di Desa Tiakur, Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, dengan titik koordinat 08°09'03" S - 127°47'13" E	Nama Lembaga : Pelabuhan Perikanan Ukurlaran Penanggung Jawab : Putat Yanu Sungkono, S.St.Pi PKKPRL : B.355/MEN-KP/VII/2021 Tanggal terbit : 15 Juli 2021 Jenis Kegiatan : Pengembangan Pelabuhan Perikanan Ukurlaran untuk Mendukung SKPT Saumlaki Luas Pemanfaatan : 37,38 ha	B.2073/PSDK PLan.6/PW.21 0/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023	21 Agustus 2023		V	Berdasarkan hasil pengawasan bahwa Pengembangan Pelabuhan Perikanan Tiakur untuk Mendukung SKPT Moa telah memiliki dokumen PKKPRL dan AMDAL serta kesesuaian antara peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan hasil ploating yang dilakukan oleh Petugas di lapangan	
13	Lokasi : PT. Raja 4 Divers beralamat di Pulau Pef Kampung Kabui Distrik Meos Mansar kab. Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya	Nama Perusahaan : PT. Raja 4 Divers Nama Pelaku Usaha : Maja Hadorn Jenis Usaha : Wisata Selam (KBLI 93243) Ijin Lokasi : - NIB : 9120204222765 Tanggal penerbitan : 26 Februari 2019 Luas Pemanfaatan :	B.28/PSDKPL an.6/PW.210// 2023 tanggal 04 Januari 2023	11 Januari 2023		V	Berdasarkan hasil pengawasan bahwa PT. Raja 4 Divers telah memiliki NIB, dan tanda daftar ijin usaha namun belum memiliki dokumen PKKPRL, untuk itu disampaikan agar segera mempercepat proses pengurusan dokumen tersebut.	Mengurus Izin Pengelolaan Ruang Laut (PKKPRL)

14	Lokasi : PT. Waruna Indah Nusantara beralamat di Pulau Yebeu Kampung Meosmanggara Distrik Waigeo Barat kab. Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya	Nama Perusahaan : PT. Waruna Indah Nusantara Nama Usaha : Cove Eco Resort Penanggungjawab : Bram Tatuho Jenis Usaha : Aktivitas Hiburan dan Rekreasi lainnya (KBLI 93299 ) NIB : 8120104971609 Instansi penerbit : Menteri Investasi/BKPM Tanggal Penerbit : 10 September 2018 Masa Berlaku Selama Usaha	B.299/PSDKP Lan.6/PW.210/II/2023 tanggal 01 Februari 2023	20 Februari 2023		V	Berdasarkan hasil pengawasan bahwa PT. Waruna Indah Nusantara telah memiliki NIB, dan tanda daftar ijin usaha namun belum memiliki dokumen PKKPR, untuk itu disampaikan agar segera mempercepat proses pengurusan dokumen tersebut.	segera mengurus izin KKPRL
15	Lokasi : Agusta Eco Resort beralamat di Pulau Agusta Kampung Meos Mansar, Distrik Waigeo Barat kab. Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya	Nama Perusahaan : PT. Agusta Nama Usaha : Agusta Eco Resort Penanggungjawab : Marco Montaldo Status : PMA Jenis Usaha : Aktivitas Hiburan dan Rekreasi lainnya (KBLI 93299 ) NIB : 9120305312194 Instansi penerbit : Menteri Investasi/BKPM Tanggal Penerbit : 29 Maret 2023 Masa Berlaku Selama Usaha	B.584/PSDKP Lan.6/PW.210/III/2023 tanggal 02 Maret 2023	27 Maret 2023.		V	Dari hasil pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut bahwa Lokasi usaha wisata bahari PT. Agusta berada di Zona Cagar Alam, Laut sesuai dengan RZWP3K yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi Papua Barat. PT. Agusta belum memenuhi ketentuan tentang pemanfaatan Ruang Laut	segera mengurus izin KKPRL
16	Lokasi : Papua Explorers Eco Resort beralamat di Pulau Gam, Kampung Yenwappur Distrik Meosmansar Kab. Raja Ampat Barat kab. Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya	Nama Perusahaan : PT. Ocean Explorers Nama Usaha : Papua Explorers Eco Resort Penanggungjawab : Maria F. Totnai Status : PMA Jenis Usaha : Pariwisata Alam Perairan (KBLI 93242 Wisata Selam ) NIB : 8120101911203 Instansi penerbit : Menteri Investasi/BKPM Tanggal Penerbit : 29 Maret 2023 Masa Berlaku Selama Usaha	B.883/PSDKP Lan.6/PW.210/IV/2023 tanggal 05 April 2023.	26 April 2023.		V	Dari hasil pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut bahwa Lokasi usaha wisata bahari PT. Ocean Explorers usaha yang menggunakan Modal Asing (PMA) belum memenuhi ketentuan tentang pemanfaatan ruang laut karena belum memiliki dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).	segera mengurus izin KKPRL

17	Lokasi : Cendana Indopearls beralamat di Pulau Duyef, Kampung Selpelle, Distrik Meosmansar Kab. Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya	Nama Perusahaan : PT. Cendana Indopearls Nama Usaha : Cendana Indopearls Penanggungjawab : Depri Agustiyayan Status : PMA Jenis Usaha : Budidaya Kerang Mutiara (KBLI 03215 (pembesaran Molusca Laut) NIB : 8120101932048 Instansi penerbit : Menteri Investasi/BKPM Tanggal Penerbit : 29 Maret 2023 Masa Berlaku Selama Usaha Luas Pemanfaatan : 12.65 Ha	B.1099 /PSDKPLan.6/ PW.210/V/202 3 tanggal 03 Mei 2023.	25 Mei 2023.		V	Dari hasil pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut bahwa Lokasi usaha wisata bahari PT. Cendana Indopearls usaha yang menggunakan Modal Asing (PMA) belum memenuhi ketentuan tentang pemanfaatan ruang laut karena belum memiliki dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).	segera mengurus izin KKPR
18	Lokasi : Buttles Mutiara beralamat di Kampung/desa Sakabu, Distrik Salawati Tengah kab. Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya	Nama Perusahaan : Buttles Mutiara Nama penanggung Jawab : Godlift Sulmurry Status : PMDN Jenis Usaha : Budidaya Kerang Mutiara (KBLI 03215 (pembesaran Molusca Laut) NIB : 2705220046749 Instansi penerbit : Menteri Investasi/BKPM Tanggal Penerbit : 27 Mei 2022. Masa Berlaku Selama Usaha Luas Pemanfaatan : 12.65 Ha	B.1415 /PSDKPLan.6/ PW.210/VI/202 3 tanggal 06 Juni 2023.	26 Juni 2023		V	Pemanfaatan ruang laut oleh Bapak Godlift Sulmurry adalah sebagai berikut: - Pemasangan Tali Long Line untuk budidaya Mutiara. - Pembangunan dermaga. - Pembangunan mess serta kantor dan gudang Dari hasil pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut bahwa Lokasi usaha Buttles Mutiara usaha yang berstatus Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) belum memenuhi ketentuan tentang pemanfaatan ruang laut karena belum memiliki dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).	segera mengurus izin KKPR

19	Lokasi : PT. Seahorse Paradise beralamat di Pulau Birie, Kampung Arefi Distrik Batanta, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya	Nama Perusahaan : PT. Seahorse Paradise Nama Usaha : Papua Paradise Eco Resort Penanggungjawab : Crisnanda Jenis Usaha : Pariwisata Alam Perairan NIB : 9120300371036 Instansi penerbit : Menteri Investasi/BKPM Tanggal Penerbit : 14 Maret 2019	B.1700/PSDK PLan.6/PW.21 0/VII/2023 tanggal 06 Juli 2023	20 Juli 2023		V	Berdasarkan hasil pengawasan diketahui bahwa usaha ini berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) dan telah memenuhi ketentuan perizinan berusaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 56301 (Bar), KBLI 93242 (Wisata Selam), KBLI 55199 (Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya), KBLI 96122 (Aktivitas SPA / Sante Par Aqua), KBLI 56101 (Restoran). Usaha ini belum mempunyai dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) PT. Seahorse Paradise kemudian diberi sosialisasi singkat serta arahan untuk berkoordinasi UPT Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, guna mendapatkan dokumen KKPRL.	DiDiberikan Sosialisasi agar segera mengurus dokumen PPKPRL
20	Lokasi : Helda Homestay beralamat di Pulau Tamagui, Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat, Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya	Nama Usaha : Helda Homestay Penanggungjawab : Alfred Ledrik Mayor Jenis Usaha : Pariwisata Alam Perairan NIB : 9120300371036 Instansi penerbit : Menteri Investasi/BKPM Tanggal Penerbit : 14 Maret 2019	B.1955/PSDK PLan.6/KP.440 /VIII/2023 Tanggal 01 Agustus 2023	03 Agustus 2023		V	Berdasarkan hasil pengawasan diketahui bahwa usaha ini berstatus Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Lokasi usaha wisata bahari Helda Homestay berada di Zona Cagar Alam Laut sesuai dengan RZWP3K yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi Papua Barat, Helda Homestay belum memenuhi ketentuan perizinan berusaha dan belum mempunyai dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) kemudian diberi sosialisasi singkat serta arahan untuk berkoordinasi UPT Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, guna mendapatkan dokumen KKPRL.	

#### a.4 Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya

Pencapaian kinerja sampai dengan Tahunan Tahun 2023 diperoleh dari kegiatan Pengawasan terhadap 47 pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES. Apabila mengacu kepada target yang diberikan, Pangkalan PSDKP Tual sudah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 2 untuk pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES.

Kegiatan pendukung utama jumlah pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Tual meliputi Pengawasan Pengelolaan Jenis ikan yang dilindungi. Pengawasan ini belum termasuk dengan adanya laporan warga atau nelayan kecil yang mendapati adanya jenis ikan dilindungi yang tidak sengaja masuk dalam jaring atau tertangkap saat memancing.

Berbagai upaya telah dilakukan pangkalan PSDKP Tual terhadap kegiatan pengawasan jenis ikan dilindungi sebagai bagian penyadartahuan kepada masyarakat terkait larangan dan tujuan pelarangan tersebut dan dampaknya bagi ekologi sekitar. Sebagai salah satu fenomena yang terdapat dalam wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual terutama di wilayah Maluku Tenggara terkhususnya kepulauan kei terdapat pemanfaatan Tabob (penyu belimbing) dalam ritual adat dan menjadi makanan, tidak hanya itu masyarakat Pulau Ut yang ada di kepulauan Kei juga dikenal mengkonsumsi dugong yang merupakan jenis ikan dilindungi atau penangkapan ikan napoleon dengan ukuran yang dilarang. Berikut merupakan tabel pengawasan jenis ikan dilindungi

Tabel 3. 14 Rekap pengawasan jenis ikan dilindungi

NO	LOKASI PENGAWASAN	PELAKU USAHA	JENIS IKAN YANG DIAWASI	DOKUMEN PERIZINAN	PENERBIT IZIN, MASA BERLAKU	URAIAN HASIL PENGAWASAN	KETAATAN	
							TAAT	TDK TAAT
1	Desa/Ohoi Fiditan, Kecamatan Dullah Utara Kota Tual.	Sait Ode Ibrahim	Hiu Lanjaman/ <i>Charcarinus Falciformis</i> , Hiu Martil/ <i>Sphyrna Lewini</i> , Hiu Martil/ <i>Sphyrna Mokarran</i> , Pari Lontar/ <i>Rhynchobatus Australiae</i> , Pari kikir/ <i>Glaucostegeus Typus</i>	Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2411210062736	Menteri Infestasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Dari Hasil Pengawasan Terhadap Usaha Milik Bapak Said Ode Ibrahim bahwa tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran, telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 47215 perdagangan eceran hasil Perikanan,03151	√	-

						Penangkapan/Pe ngambilan ikan Bersirip (Pisces), 03155 Penangkapan/Pe ngambilan Echinodermata; Nilai kepatuhan teknis dari KBLI 03151 dan KBLI 03155 sebesar 45%, artinya bahwa kepatuhan teknis usaha milik Bapak Said Ode Ibrahim dinyatakan kurang Baik;		
2	CV. Indo Marine Fish, Desa Lebetawi, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual, Provinsi Maluku	Asrudy	Napoleon ( <i>Cheilinus Undulatus</i> )	Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120501810162 SIPJI : I-202103150900154584634	Menteri Infestasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Dari Hasil Pengawasan Terhadap Usaha Milik CV. Indo Marine Fish bahwa tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran, telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 47215 perdagangan eceran hasil Perikanan, 03151 Penangkapan/Pe ngambilan ikan Bersirip (Pisces), SIPJI No. I202103150900154584634	√	-
3	UPI milik Gatotn Riyanto, Jl. Utarum kampung Coa, Desa/ Kel, Coa kec. Kaimana, Kab. Kaimana, Prov. Papu Barat	Gatotn Riyanto	Hiu Lanjaman/ <i>Charca rinus Falciformis</i> , Hiu Martil/ <i>Sphyrna Lewini</i> , Hiu Martil/ <i>Sphyrna Mokarran</i> , Pari Lontar/ <i>Rhynchob atus Australiae</i> , Pari kikir/ <i>Glaucostegu s Typus</i>	9120118073505	Menteri Investasi/BKPM	Tidak ditemukan jenis ikan yang diliindungi dalam proses pemuatan. Baik lobster maupun jenis ikan lainnya	√	-
4	UPI milik Sutrisno, Jl. Nikolas Kabes. kec. Kaimana, Kab. Kaimana, Prov. Papu Barat	Sutrisno	Hiu Lanjaman/ <i>Charca rinus Falciformis</i> , Hiu Martil/ <i>Sphyrna Lewini</i> , Hiu Martil/ <i>Sphyrna Mokarran</i> , Pari Lontar/ <i>Rhynchob atus Australiae</i> , Pari kikir/ <i>Glaucostegu s Typus</i>	220001782017	Menteri Investasi/BKPM	Tidak ditemukan jenis ikan yang diliindungi dalam prsoes pemuatan. Baik lobster maupun jenis ikan lainnya	√	-

5	UPI milik Kholil Yusuf, Jl. R.A Kartini kec. Kaimana, Kab. Kaimana, Prov. Papu Barat	Kholil Yusuf	Hiu Lanjaman/ <i>Charca rinus Falciformis</i> , Hiu Martil/ <i>Sphyrna Lewini</i> , Hiu Martil/ <i>Sphyrna Mokarran</i> , Pari Lontar/ <i>Rhynchobatus Australiae</i> , Pari kikir/ <i>Glaucostegus Typus</i>	9120004490816	Menteri Investasi/BKPM	Dari hasil pengawakan bahwa Dari hasil pengawakan bahwa tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran, pelaku usaha telah memiliki perizinan berusaha, telah memiliki SIPJI No. I-202210101326055108525,SAJI No.06915/REK/PR/L/PSPL.1/XI/2022. SK Penetapan Kuota No. B.122/LPSPL.1/PR/L/RL.430/II/2023, Serta Surat Izin Pengumpul Hasil Perikanan (SIPHP) No. 523.3/07/SIPHP/DPMPTSP-TK/2022	√	-
6	Jl. Utarum Bantemi, Kec. Kaimana, Kab. Kaimana, Prov. Papu Barat	CV. Antara Inti Lautan	Hiu Lanjaman/ <i>Charca rinus Falciformis</i> , Hiu Martil/ <i>Sphyrna Lewini</i> , Hiu Martil/ <i>Sphyrna Mokarran</i> , Pari Lontar/ <i>Rhynchobatus Australiae</i> , Pari kikir/ <i>Glaucostegus Typus</i>	Nomor Induk Berusaha : *1210000630322	Menteri Investasi/BKPM	Dari hasil pengawakan tidak ditemukan adanya pemanfaatan jenis ikan dilindungi yang termasuk dalam perlindungan CITES, CV. Antara Inti Lautan merupakan unit Usaha Pengolahan Ikan, berskala menengah dengan status penanaman modal dalam negeri dengan kegiatan usaha Perdagangan Eceran Hasil Perikanan sesuai dengan bidang usaha yang tertera pada Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (KBLI 47215 Perdagangan Eceran Hasil Perikanan), saat ini melakukan pengajuan penerbitan dokumen SIPJI	-	√

7	UPI milik PT. Industri Perikanan Namatota yang berada di Dusun Arawala, Desa Namatota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat	PT. Industri Perikanan Namatota/Shou Li Ma	Hiu Lanjaman/ <i>Charca rinus Falciformis</i> , Hiu Martil/ <i>Sphyrna Lewini</i> , Hiu Martil/ <i>Sphyrna Mokarran</i> , Pari Lontar/ <i>Rhynchobatus Australiae</i> , Pari kikir/ <i>Glaucostegeus Typus</i>	9120010110054	Menteri Investasi/BKPM	Pada saat pengawasan dilapangan secara langsung tidak dijumpai adanya pelanggaran pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendiks II CITES.	√	-
8	pasar ikan yang berada di Pasar Sentral Bintuni, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat	Musabaqa	Penangkapan / Pengambilan ikan Bersirip ( <i>Pisces</i> ), dan <i>Echinodermata</i>	-	-	Dari hasil Pengawasan bahwa pelaku usaha belum melengkapi dokumen perizinan berusaha, belum memiliki NIB, Tidak ditemukan jenis ikan yang dilindungi dalam proses pemuatan. Baik lobster maupun jenis ikan lainnya	-	√
9	Jl. Uratum, Kampung Coa Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat	Rida Florida Imran	Kepiting ( <i>Scylla spp.</i> ) (Ukuran Karapas <12 cm)	Nomor Induk Berusaha : '1210000630322 Surat Izin Pengumpul Hasil Perikanan (SIPHP) : 523.3/04/SIPHP/DP MPTSP-TK/2023	Menteri Investasi/BKPM	Pada saat pengawasan dilapangan secara langsung tidak dijumpai adanya pelanggaran pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendiks II CITES. Perlu di lakukan pengawasan secara rutin dan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait	√	-
10	Jl. Nikolas Kabes. kec. Kaimana, Kab. Kaimana, Prov. Papu Barat dengan titik koordinat 03°40'5"LS–133°45'48"BT	Sutrisno	Hiu Lanjaman/ <i>Charca rinus Falciformis</i> , Hiu Martil/ <i>Sphyrna Lewini</i> , Hiu Martil/ <i>Sphyrna Mokarran</i> , Pari Lontar/ <i>Rhynchobatus Australiae</i> , Pari kikir/ <i>Glaucostegeus Typus</i>	Nomor Induk Berusaha : 0220001782017 Nomor ID Izin SIPJI Perdagangan DN : I-2023032112080812 31947	Menteri Investasi/BKPM DPMPSTSP Provinsi Maluku dan Loka PSPL Sorong	Pada saat pengawasan dilapangan secara langsung tidak dijumpai adanya pelanggaran pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi	√	-

11	Dusun Arawala, Desa Namatota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat dengan titik Koordinat 03°51'3"LS – 133°55'55"BT	PT. Industri Perikanan Namatota	<i>Carcharhinus brevipinna</i> (Hiu Lanjaman, Merak Bulu), <i>Carcharhinus melanopterus</i> (Hiu Karang Sirip Hitam) dan <i>Chaenogaleus macrostoma</i> (Hiu Pilus, Hiu Kacang).	Nomor Induk Berusaha : 9120010110054 Rekomendasi jenis ikan tidak dilindungi dan tidak termasuk Appendiks II CITES : 05853/REK/PRL/LP SPL.1/IX/2023	Menteri Investasi/BKPM DPMPSTP Provinsi Maluku dan Loka PSPL Sorong	Pada saat pengawasan dilapangan secara langsung tidak dijumpai adanya pelanggaran pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi	√	-
12	Jl. Utarum Krooy, Kab. Kaimana, Provinsi Papua Barat	(Perorangan) Bapak. Muh. Afdhol Itsnain Lakesmas	Pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan difokuskan ke pengawasan Jenis Ikan Yang Dilindungi hasil tangkapan nelayan lokal yang diperjual belikan di pasar ikan Kab. Kaimana.	-	-	Pada saat pengawasan di lapangan tidak ditemukan adanya pemanfaatan jenis ikan yang tergolong dalam Jenis Ikan Yang Dilindungi dan/atau yang termasuk dalam Appendiks II CITES sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Rekomendasi : Dihimbau agar pelaku usaha mengurus Nomor Induk Berusaha	√	-
13	Jl. Sisir, Desa/Kel Kaimana Kota, kec.Kaimana, Kab.Kaimana, Prov. Papua Barat	Imran Lamadi	Hiu dan Pari	NIB : 1297000731233		Pada saat pengawasan di lapangan ditemukan adanya pemanfaatan jenis ikan yang tergolong dalam Jenis Ikan Dilindungi dan/atau yang termasuk dalam Appendiks II CITES sesuai peraturan perUndang undangan yang berlaku. Adapun komoditi hasil perikanan yang berada pada usaha milik Imran Lamadi antara lain Hiu Lanjaman, Pari kikir dan Pari Lontar. Ketentuan dan peraturan yang berlaku terlaksana seluruhnya Sesuai hasil pengawasan dilapangan dokumen perizinan usaha telah terlaksana sesuai peraturan perUndang undangan yang	√	-

						berlaku		
14	Jl. Utarum Krooy, Kab. Kaimana, Provinsi Papua Barat	Ibu Adriana	Pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan difokuskan ke pengawasan Jenis Ikan Yang Dilindungi hasil tangkapan nelayan lokal yang diperjual belikan di pasar ikan Kab. Kaimana.	-	-	Pada saat pengawasan di lapangan tidak ditemukan adanya pemanfaatan jenis ikan yang tergolong dalam Jenis Ikan Yang Dilindungi dan/atau yang termasuk dalam Appendiks II CITES sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Rekomenadi : Dihimbau agar pelaku usaha mengurus Nomor Induk Berusaha	√	-
15	Kelurahan Saumlaki, Kab. Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku	UD. Mina Raya,	Hiu Lanjaman/ <i>Charca rinus Falciformis</i> , Hiu Martil/ <i>Sphyrna Lewini</i> , Hiu Martil/ <i>Sphyrna Mokarran</i> , Pari Lontar/ <i>Rhynchobatus Australiae</i> , Pari kikir/ <i>Glaucosteagus Typus</i>	Izin Usaha : 2708210034149	OSS	Dari hasil pengawanan bahwa tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran, pelaku usaha telah memiliki perizinan berusaha, telah memiliki SIPJI No. 68/i/kkp/2021,SAJ I No.00183/SAJI/D N/LPSPL1/I/2023, S	V	-
16	Pasar Omele, Desa Sifnana, Kab. Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku	UD. Revinara Jaya / Heni Khotimah	Hiu Martil ( <i>Sphyrna mokarran</i> ), Hiu Martil ( <i>Sphyrna Lewini</i> ), Pari Lontar	Nomor Induk Berusaha : '1302230064683  SIPJI : 050222000998  SK Penetapan Kuota : 1302230064683	Menteri Investasi/BKPM dan Loka PSPL Sorong	Dari hasil pengawanan bahwa tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran, pelaku usaha telah memiliki perizinan berusaha Nomor Induk Berusaha : '1302230064683, telah memiliki SIPJI No. 050222000998, SK Penetapan Kuota No.1302230064683	√	-
17	Pertokoan Tanimbar Raya, Kelurahan Saumlaki, Kec. Tanimbar Selatan, Keb. Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku	Ahmat Robin	Teripang Gosok ( <i>Holothuria leucospilota</i> ) Teripang Gamat ( <i>Stichopus ocellatus</i> ) Teripang Kapok ( <i>Actinopyga Echinites</i> )	Nomor Induk Berusaha : 2806220078025  IUP Nomor : 11/IUP.B-C/IV/8K  Rekomendasi look alike : 00384/REK/PRL/LP SPL.1/I/2023	Menteri Investasi/BKPM DPMPSTSP Provinsi Maluku dan Loka PSPL Sorong	Dari hasil pengawanan bahwa tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran, pelaku usaha telah memiliki perizinan berusaha Nomor Induk Berusaha : 2806220078025, IUP No.11/IUP.B-C/IV/8K, telah memiliki Rekomendasi look alike :	√	-

						00384/REK/PRL/LPSP.L.1/I/2023		
18	Pertokoan Pasar Omele, Desa Sifnana, Kec.Tanimbar Selatan, Keb. Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku	Rahmad Hidayat	Hiu Martil ( <i>Sphyma mokarran</i> ) Pari Lontar ( <i>Glaucostegus typus</i> )	Nomor Induk Berusaha : 9120003300645  SIPJI : 87/I/KKP/2021	Menteri Investasi/BKPM DPMPSTSP Provinsi Maluku dan Loka PSPL Sorong	Dari hasil pengawanan bahwa tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran, pelaku usaha telah memiliki perizinan berusaha Nomor Induk Berusaha : 9120003300645, SIPJI : 87/I/KKP/2021	√	-
19	Kelurahan Saumlaki, Kec.Tanimbar Selatan, Keb. Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku	UD. Kirana Mina Laut	Hiu Lanjaman/ <i>Charcarinus Falciformis</i> , Hiu Martil/ <i>Sphyrna Lewini</i> , Hiu Martil/ <i>Sphyrna Mokarran</i> , Pari Lontar/ <i>Rhynchobatus Australiae</i> , Pari kikir/ <i>Glaucostegus Typus</i>	Nomor Induk Berusaha : 9120204200186  SIPJI : 88/I/KKP/2021  SAJI - DN : 029/KML/PER-LPSP.L/I/2023	Menteri Investasi/BKPM DPMPSTSP Provinsi Maluku dan Loka PSPL Sorong	Dari hasil pengawanan bahwa tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran, pelaku usaha telah memiliki perizinan berusaha Nomor Induk Berusaha : 9120204200186, SIPJI : 88/I/KKP/2021 dan SAJI-DN Nomor : 029/KML/PER-LPSP.L/I/2023	√	-
20	Desa Sifnana, Kec.Tanimbar Selatan, Keb. Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku	Liberatus Fenanlampir	Kepiting ( <i>Scylla spp.</i> ) (Ukuran Karapas <12 cm)	NIB : 2610210004213	Menteri Investasi/BKPM DPMPSTSP Provinsi Maluku	Dari hasil pengawanan bahwa ditemukan 115 ekor Kepiting ( <i>Scylla spp.</i> ) Ukuran Karapas <12 cm, sehingga dilakukan pelepasliaran	-	√
21	Desa Sifnana, Kab. Kepulauan Tanimbar. Yang merupakan wilayah kerja dari Satwas SDKP Maluku Tenggara Barat. dengan titik Koordinat 07° 57' 26" LS dan 131° 18' 28" BT	CV. LH. Korindo Saumlaki	Napoleon ( <i>Cheilinus Undulatus</i> )	NIB : 1297000351376	Menteri Investasi/BKPM	Berdasarkan hasil Pengawasan pada CV. LH. Korindo Saumlaki, ditemukan Jenis ikan yang dilindungi dan di atur pengelolaannya yaitu Ikan Napoleon, belum memiliki SIPJI, Selanjutnya bersama sama BKIPM Ambon Wilker Saumlaki, Satwas SDKP Maluku Tenggara Barat, dan CV. LH. Korindo Saumlaki selaku pemilik, melakukan pelepasliaran ke habitatnya.	-	√
22	Desa Matakus, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar, dengan titik Koordinat 08° 03' 40" LS dan 131° 12' 33" BT.	Bapak Arnold	Penyu	-	-	Berdasarkan pengamatan langsung di lokasi pengawasan Jenis Ikan Dilindungi Yang Ditemukan yaitu Penyu Sisik ( <i>Eretmochelys</i> )	√	-

						imbricata) sebanyak 1 (satu) ekor dalam kondisi hidup, Penyus kemudian dilepasliarkan liarkan ke laut.		
23	Jl. Yos Sudarso, RT.02/RW.08 Desa Ollit, Kec.Tanimbar Selatan, Keb. Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku	CV. Asnur Jaya		NIB : 9120119220623		Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan, : - Perizinan lengkap - Lokasi sesuai - Ketentuan dan peraturan yang berlaku terlaksana seluruhnya	√	-
24	Jl. Ternate, Gg H. Kasim, Kelurahan Samkai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, koordinat 8°30'44" LS - 140°23'00" BT	CV. Bintang Fahri Internasional / Taufik Latarissa	Hiu Martil ( <i>Sphyma mokarran</i> ), Hiu Martil ( <i>Sphyma zygaena</i> ) Pari Lontar ( <i>Rhynchobatus australiae</i> ) Pari Lontar ( <i>Rhynchobatus springeri</i> ) Pari Kikir ( <i>Glaucostegus typus</i> )	Nomor Induk Berusaha : 8120102801461  SIPJI : 53/1/KKP/2021  SK Penetapan Kuota : B.291/LPSPL.1/PRL.430/VI/2022  SAJI-DN : 00022/SAJI/DN/LPS PL.1/II/2023	Menteri Investasi/BKPM dan Loka PSPL Sorong	Dari hasil pengawan bahwa tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran, pelaku usaha telah memiliki perizinan berusaha Nomor Induk Berusaha : 8120102801461, SIPJI : 53/1/KKP/2021, SK Penetapan Kuota : B.291/LPSPL.1/PRL.430/VI/2022, SAJI-DN : 00022/SAJI/DN/LPSPL.1/II/2023	√	-
25	Jl. Prajurit, Kelurahan Mandala, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, koordinat 8°29'31" LS - 140°23'51" BT	Sriyanto	Hiu Martil ( <i>Sphyma Lewini</i> ) Pari Lontar ( <i>Rhynchobatus australiae</i> ) Pari Kikir ( <i>Glaucostegus typus</i> )	Nomor Induk Berusaha : 061220087795  SIPJI : 061220087795	Menteri Investasi/BKPM dan Loka PSPL Sorong	Dari hasil pengawan bahwa tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran, pelaku usaha telah memiliki perizinan berusaha Nomor Induk Berusaha : 061220087795, SIPJI : 061220087795	√	-
26	Jl. Gudang Arang, Kelurahan Kamahedoga, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Koordinat 8°28'06" LS - 140°23'42" BT	Ruslan	Hiu Martil ( <i>Sphyma mokarran</i> ), Pari Kupu-Kupu ( <i>Rhina ancylostoma</i> ), Pari Lontar ( <i>Rhynchobatus australiae</i> ) Pari Lontar ( <i>Rhynchobatus springeri</i> ), Pari Kikir ( <i>Glaucostegus typus</i> )	Nomor Induk Berusaha : 9120002892521  SIPJI : 54/1/KKP/2021  SK Penetapan Kuota : B.122/LPSPL.1/PRL.430/II/2023	Menteri Investasi/BKPM dan Loka PSPL Sorong	Dari hasil pengawan bahwa tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran, pelaku usaha telah memiliki perizinan berusaha Nomor Induk Berusaha : 9120002892521, SIPJI : 54/1/KKP/2021, SK Penetapan Kuota : B.122/LPSPL.1/PRL.430/II/2023	√	-
27	Jl. Dorem Kay, Kel. Bambu Pemali, Kec. Merauke, Kab. Merauke – Papua	PT. Mina Mirandi Abadi	Hiu Martil ( <i>Sphyma mokarran</i> ), Pari Kupu-Kupu ( <i>Rhina</i>	Nomor Induk Berusaha : 1279000241475  SIPJI :	Menteri Investasi/BKPM dan Loka PSPL Sorong	Dari hasil pengawan bahwa tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran,	√	-

	Selatan		<i>ancylostoma</i> ), Pari Lontar ( <i>Rhynchobatus australiae</i> ) Pari Lontar ( <i>Rhynchobatus springeri</i> ), Pari Kikir ( <i>Glaucostegus typus</i> )	175//KKP/2021  SK Penetapan Kuota : B.122/LPSPL.1/PRL .430/II/2023		pelaku usaha telah memiliki perizinan berusaha Nomor Induk Berusaha : 1279000241475, SIPJI : 175//KKP/2021, SK Penetapan Kuota : B.122/LPSPL.1/P RL.430/II/2023		
28	Jaya, Jl. Noari, RT. 001/RW. 002, Kel. Karang Indah, Kec. Merauke, Kab. Merauke – Papua Selatan	UD. Rizky Jaya	Hiu Martil ( <i>Sphyma mokarran</i> ), Pari Kupu-Kupu ( <i>Rhina ancylostoma</i> ), Pari Lontar ( <i>Rhynchobatus australiae</i> ) Pari Lontar ( <i>Rhynchobatus springeri</i> ), Pari Kikir ( <i>Glaucostegus typus</i> )	Nomor Induk Berusaha : 9120107951488  SIPJI : 29//KKP/2021  SK Penetapan Kuota : B.122/LPSPL.1/PRL .430/II/2023	Menteri Investasi/BKPM dan Loka PSPL Sorong	Dari hasil pengawasan bahwa tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran, pelaku usaha telah memiliki perizinan berusaha Nomor Induk Berusaha : 9120107951488, SIPJI : 29//KKP/2021, SK Penetapan Kuota : B.122/LPSPL.1/P RL.430/II/2023	√	-
29	Jl. Polder Dalam III, Kel. Maro, Kec. Merauke, Kab. Merauke – Papua Selatan	Iramawarni A. Ningtiyas	Hiu Martil ( <i>Sphyma mokarran</i> ), Pari Kupu-Kupu ( <i>Rhina ancylostoma</i> ), Pari Lontar ( <i>Rhynchobatus australiae</i> ) Pari Lontar ( <i>Rhynchobatus springeri</i> ), Pari Kikir ( <i>Glaucostegus typus</i> )	Nomor Induk Berusaha : 1281000302879  SIPJI : 122/1/KKP/2021  SK Penetapan Kuota : B.122/LPSPL.1/PRL .430/II/2023	Menteri Investasi/BKPM dan Loka PSPL Sorong	Dari hasil pengawasan bahwa tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran, pelaku usaha telah memiliki perizinan berusaha Nomor Induk Berusaha : 1281000302879, SIPJI : 122/1/KKP/2021, SK Penetapan Kuota : B.122/LPSPL.1/P RL.430/II/2023	√	-
30	Kampung Warsambin, Distrik Tiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat	Alfred	Lobster ( <i>Panulirus homarus</i> ) dan Lobster jenis lainnya ( <i>Panulirus spp</i> )	-	-	Dari pelaksanaan kegiatan pengawasan jenis ikan yang diliindungi ini dapat disimpulkan hal-hal berikut : - Ditemukan adanya pemanfaatan jenis ikan diliindungi (Lopster) yang merupakan jenis ikan yang diliindungi dengan perlindungan terbatas ukuran. - Pelaku usaha belum memiliki perizinan berusaha, mendukung pelestarian jenis ikan yang diliindungi.	-	√

31	Desa Yensawai, Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya	Solihin Arifin	Lobster ( <i>Panulirus spp</i> ) Kerapu macan ( <i>Epinephelus fuscoguttatus</i> ) kerapu Tikus ( <i>Chromileptes altivelis</i> )	-	-	Dari pelaksanaan kegiatan pengawasan ini dapat disimpulkan hal-hal berikut : - Ditemukan adanya pemanfaatan jenis ikan dilindungi (Lobster) yang merupakan jenis ikan yang dilindungi dengan perlindungan terbatas ukuran. - Pelaku usaha belum memiliki perizinan berusaha, mendukung pelestarian jenis ikan yang dilindungi.	-	√
32	kampong Yenwapnor, Distrik Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya	Derek Mambrasar	Lobster ( <i>Panulirus spp</i> ) Kerapu macan ( <i>Epinephelus fuscoguttatus</i> ) kerapu Tikus ( <i>Chromileptes altivelis</i> )	-	-	Dari pelaksanaan kegiatan pengawasan ini dapat disimpulkan hal-hal berikut : - Ditemukan adanya pemanfaatan jenis ikan dilindungi (Lobster) yang merupakan jenis ikan yang dilindungi dengan perlindungan terbatas ukuran. - Pelaku usaha belum memiliki perizinan berusaha, mendukung pelestarian jenis ikan yang dilindungi.	-	√
33	Pasar Waisai, Kelurahan Soembon, dan Warmasen Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya	Peadagang / Pengepul ikan di pasar Waisai	Hiu Lanjaman/ <i>Charcarinus Falciformis</i> , Teripang Kapok ( <i>Bohadschia mamorata</i> ), Teripang Nanas ( <i>Theleonata ananas</i> ), Pari Lontar/ <i>Rhynchobatus Australiae</i> , Pari kikir/ <i>Glaucostegus Typus</i> , Lobster ( <i>Panulirus spp</i> ) Kerapu macan ( <i>Epinephelus fuscoguttatus</i> ) kerapu Tikus ( <i>Chromileptes altivelis</i> )	-	-	Dari pelaksanaan kegiatan pengawasan jenis ikan yang dilindungi ini dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan sosialisasi pemanfaatan jenis ikan/satwa dilindungi di kota Waisai dan masyarakat paham tentang ketentuan pemanfaatan jenis ikan/satwa dilindungi.	√	-

34	Diatas KM. SABUK NUSANTARA 96, di Dermaga Pelabuhan penumpang kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya	Ditemukan diatas KM. Sabuk Nusantara 96, tidak ada yang mengaku sebagai pemilik	Penyu Hijau ( <i>Chelonia mydas</i> )	-	-	Dari pelaksanaan kegiatan pengawasan jenis ikan yang dilindungi ini dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan pelepasliaran 3 ekor penyu sisik oleh pengawas perikanan di Wilayah Kerja Raja Ampat Dari hasil permintaan keterangan dari penumpang dan ABK kapal, tidak ada penumpang/masyarakat yang mengaku membawa/memiliki penyu tersebut, penyu yang ditemukan kemudian diambil/diamankan agar dapat bertahan hidup di kantor Satuan PoAir Polres Raja Ampat karena berdekatan dengan perairan pesisir.	-	√
35	Waiwo Resort, Distrik Waisai Kota Raja Ampat, kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya		Penyu Belimbing ( <i>Dermochelys coriacea</i> )	-	-	Merupakan tindak lanjut laporan adanya 45 ekor Tukik Penyu Belimbing yang ditemukan di Pantai Waiwo Resort. Menindak lanjut laporan tersebut pengawas, perikanan Wilker PSDKP Raja Ampat berkoordinasi dengan instansi terkait untuk bersama-sama turun ke lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan di lapangan benar adanya ditemukan 45 ekor Tukik Penyu Belimbing di lokasi yang dimaksud. Hasil identifikasi dan pengumpulan informasi dari masyarakat sekitar diketahui bahwa tukik tersebut merupakan tukik yang baru menetas.	√	-

						Hasil Pengawasan Sumberdaya Perikanan yang bukan merupakan barang bukti tindak pidana perikanan, maka pengawas perikanan melakukan perlakuan khusus berupa pelepasliaran ke alam, Pelepasliaran ini dilakukan di Pantai Waiwo Resort		
36	Kampung Rutum, Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya	PT. Putra Raja Bahari Penanggung Jawab Solichin	Lobster ( <i>Panulirus spp</i> )	NIB : 1308230047815	Menteri Infestasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Ditemukan jenis ikan dilindungi didalam keramba milik bapak Solichin, sesuai ukuran ketentuan yang berlaku tetapi belum mempunyai Surat Ijin pemanfaatan jenis ikan (SIPJI), Melaksanakan kegiatan yang memanfaatkan ruang laut berupa keramba jaring apung yang belum dilengkapi dokumen PKKPRL	-	√
37	Jl. Pipit KM. 07 Gunung Kelurahan Malaingkei, Kecamatan Malaimsimsa Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, dengan titik Koordinat 0°53'2,888" S - 131°17'29,569" E	CV. Fadil Nur Bahari Jaya, Penanggung Jawab Azirman	Hiu Lanjaman/ <i>Charcarinus Falciformis</i> , Teripang Kapok ( <i>Bohadschia mamorata</i> ), Teripang Nanas ( <i>Theleonata ananas</i> ), Pari Lontar/ <i>Rhynchobatus Australiae</i> , Pari kikir/ <i>Glaucostegus Typus</i>	9120306201719	Menteri Infestasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Dari hasil pengawan bahwa tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran, pelaku usaha telah memiliki perizinan berusaha, telah memiliki SIPJI No. 84/1/KKP/2021, SAJI No.00424/SAJI/D N/LPSP.L.1/1/2021, Surat Rekomendasi Jenis Ikan Dalam Negeri No.00479/REK/P RL/LPSP.L.1/1/2023	√	-
38	Jl. Ponegoro RT.004 / RW.005, Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, dengan titik Koordinat - 0°51'40,344" LS - 131°14'49,452" BT	UD. Lautan Emas Penanggung jawab Rikki Risman	Hiu Lanjaman/ <i>Charcarinus Falciformis</i> , Hiu Martil/ <i>Sphyrna Lewini</i> , Hiu Martil/ <i>Sphyrna Mokarran</i> , Pari Lontar/ <i>Rhynchobatus Australiae</i> , Pari kikir/ <i>Glaucostegus Typus</i>	9120208281982	Menteri Infestasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Dari hasil pengawan bahwa tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran, pelaku usaha telah memiliki perizinan berusaha, telah memiliki SIPJI No. 84/1/KKP/2021, SAJI No.00424/SAJI/D N/LPSP.L.1/1/2021	√	-

						Surat Rekomendasi Jenis Ikan Dalam Negeri No.00479/REK/PR/L/PSPL.II/2023		
39	Jln. Pertamina, Dusun Belaknag Wamar, Kabupaten Kepulauan Aru	PT. Laut Timur Utama,	Hiu Lanjaman/ <i>Charca rinus Falciformis</i> , Hiu Martil/ <i>Sphyrna Lewini</i> , Hiu Martil/ <i>Sphyrna Mokarran</i> ,	NIB : 8120000961408	Menteri Infestasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Dari Hasil Pengawasan di temukan bahwa kegiatan usaha dengan KBLI 03151 tidak dilaksanakan sehingga direkomendasika n untuk pencabutan kegiatan usaha dimaksud.	√	
40	Jln. Kompleks PPI.Poumako, Distrik Mimika Timur Kab. Mimika Provinsi Papua Tengah dengan titik Koordinat 04.47.48' S dan 1360 46.16" E,	CV.Seafood Sejahtera Papua	Hiu Lanjaman/ <i>Charca rinus Falciformis</i> , Hiu Martil/ <i>Sphyrna Lewini</i> , Hiu Martil/ <i>Sphyrna Mokarran</i> , Pari Lontar/ <i>Rhynchob atus Australiae</i> , Pari kikir/ <i>Glaucostragus Typus</i>	33.21.0001.104.532 05	DJPT (30 Desember 2022)	Tidak ditemukan jenis iianyang dilindungi dalam prsoes pemuatan. Baik lobster maupun jenis ikan lainnya	√	
41	Pelabuhan Perikanan Poumako ,Distrik Mimika Timur Kab. Mimika Provinsi Papua Tengah	Wahono Gozali	Hiu Lanjaman/ <i>Charca rinus Falciformis</i> , Hiu Martil/ <i>Sphyrna Lewini</i> , Hiu Martil/ <i>Sphyrna Mokarran</i> , Pari Lontar/ <i>Rhynchob atus Australiae</i> , Pari kikir/ <i>Glaucostragus Typus</i>			Pengawasan Jenis Ikan dilindungi pada salah satu kapal penangkapan ikan yaitu Km.Sukses Jaya Abadi yang bersandar di Pelabuhan Perikanan Poumako, tidak ditemukan Jenis ikan yang dilindungi dan di atur pengelolaannya	-	√
42	Jl. Hasanuddin, Kelurahan Pasar Sentral, Kecamatan Mimika Baru, Provinsi Papua Tengah	CV.Mutiara Laut Timur	Hiu Lanjaman/ <i>Charca rinus Falciformis</i> , Hiu Martil/ <i>Sphyrna Lewini</i> , Hiu Martil/ <i>Sphyrna Mokarran</i> , Pari Lontar/ <i>Rhynchob atus Australiae</i> , Pari kikir/ <i>Glaucostragus Typus</i>	Nomor Indu Berusaha : 110210004213	Menteri Investasi/BKPM	Tidak ditemukan jenis iianyang dilindungi dalam prsoes pemuatan. Baik lobster maupun jenis ikan lainnya	√	
43	Pelabuhan Perikanan Poumako ,Distrik Mimika Timur Kab. Mimika Provinsi Papua Tengah.	Km. Halogen Star	Hiu Lanjaman/ <i>Charca rinus Falciformis</i> , Hiu Martil/ <i>Sphyrna Lewini</i> , Hiu Martil/ <i>Sphyrna Mokarran</i> , Pari Lontar/ <i>Rhynchob atus Australiae</i> , Pari kikir/ <i>Glaucostragus Typus</i>	Nomor Indu Berusaha : 8120107870498	Menteri Investasi/BKPM	Tidak ditemukan jenis iianyang dilindungi dalam prsoes pemuatan. Baik lobster maupun jenis ikan lainnya	√	

			s Typus					
44	Jl. Kompleks PPI Poumako, Kecamatan Mimika Timur, Provinsi Papua Tengah	UD.Arafura	Hiu Lanjaman/ <i>Charcarinus Falciformis</i> , Hiu Martil/ <i>Sphyrna Lewini</i> , Hiu Martil/ <i>Sphyrna Mokarran</i> , Pari Lontar/ <i>Rhynchobatus Australiae</i> , Pari kikir/ <i>Glaucostege s Typus</i>	Nomor Indu Berusaha : 1287000342048	Menteri Investasi/BKPM	Tidak ditemukan jenis iianyang diliindungi dalam prsoes pemuatan. Baik lobster maupun jenis ikan lainnya	√	
45	Jl. Kompleks PPI Poumako, Kecamatan Mimika Timur, Provinsi Papua Tengah	KM. Hamparan Segara Niaga 8 / PT.Hamparan Segara Artha	Hiu Lanjaman/ <i>Charcarinus Falciformis</i> , Hiu Martil/ <i>Sphyrna Lewini</i> , Hiu Martil/ <i>Sphyrna Mokarran</i> , Pari Lontar/ <i>Rhynchobatus Australiae</i> , Pari kikir/ <i>Glaucostege s Typus</i>	Nomor Indu Berusaha : 1820018011561	Menteri Investasi/BKPM	Tidak ditemukan jenis iianyang diliindungi dalam prsoes pemuatan. Baik lobster maupun jenis ikan lainnya	√	
46	Jl Kompleks PPI Poumako, Kecamatan Mimika Timur, Provinsi Papua Tengah	KM. Mekar Alam B / PT.Perintis Putra Mandiri	Hiu Lanjaman/ <i>Charcarinus Falciformis</i> , Hiu Martil/ <i>Sphyrna Lewini</i> , Hiu Martil/ <i>Sphyrna Mokarran</i> , Pari Lontar/ <i>Rhynchobatus Australiae</i> , Pari kikir/ <i>Glaucostege s Typus</i>	Nomor Indu Berusaha : 0225010051235	Menteri Investasi/BKPM	Tidak ditemukan jenis iianyang diliindungi dalam prsoes pemuatan. Baik lobster maupun jenis ikan lainnya	√	
47	KM.Valent Mina Bahari 3, Dermaga PPI Poumako, Jl Kompleks PPI Poumako, Kecamatan Mimika Timur, Provinsi Papua Tengah	KM.Valent Mina Bahari 3 / H.Muchtar	Hiu Lanjaman/ <i>Charcarinus Falciformis</i> , Hiu Martil/ <i>Sphyrna Lewini</i> , Hiu Martil/ <i>Sphyrna Mokarran</i> , Pari Lontar/ <i>Rhynchobatus Australiae</i> , Pari kikir/ <i>Glaucostege s Typus</i>	Nomor Indu Berusaha :280010211596	Menteri Investasi/BKPM	Tidak ditemukan jenis iianyang diliindungi dalam prsoes pemuatan. Baik lobster maupun jenis ikan lainnya	√	

#### a.5 Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya

Tahun 2023, Pangkalan PSDKP Tual telah melaksanakan pemeriksaan terhadap 2 lembaga yang berkaitan dengan jasa kelautan sebagaimana terlampir.

Tabel 3. 15 Rekap pengawasan Jasa Kelautan

NO	PELAKU USAHA	ALAMAT	JENIS KEGIATAN PEMANFAATAN	DOKUMEN PERIZINAN	MASA BERLAKU	HASIL PENGAWASAN	TAAT	TIDAK TAAT	REKOMENDASI
1.	Raja Home Stay/Serki Dimara	Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat, Kab. Raja Ampat	1. Pembangunan jembatan 2. Wisata Selam	-	-	1. Diketahui bahwa terdapat usaha pemanfaatan jasa kelautan disekitar Kampung Mutus yang belum mempunyai perijinan berusaha tirta lainnya. 2. Terpantaunya kondisi perairan disekitar lokasi usaha wisata Serki Dimara		Tidak taat	1. Mendesak para pelaku usaha agar segera mungkin melengkapi data dan dokumen yang dipersyaratkan dalam pengurusan perijinan berusaha wisata tirta lainnya. 2. Menghubungkan pihak pelaku usaha dengan instansi yang berwenang menerbitkan perijinan berusaha wisata tirta lainnya agar proses pengurusannya lebih efektif.
2.	Nama Usaha : Helda Homestay Nama Perusahaan/ Perorangan : Alfred Ledrik Mayor	Pulau Tamagui, Kampung Mutus Distrik Waigeo, Raja Ampat	1. Pembangunan jembatan 2. Pembangunan bungalow 3. Wisata Selam	-	-	1. Diketahui bahwa terdapat usaha pemanfaatan jasa kelautan disekitar Pulau Tamagui yang belum mempunyai perijinan berusaha tirta lainnya. 2. Terpantaunya kondisi perairan disekitar lokasi usaha wisata Alfred Ledrik Mayor.		Tidak taat	1. Mendesak para pelaku usaha agar segera mungkin melengkapi data dan dokumen yang dipersyaratkan dalam pengurusan perijinan berusaha wisata tirta lainnya. 2. Menghubungkan pihak pelaku usaha dengan instansi yang berwenang menerbitkan perijinan berusaha wisata tirta lainnya agar proses pengurusannya lebih efektif.
3.	Agusta Eco Resort PT. Agusta Marco Montaldo	pulau Agusta kampung Sawandarek distrik Meos Mansar kabupaten Raja Ampat	Menyelam (Diving), Snorkling dan Kayak	NIB : 9120305312 194		1. Ditemukan satu pelaku usaha pemanfaat jasa kelautan di pesisir pulau Agusta yaitu Agusta Eco Resort dan pemanfaatan untuk wisata bahari, 2. Pemanfaatan jasa kelautan oleh PT. Agusta belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Taat		1. Perlunya sosialisasi tentang ketentuan pemanfaatan jasa kelautan di wilayah Raja Ampat karena wilayah Raja Ampat merupakan daerah tujuan wisata alam bahari. 2. Perlunya kerjasama antar instansi terkait agar penataan pemanfaatan Jasa Kelautan yang ada dapat berjalan sesuai ketentuan yang ada.
4.	Nama Usaha : Cove Eco Resort Nama Perusahaan : PT. Waruna Indah Nusantara Penanggung jawab : Rian Tutuho	pulau Yebeu kampung Meos manggara distrik Waigeo Barat kabupaten Raja Ampat	Menyelam (Diving), Snorkling dan Kayak	NIB : 8120104971 609		1. Ditemukan satu pelaku usaha pemanfaat jasa kelautan disektor wisata bahari di pesisir pulau Yebeu dengan nama Cove Eco Resort. 2. Pemanfaatan jasa kelautan oleh PT. Waruna Indah Nusantara belumsesuai dengan ketentuan yang berlaku	Taat		1. Perlunya sosialisasi tentang ketentuan pemanfaatan jasa kelautan di wilayah Raja Ampat karena wilayah Raja Ampat merupakan daerah tujuan wisata alam bahari. 2. Perlunya kerjasama antar instansi terkait agar penataan pemanfaatan Jasa Kelautan yang ada dapat berjalan sesuai ketentuan yang ada

## a.6 Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Pencapaian kinerja sampai dengan periode Tahunan Tahun 2023 diperoleh dari kegiatan Pengawasan terhadap 24 pelaku usaha di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil. Dari sejumlah unit usaha tersebut, masih ada yang belum sesuai ketentuan peraturan perundangan dalam melaksanakan kegiatannya. Terdapat 5 target yang ditetapkan.

Kegiatan pendukung utama pengawasan Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil meliputi pengawasan Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil, dan supervisi kegiatan pengawasan di Satwas dan Wilker lingkup Pangkalan PSDKP Tual. Berikut data pengawasan pelaku usaha di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilaksanakan lingkup Pangkalan PSDKP Tual Tahun 2023.

Tabel 3. 16 Rekap pengawasan PWP3K

No	Pelaku Usaha	Waktu Pengawasan	Lokasi	Jenis kegiatan	Dokumen perizinan
1	Cave Vorganza	21 Maret 2023	kampung Kolser Kec Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara		NIB : 2911220051347 KBLI : 56102 (Rumah Makan/Warung)
2	Melkisedek Tawaerubun	27 Juni 2023	Kampung Warbal Kec Kei Kecil Barat Kab Maluku Tenggara	Wisata Alam	NIB : - KBLI : -
3	Melkisedek Tawaerubun	27 Juni 2023	Kampung Warbal Kecamatan Kei Kecil Barat Kab Maluku Tenggara	Wisata Alam	NIB : - KBLI : -
4	PT. Papua Resort	20 Maret 2023	Jl. Obet Mubalus no 999, Kel Saoka, Kec Maladuni, mes Kota Sorong , Prov Papua Barat	Wisata Bahari	1. NIB : 0230000932444 dengan kode KBLI 93232 taman rekreasi/taman wisata, KBLI 55199 penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya dan KBLI 56101 restoran. 2. PKKPRM Nomor : 3012221051900001, tanggal terbit 30 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. 3. Izin Lokasi : diterbitkan oleh OSS tanggal 25 September 2020.
5	Raja wali laut timur	24 Januari 2023	Pulau Larat Kec Tanimbar Utara Kab Kepulauan Tanimbar	Keramba Jaring Apung	NIB : 9120200161673 KBLI : 46206 Judul KBLI : Perdagangan Besar Hasil Perikanan Penerbit : OSS
6	UD. Sinar Mutiara Tanimbar	22 Februari 2023	Pulau Namwaan Kecamatan Wuarlabobar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Budidaya Tiram Mutiara	NIB : 9120407391693 KBLI : 03215 (pembesaran molusca laut) KBLI : 46206 (perdagangan besar hasil perikanan penerbit : OSS
7	PT. Tanimbar Mutiara Indo Pasifik	17 Maret 2023	Pulau Unggar Kec Wuarlabobar Kab Kepulauan Tanimbar	Budidaya siput mutiara	SIUP : 03/10/SIUP-PT/KP2PM-MTB/2016 penerbit : PTSP MTB Tanggal terbit : 25 Juli 2016
8	Rajawali Laut Timur	27 April 2023	Pulau Matakus Kec Tanimbar Selatan	Keramba Jaring Apung	NIB : 9120200161673 Tanggal Terbit : 17 Januari 2019

9	PT. Tanimbar Mutiara Indopasifik	25 Mei 2023	Pulau Mitak Desa Awear Rumngavur Kecamatan Wuarlabobar Kab Kepulauan Tanimbar	Budidaya Perikanan	Belum Memiliki NIB, dan Ijin pemanfaatan pulau-pulau kecil
10	PT. Tanimbar Mutiara Indopasifik	26 Juni 2023	Dusun Tatuun Desa Ridool Kec Tanimbar Utara Kab Kep Tanimbar titik koordinat 07° 07'27"S - 131°39'35"E	Pembesaran molusca laut	SIUP : 03/010/SIUP/KP2TPM - MTB/2016 Tanggal Terbit : 28 Oktober 2016 Masa Berlaku : 10 November 2021 Penerbit : PTSP Kab MTB
11	CV. Weru	24 Juli 2023	Desa Weratan Kec Wermaktian Kab Kep Tanimbar titik koordinat 07° 31'30"S - 131°01'30"E	Budidaya kerang mutiara	NIB : 2308210012126 Tanggal Terbit : 27 Juni 2022 Masa Berlaku : Selama Usaha Penerbit : OSS
12	PP Tiakur Moa	Senin, 21 Agustus 2023	Desa Tiakur Moa Kab Mauluku Tenggara Barat Daya. Titik Koordinat 08°09'03" S - 127°47'13" E	PP Tiakur	Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut No B.273/MEN-KP/VI/2021 Tanggal Terbit 28 Juni 2021 jangka waktu 2 Tahun Penerbit Menteri Kelautan dan Perikanan
13	PT. Duta Maluku Perkasa	27 September 2023	Desa Ridol Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Kepulauan Tanimbar titik koordinat 07° 08'55"S - 131°43'42"E)	Pembekuan Ikan	NIB : 0707230104892 Tanggal Terbit : 7 Juli 2023 Masa Berlaku : Selama usaha skala usaha : Kecil Penerbit : OSS Modal : PMDN
14	Raja Wali Laut Timur (Pulau Selaru)	Sabtu, 28 Oktober 2023	Desa Namtabung, Kecamatan Selaru titik koordinat 08° 08'04" LS - 130° 56' 31" B	keramba jaring Apung	NIB : 9120200161673 Tanggal Terbit : Masa Berlaku : 2 tahun (harus dilakukan perbaharuan sokumen) Penerbit : OSS
15	Johan Gunawan (perorangan)	Senin, 27 November 2023	Pulau Larat Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar titik koordinat 07° 09'30" S - 131° 42'30" E	keramba jaring Apung	NIB : 0409210014334 Tanggal Terbit : 4 September 2021 Penerbit : OSS
16	PT. Pesona Bumi Beringin	19 Desember 2023	Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar titik koordinat.07°58'05"S - 131°18'11"E	Reklamasi	NIB : 2311220087137 Tanggal Terbit : 8 Juli 2023 Penerbit : OSS
17	Raja 4 Divers	18 Januari 2023	Kampung Kabui Distrik Meos Mansar Kab Raja Ampat	Wisata Alam Perairan/Wisata Bahari	- NIB : 9120204222765 dengan kode KBLI 93242 (wisata selam) tanggal terbit 26 Feb 2019 diterbitkan oleh OSS status penanaman modal (PMA) -Tanda Daftar izin Usaha Pariwisata tanggal terbit 4 Mei 2016, yang diterbitkan oleh OSS
18	PT. Waruna Indah Nusantara	9 Februari 2023	Pulu Yeben Distrik Waigeo Barat	Pariwisata Alam Perairan	NIB : 8120104971609 dengan kode KBLI 93299 (aktifitas hiburan dan rekreasi lainnya ytdl) tanggal terbit 10 September 2018 diterbitkan oleh OSS status penanaman modal (PMA) Izin Lokasi yang terdaftar di OSS Izin Komersial Operasional yang terdaftar di OSS
19	Agusta Eco Resort	18 Maret 2023	Pulau Agusta, Raja Ampat Papua Barat	Wisata Alam Perairan/Wisata Bahari	NIB : 9120305312194 Tanggal Penerbit : 29 Maret 2019 Masa Berlaku : Selama Usaha Ijin Lokasi : Ada Penerbit : OSS
20	Papua Expoler	6 April 2023	Pulau Gam Kampung Yenwapnor Distrik Meos Mansuar, Raja Ampat	Wisata Alam Perairan/Wisata Bahari	NIB : 8120101911203 Tanggal Terbit : 10 September 2018 Masa Berlaku : Selama Usaha Ijin Lokasi : Ada Penerbit : OSS
21	Cendana Indoparls	31 Mei 2023	Kampung Salpelle Teluk Aljui	Budidaya Perikanan	NIB : 8120101932048 ijin pemanfaatan pulau-pulau kecil : belum ada

22	Budidaya Godlif Summury	28 Juni 2023	Kampung Sakabu Distrik Salawati Tengah	Budidaya Perikanan	NIB : 2705220046749 Tanggal Penerbit : 1 Juni 2022 Masa Berlaku : Selama Usaha Penerbit : OSS
23	Papua Paradise	12 Juli 2023	Pulau Birie Kampung Arefi Distrik Bantata Utara, Raja Ampat	Wisata Alam Perairan/Wisata Bahari	NIB : 9120300371036 Tanggal Penerbit : 13 Maret 2019 Masa Berlaku : Selama usaha TDUP : Ada Penerbit : OSS
24	Helda Homestay	8 Agustus 2023	Pulau Tamagui, Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat, Raja Ampat	Wisata Alam Perairan/Wisata Bahari	NIB : - ijin pemanfaatan pulau-pulau kecil : belum ada

### a.7 Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak

Pencapaian kinerja pada Tahun 2023 diperoleh dari kegiatan Pengawasan terhadap 42 unit kapal Pelaku Usaha perikanan yang bebas dari kegiatan *Destructive Fishing*. Dari sejumlah unit usaha tersebut, 42 pelaku usaha telah sesuai ketentuan peraturan perundangan dalam melaksanakan kegiatannya dengan tidak ditemukannya bahan ataupun alat yang merusak dalam kegiatan penangkapan ikan, hal ini tidak menutup kemungkinan adanya pelaku *destructive fishing*. Adapun kendala sampai saat ini Pangkalan PSDKP Tual belum dapat melaksanakan tangkap tangan terhadap kegiatan tersebut dikarenakan kondisi perairan yang terbuka.

Kegiatan pendukung utama pengawasan Pelaku Usaha perikanan yang bebas dari kegiatan *Destructive Fishing* meliputi pengawasan pada kapal – kapal dibawah 10 GT, dan supervisi kegiatan pengawasan di Satwas dan Wilker lingkup Pangkalan PSDKP Tual.

Berikut akan ditampilkan kumpulan data nelayan yang telah diperiksa dalam rangka pengawasan penangkapan ikan merusak :

Tabel 3. 17 Rekap pengawasan DF

No.	Nama Kapal	GT	Penanggung Jawab Kapal / Pemilik		API	SDI	Fisik Ikan Hasil Tangkapan	Lokasi Penangkapan	Satwas
			Nama	Alamat					
1	Longboat / Jukung	1	Sulaiman Silaratubun	Desa Raat, Kab. Maluku Tenggara	Pancing Ulur	Kerapu	Segar	Perairan Selat Rosenberg, Kab. Maluku Tenggara	Pangkalan Tual
2	Longboat / Jukung	1	Usman Rahayaan	Desa Desa Sathean, Kab. Maluku Tenggara	Pancing Ulur	Kerapu	Segar	Perairan Selat Nerong, Kab. Maluku Tenggara	Pangkalan Tual
3	Dhiva Indah 02	3	Jamaluddin	Jl. Cenderawasi, Mimika	Gillnet	Nihil	-	Perairan Mimika	Satwas SDKP Mimika
4	Longboat / Jukung	1	Aryono	Kampung Namatota, Kab. Kaimana	Pancing Ulur	Ikan Demersal (Kakap Putih)	Segar	Perairan Namatota (03°50'964"S – 133°55'864"E)	Satwas SDKP Kaimana

5	Longboat / Jukung	1	Zainudin	Ritabel, Tanimbar Utara, Kepulauan Tanimbar	Pancing Ulur	Ikan Demersal (Kerapu)	Segar	Perairan Pulau Tanimbar	Satwas SDKP MTB
6	Longboat / Jukung	≤ 2	Ridwan	Waisai Kota, Raja Ampat.	Lifnet	Layang	Segar	Perairan Raja Ampat	Wilker PSDKP Raja Ampat
7	Nirwana	3	Syamsu	Jl. Poros Poumako, Mimika	Gillnet	Nihil	-	Perairan Mimika	Satwas SDKP Mimika
8	Longboat / Jukung	1	Badrun Fauriyers	Kampung Namatota, Kec.Kaimana, Kab.Kaimana	Gillnet	Nihil	-	Perairan Namatota (03°50'964"-133°55'864"E)	Satwas Kaimana
9	Putra Buton	2	Tarwih	Jalan Klademak II Pantai sorong	Pancing Ulur	Ikan Cakalang (Skip Jack)	Segar	WPP 717	Satwas Sorong
10	Longboat / Jukung	1	Decky	Ritabel, Tanimbar Utara, Kepulauan Tanimbar	Pancing Ulur	Ikan Kerapu	Hidup	WPP 718	Satwas MTB
11	Longboat / Jukung	≤ 2	Syamsul	Waisai Kota, Raja Ampat.	Lifnet	Layang	Segar	Perairan Raja Ampat	Wilker PSDKP Raja Ampat
12	Longboat / Jukung	≤ 2	Donatus Renyaan	Jln. Utarum kmp. Trikora	Gillnet	Gulama dan Pari	Segar	Perairan Kaimana (03°45'4"S-133°43'37"E)	Satwas SDKP Kaimana
13	PM. Lelemangura	5	Samsualang	Laiwa, RT.003/RW.002, Kec. Manajeng, Kab. Bone, Propinsi Sulawesi Selatan	Handline	Tuna Sirip Kuning	Segar	Bagian Utara Perairan Makbon, Kab. Sorong	Satwas SDKP Sorong
14	KM. Sinar Indah 03	4	Moh. Ali	Jln. Poros Poumako	Gillnet	Nihil	-	Perairan Mimika	Satwas SDKP Mimika
15	Longboat / Jukung	≤ 2	Atit Saputra	Ritabel, Tanimbar Utara, Kepulauan Tanimbar	Pancing Ulur	Kerapu	Hidup	Perairan Saumlaki	Satwas SDKP Maluku Tenggara Barat
16	Longboat / Jukung	≤ 2	Subhan Ngangun	Desa Labetawi, Kec. Dullah Utara, Kota Tual	Pancing Ulur	Nihil	-	Perairan	Pangkalan Tual
17	KM. Dhiva Indah 02	4	Jamaluddin	Jln. Cendrawasih, Timika	Gillnet	Nihil	-	Perairan Mimika	Satwas SDKP Mimika
18	Longboat / Jukung	≤ 2	Lukman	Jl. Trikora Kec. Kaimana, Kab. Kaimana	Rawai Dasar	Kakap merah, kurisi dan Tenggiri	Segar/Normal	Perairan Namatota (3042'2" S – 133033'20" E)	Satwas SDKP Kaimana
19	KM. Aleksander	3	Aleksander Slarmanat	Matakus, Tanimbar Selatan, Kepulauan Tanimbar	Pancing Ulur	Kerapu	Segar/Normal	Perairan Tanimbar / WPP 714	Satwas SDKP Maluku Tenggara Barat
20	Longboat / Jukung	4	Arsad Lomang	Ohoi Citniohoi, Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara	Pancing Ulur	Hiu, GT, Kerapu	Segar/Normal	Perairan Kepulaun Kei	Pangkalan Tual
21	KM. Sinar Indah 04	5	Kalluk	Jl. Poros Poumako	Gillnet	Nihil	-	Perairan Mimika	Satwas SDKP Mimika
22	Longboat / Jukung	≤ 2	Bapak Rappe. B	Jl.Utarum, air mera. Kec. Kaimana Kota, Kab. Kaimana	Rawai Dasar	Ikan Otek	Segar/Normal	Perairan Kaimana (03°49'51"S– 134°7'26"E)	Satwas SDKP Kaimana
23	Longboat / Jukung	4	La Ode Romi	Kecamatan Batu Atas, Buton	Pancing Ulur	Nihil	-	Perairan Kepulaun Kei	Pangkalan Tual
24	KM. Sinar	3	Jamaluddin	Jln. Poros Poumako	Gillnet	Nihil	-	Perairan Mimika	Satwas SDKP Mimika
25	Longboat / Jukung	≤ 2	Armin	Kampung Namatota, Kab. Kaimana	Gillnet	Nihil	-	Perairan Namatota (03°50'964"-133°55'864"E)	Satwas SDKP Kaimana
26	KM. Irmawan Tega	4	Irmawan Tega	Ds. Ruma Salut, Kec. Wer Maktian, Kepulauan Tanimbar	Pancing Ulur	Kerapu, Kakap	Segar/Normal	WPP 714	Satwas SDKP Maluku Tenggara Barat
27	Wina Jaya 1927	10	Aliasa	Ds. Sifnana Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kep. Tanimbar	Pancing Ulur	Nihil	-	WPP 714	Satwas SDKP Maluku Tenggara Barat
28	Longboat / Jukung	≤ 2	Bapak Usman Isro Datty	Jalan Utarum Bantemin Kab. Kaimana	Pancing Ulur	Nihil	-	Perairan Namatota (03°39'21"S– 133°43'35"E)	Satwas SDKP Kaimana

29	Cahaya Novita	4	Tarhan	Jl. Pattimura Timika	Gillnet	Nihil	-	Perairan Mimika	Satwas SDKP Mimika
30	Longboat / Jukung	≤ 2	Ali Iba	Kelurahan Dulan PokPok Kecamatan Pariwari	Pancing Ulur	Kuwe, Kakap	Segar/Normal	Perairan Fak-fak	Wilker PSDKP Fak-fak
31	Longboat / Jukung	≤ 2	Saroso	Kampung Babar, Saumlaki	Pancing Tonda	Ikan Ekor Kuning, Kakap	Segar/Normal	WPP 714	Satwas SDKP Maluku Tenggara Barat
32	Longboat / Jukung	≤ 2	Rohit	Kampung Buton, Raja Ampat	Handline	Tenggiri, Tongkol	Segar/Normal	Perairan Raja Ampat	Wilker PSDKP Raja Ampat
33	Longboat / Jukung	≤ 2	Samuel Onaola	Kampung Babar, Saumlaki	Pancing Ulur	Ikan Ekor Kuning, Kakap	Segar/Normal	WPP 714	Satwas SDKP Maluku Tenggara Barat
34	KM. Sinar Fajar	3	Kardi	Jln. Poros Poumako	Gillnet	Nihil	-	Perairan Mimika	Satwas SDKP Mimika
35	Longboat / Jukung	≤ 2	Baenyamin Rahawarin	Kampung Namatota, Kec. Kaimana, Kab. Kaimana	Pancing Ulur/Tonda	Nihil	-	Perairan Kaimana	Satwas SDKP Kaimana
36	Longboat / Jukung	≤ 2	Anwar	Jl. Yos Sudarso Kelurahan Wagom	Pancing Ulur	Ikan Kuwe, Kakap Merah	Segar/Normal	Perairan Fak-fak	Wilker PSDKP Fak-fak
37	Longboat / Jukung	≤ 2	La Ode Naut	Ds. Oilit Baru, Kec. Tanimbar Selatan, Kepulauan Tanimbar	Pancing Ulur	Nihil		WPP 714	Satwas MTB
38	Longboat / Jukung	≤ 2	Jufri	Jl. Yos Sudarso Kelurahan Wagom	Handline	Nihil			Wilker PSDKP Fak-fak
39	Longboat / Jukung	≤ 2	Bapak Usman Rahareng	Jalan Pedesaan Bumsur, Kab. Kaimana	Gillnet	Ikan Kembang	Segar/Normal	Perairan Kaimana	Satwas Kaimana
40	Longboat / Jukung	≤ 2	Tubias Masela	Ds. Namtabung, Kec. Selaru, Kepulauan Tanimbar	Pancing Ulur	Kerapu	Hidup	WPP 714	Satwas MTB
41	Longboat / Jukung	≤ 2	Dedi Wairiyensi	Kampung. Mai-mai, Kab. Kaimana	Pancing Ulur	Kuwe, Kerapu, trnggiri dan kakap merah	Segar/Normal	Perairan Kaimana	Satwas Kaimana
42	Longboat / Jukung	≤ 2	Amus Lodar	Ds. Namtabung Kec. Selaru, Kab. Kep. Tanimbar	Pancing Ulur	Kerapu	Hidup	WPP 714	Satwas MTB

#### 4. Sasaran Kinerja 4: Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan

Sasaran kinerja ini menurunkan 1 indeks kinerja utama yaitu "Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)" dimana sasaran kinerja ini merupakan sasaran kinerja baru yang menurunkan IKU baru yang baru yang mengakomodir pembentukan Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan.

Tabel 3. 18 Capaian IKU SK. 4

Indikator Kinerja	Capaian					
	2021	2022	Target 2023	2023	%	Renstra
<b>Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)</b>	-	-	100%	100%	100	-

Tabel 3. 19 Perbandingan IKU UPT SK. 4

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Tual	Batam	Jakarta	Bitung	Benoa	Lampulo
SK.4	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan	IKU 6 Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

#### a. IKU 6: Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)

Intelijen ialah kegiatan yaitu segala usaha, tindakan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Data dan informasi intelijen kelautan yaitu data dan informasi yang dikumpulkan oleh Polsus PWP3K atau pihak yang diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi. Penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan yaitu data intelijen yang sudah dalam bentuk produk atau bahan keterangan yang sudah dikumpulkan atau diolah yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penyusunan rencana, kebijakan, dan pengambilan keputusan/ penindakan yang akan ditempuh.

Formula:

$$X_{intl} = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan:

$X_{intl}$  : Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan

$a$  : jumlah data dan informasi intelijen kelautan yang selesai dikumpulkan

$b$  : jumlah data dan informasi intelijen kelautan yang ditargetkan dikumpulkan

IKU ini baru ditetapkan melalui revisi PK ke 2 dan dilaksanakan penilaiannya pada triwulan IV, Pangkalan PSDKP Tual sendiri menargetkan 2 informasi intelijen dan tercapai. Persentase yang diperoleh Pangkalan PSDKP Tual sebesar 100% sehingga IKU dimaksud tercapai dengan hasil yang baik. Analisa keberhasilan dalam pencapaian IKU ini antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan pulbaket atas pelaporan Masyarakat, kegiatan ini perlu dilaksanakan dengan sangat teliti sebagai bentuk konfirmasi atas kebenaran laporan masyarakat, pulbaket kemudian menjadi data informasi intelijen yang dikumpulkan;
2. Pendelegasian tim Polsus PWP3K yang kompeten dalam pelaksanaan tugas dengan memperhatikan asas intelijen, dengan pengetahuan yang mendasar tentang regulasi sehingga pulbaket dapat disandingkan dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun kegiatan yang turut menunjang capaian ini adalah:

1. Kegiatan perencanaan yang mendukung kegiatan intelijen diantaranya penyediaan anggaran dan peralatan pendukung pengawasan;
2. Kegiatan pelaporan dan pengaduan yang telah dijalankan secara efektif.

IKU Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan pada Pangkalan PSDKP Tual diperoleh dari kegiatan:

1. Pulbaket atas kegiatan pengerukan pasir di Mimika;
2. Pulbaket atas pemanfaatan penyu di kepulauan Kei.

## 5. Sasaran Kegiatan 5: Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan

Sasaran kegiatan Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan menurunkan 1 IKU yang ditetapkan Pangkalan PSDKP Tual yaitu "Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Nilai)". IKU ini merupakan IKU lama yang sudah berjalan tahun sebelumnya tetapi memiliki sedikit modifikasi pada nomenklatur tetapi tidak merubah esensi pencapaian IKU dimaksud, Berikut tabelnya.

Tabel 3. 20 Capaian IKU SK. 5

Indikator Kinerja	Capaian					
	2021	2022	Target 2023	2023	%	Renstra
<b>Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Nilai)</b>	100	100	100	100	100	-

Tabel 3. 21 Perbandingan IKU UPT SK. 5

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Tual	Batam	Jakarta	Bitung	Benoa	Lampulo
SK.5	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan	IKU 7 Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Nilai)	100	100	100	100	100	100

**a. IKU 7: Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Nilai)**

IKU Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Nilai) merupakan IKU lama yang merupakan indikator untuk mengukur kinerja Pangkalan PSDKP Tual dalam tugas pengawasan sumber daya perikanan, yang mengalami modifikasi penamaan tapi tidak menghilangkan esensi pencapaiannya. Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan merupakan penjumlahan dari nilai penyelesaian tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan.

Formula:

$$x_{sdp} = \sum_{i=1}^n \frac{(Xi + \dots + Xn)}{n}$$

Keterangan:

- $x_{sdp}$  : Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan  
 $Xi$  : Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan sumber daya perikanan ke-i  
 $n$  : Jumlah komponen objek pengawasan sumber daya perikanan yang diperiksa

Tabel 3. 22 Pemeriksaan IKU 7

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung

3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDP	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Pelaksanaan pengawasan terhadap IKU ini terbagi atas 4 (empat) kegiatan pengawasan diantaranya:

1. Kualitas penyelesaian pemeriksaan kapal penangkap ikan;
2. Kualitas penyelesaian pemeriksaan unit pengolahan ikan;
3. Kualitas penyelesaian pemeriksaan distribusi ikan;
4. Kualitas penyelesaian pemeriksaan budidaya perikanan.

IKU ini dapat dicapai Pangkalan PSDKP Tual dengan nilai yang sangat memuaskan yaitu dengan nilai 100 dan persentasi 100%. Dalam melaksanakan pengawasan yang mendukung IKU ini pengawas perikanan berpedoman kepada Perdirjen 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Bidang Perikanan. IKU ini merupakan IKU yang baru di tetapkan pada triwulan IV dan terdapat perbedaan nomenklatur maupun modifikasi dalam perhitungannya, tetapi tidak menghilangkan esensi pencapaiannya yaitu tahapan pengawasan sesuai perdirjen 6.

Perdirjen tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan IKU persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Tual secara teknis, dan terdapat berbagai peraturan lainnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan yang erat hubungannya dengan IKU persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Tual. Adapun analisa penyebab keberhasilan diantaranya;

1. Melengkapi Pengawas Perikanan dengan sarana dan pengawasan yang memadai dalam menjalankan tugas sehingga tugas menjadi optimal, semisal penggunaan vernier caliper, alat transportasi, kamera bawah air, dll;
2. Membangun komunikasi yang baik dengan *stakeholder* sehingga pengawasan dapat berjalan dengan lancar, hal ini dimaksudkan pengawas perikanan harus memiliki kemampuan verbal yang baik sehingga penyampaian pesan dan maksud serta tujuan pengawasan dapat dipahami dengan baik, serta meminimalisir konflik mengingat kegiatan pengawasan berpotensi mewajibkan pengawasan perikanan berinteraksi dengan berbagai kalangan masyarakat dengan berbagai latar belakang;

3. Melakukan rapat perencanaan yang baik terkait objek pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dikarenakan informasi dan persiapan telah ditetapkan pada saat kegiatan perencanaan;
4. Mengumpulkan informasi pendahuluan yang bersumber dari kegiatan pengawasan sebelumnya ataupun dari informasi yang telah dikumpulkan pengawas perikanan dari masyarakat atau dari dinas terkait tentang unit yang akan diawasi;
5. Melakukan pemantapan terhadap peraturan yang berhubungan langsung dengan objek pengawasan, seperti internalisasi regulasi maupun kebijakan terbaru yang telah ditetapkan;
6. Melakukan *sharing session* dengan dinas terkait guna menyamakan persepsi dan penguasaan kondisi terhadap objek pengawasan sehingga tidak ada benturan ketika pengawasan dilaksanakan;
7. Memenuhi tahapan pelaksanaan sebagaimana yang termuat dalam informasi indikator kinerja.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan juga dihadapkan dengan berbagai masalah yang menghambat diantaranya:

1. Masih terdapat kendala dalam pelayanan secara online;
2. Masih banyak *stakeholder* yang belum familiar dengan penggunaan aplikasi online dalam pelayanan.

Sepanjang tahun 2023 Pangkalan PSDKP Tual memperoleh target sebesar 139 dalam pemenuhan IKU dimaksud dengan capaian 177 yang telah diperiksa. Pengawasan sumber daya perikanan yang kegiatannya mendukung pencapaian IKU ini turut menyumbang realisasi sebesar 98,15% atau sebesar Rp726.306.585,- dari total pagu yang dianggarkan sebesar Rp740.000.000,-.

Kegiatan yang menunjang dalam pencapaian IKU ini diantaranya;

1. Pelaksanaan internalisasi dan sosialisasi terkait regulasi terkini;
2. Melengkapi petugas dengan peralatan memadai yang menunjang pengawasan;
3. Melakukan perencanaan dan revisi atas perubahan kegiatan atau adanya penambahan yang siatnya urgent.

#### **a.1 Kualitas penyelesaian pemeriksaan kapal penangkap ikan**

Kualitas penyelesaian pemeriksaan kapal perikanan dalam kurun waktu sampai dengan Tahunan tahun 2023 telah melaksanakan pemeriksaan kepada 43 pelaku usaha, yang terbagi di Pangkalan PSDKP Tual maupun di satwas. Salah satu kendala dalam pemeriksaan

ini adalah banyaknya kapal perikanan yang melakukan penangkapan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual namun tidak berkantor pada wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual

Tabel 3. 23 Pengawasan penangkapan kapal perikanan

No.	KBLI	Nama Perusahaan	Nomor Induk Berusaha	Provinsi	Risiko	Standar Usaha yang Dimiliki	Rekomendasi
1	03111	La Kamaludin	9120001621752	Maluku	Menengah Rendah	NIB, Surat Ukur Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar, Sertifikasi Kelaikan Kapal Perikanan, Sertifikat Kecakapan Nelayan	Perlu dilakukan pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaku usaha, diantaranya mendorong pelaku usaha untuk mengurus buku kapal perikanan, membuat surat perjanjian kerja laut, mengisi loog book dan mengikutkan pelatihan kepada ABK untuk memiliki sertifikat Cara Pengolahan Ikan yang Baik (CPIB)
2	03111	PT. ARNESH SAMUDRA JAYA	0220103122493	Papua	Tinggi	NIB, Surat Ukur Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar, Sertifikasi Kelaikan Kapal Perikanan,	Perlu adanya sertifikasi keahlian teknis untuk ABK (Kelasi, Operator mesin pendingin, juru minyak, juru masak); 2. Agar segera melengkapi dokumen sertifikat Cara Penanganan ikan yang Baik karena dari 2 (dua) belum memiliki sertifikat CPIB;
3	50133	IHSAN	1711210030564	Papua	Tinggi	NIB, Surat Ukur Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar, Sertifikasi Kelaikan Kapal Perikanan, Sertifikat Kecakapan Nelayan, Surat Keterangan Aktivasi Transmitter	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha, Perlu adanya sertifikasi keahlian teknis untuk ABK (Kelasi, Operator mesin pendingin, juru minyak, juru masak), Agar segera melengkapi dokumen sertifikat Cara Penanganan ikan yang Baik karena belum memiliki sertifikat CPIB
4	03111	DELSY CRISTY LINDA WERLUKEN	1204000132086	Papua	Tinggi	NIB, Surat Ukur Kapal Perikanan, Buku Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar, Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan, Sertifikat Kecakapan Nelayan,	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
5	03111	ARSADY	9120006241691	Maluku	Menengah Rendah	NIB, Surat Ukur Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar, Sertifikasi Kelaikan Kapal Perikanan, Sertifikat Kecakapan Nelayan	Perlu dilakukan pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaku usaha, diantaranya mendorong pelaku usaha untuk membuat surat perjanjian kerja laut, mengisi log book dan mengikutkan pelatihan kepada ABK untuk memiliki sertifikat Cara Pengolahan Ikan yang Baik (CPIB).
6	03111	CV. ENAM BERSAUDARA MANOHA	2112210037848	Maluku	Tinggi	NIB	Perlu dilakukan pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaku usaha, diantaranya mendorong pelaku usaha untuk melakukan revisi penyampaian informasi terkait modal usaha dan sarana prasarana dan rencana kegiatan yang benar-benar akan dilaksanakan

7	03111	LIEM SENG WIE	0220003183104	Maluku	Tinggi	NIB, Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan, Surat Ukur Dalam Negeri, Surat Izin Usaha Perikanan, Surat Keterangan Aktivasi Transmitter, Surat Persetujuan Berlayar,	Perlu adanya sertifikasi keahlian teknis untuk ABK (Kelasi, Operator mesin pendingin, juru minyak, juru masak);
8	03111	CE KIM ROSTAM	0235011201754	Jakarta	Tinggi	NIB, Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan, Surat Keterangan Aktivasi Transmitter, Pas Besar, Surat Ukur dalam Negeri, Standar Laik Operasi, Surat Persetujuan Berlayar, Sertifikat ANKAPIN III, Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan,	Perlu adanya sertifikasi keahlian teknis untuk ABK Kelasi, or mesin pendingin, juru minyak, juru masak); Agar segera melengkapi dokumen sertifikat Cara Penanganan ikan yang Baik karena belum memiliki sertifikat CPIB
9	50133	PT. SONOK LESTARI MAS	9120001282619	Sulawesi Utara	Tinggi	NIB, Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan Hidup Antar tempat Pembudidayaan Ikan, Surat Keterangan Aktivasi Transmitter, Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Tingkat III	Membuat perjanjian kerjasama dengan nelayan (pembudidaya kecil) sesuai ketentuan yang berlaku, Perlunya peningkatan sertifikasi keahlian teknis untuk ABK (Kelasi, juru minyak, juru masak), Agar segera melengkapi dokumen sertifikat Cara Penanganan ikan yang Baik karena belum memiliki sertifikat CPIB
10	03111	AHMAD FAUZI	9120010090278	Papua Selatan	Tinggi	NIB, Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI, Pas Besar, Surat Keterangan Aktivasi Transmitter, Surat Persetujuan Berlayar,	Perlu adanya sertifikasi keahlian teknis untuk ABK (Kelasi, Operator mesin pendingin, juru minyak, juru masak); Agar segera melengkapi dokumen sertifikat Cara Penanganan ikan yang Baik karena dari 2 (dua) belum memiliki sertifikat CPIB;
11	03111	PT. INSANI GEMILANG PUALAM	8120104952856	Maluku	Tinggi	NIB, Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI, Pas Besar, Surat Keterangan Aktivasi Transmitter, Surat Persetujuan Berlayar,	Perlu pemenuhan sertifikat bagi awak kapal perikanan sebelum 1 Januari 2024, Perlu adanya pelatihan untuk sertifikasi BST-F (Basic Safety Training Fisheries)
12	03111	HAERIA	2110210002349	Papua Tengah	Tinggi	NIB, Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan dan pengangkutan ikan, Surat Ukur Dalam Negeri, Pas Besar, SKK 60 Mil,	Perlu adanya sertifikasi keahlian teknis untuk ABK (kelasi, operator mesin pendingin, juru minyak, juru masak); Agar segera melengkapi dokumen sertifikat Cara Penanganan ikan yang Baik (CPIB) belum memiliki sertifikat CPIB;

13	03111	UD. TRI SAMUDRA PAPUA	0220100833115	Papua Selatan	Tinggi	NIB, Perizinan Berusaha	Untuk Segera menggantikan/merubah KBLI 03111 ke KBLI 47215 karena kegiatannya hanya sebagai penampung ( Gelembung); 2. Belum memenuhi Persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
14	03111	PT. INDUSTRI PERIKANAN NAMATOTA	9120010110054	Papua Barat	Tinggi	NIB, Perizinan Berusaha, SIUP, SKK 60 mil, Sertifikat ANKAPIN III, Sertifikat Keterampilan BST	Perlu dilakukan pengwasan lapangan terhadap kapal-kapal yang dimiliki agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
15	50133	PT. INDUSTRI PERIKANAN NAMATOTA	9120010110054	Papua Barat	Tinggi	NIB, Perizinan Berusaha, SIUP, SKK 60 mil, Sertifikat ANKAPIN III, Sertifikat Keterampilan BST	Perlu dilakukan pengwasan lapangan terhadap kapal-kapal yang dimiliki agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
16	03111	PT. INSANI GEMILANG PUALAM	8120104952856	Maluku	Tinggi	NIB, Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI, Pas Besar, Surat Keterangan Aktivasi Transmitter, Surat Persetujuan Berlayar,	Perlu pemenuhan sertifikat bagi awak kapal perikanan sebelum 1 Januari 2024, Perlu adanya pelatihan untuk sertifikasi BST-F (Basic Safety Training Fisheries)
17	03111	PT. INSANI GEMILANG PUALAM	8120104952856	Maluku	Tinggi	NIB, Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI, Pas Besar, Surat Keterangan Aktivasi Transmitter, Surat Persetujuan Berlayar,	Perlu pemenuhan sertifikat bagi awak kapal perikanan sebelum 1 Januari 2024, Perlu adanya pelatihan untuk sertifikasi BST-F (Basic Safety Training Fisheries)
18	03111	PT. INSANI GEMILANG PUALAM	8120104952856	Maluku	Tinggi	NIB, Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI, Pas Besar, Surat Keterangan Aktivasi Transmitter, Surat Persetujuan Berlayar,	Perlu pemenuhan sertifikat bagi awak kapal perikanan sebelum 1 Januari 2024, Perlu adanya pelatihan untuk sertifikasi BST-F (Basic Safety Training Fisheries)
19	03111	PT. INSANI GEMILANG PUALAM	8120104952856	Maluku	Tinggi	NIB, Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI, Pas Besar, Surat Keterangan Aktivasi Transmitter, Surat Persetujuan Berlayar,	Perlu pemenuhan sertifikat bagi awak kapal perikanan sebelum 1 Januari 2024, Perlu adanya pelatihan untuk sertifikasi BST-F (Basic Safety Training Fisheries)
20	03111	PT. INSANI GEMILANG PUALAM	8120104952856	Maluku	Tinggi	NIB, Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI, Pas Besar, Surat Keterangan Aktivasi Transmitter, Surat Persetujuan Berlayar,	Perlu pemenuhan sertifikat bagi awak kapal perikanan sebelum 1 Januari 2024, Perlu adanya pelatihan untuk sertifikasi BST-F (Basic Safety Training Fisheries)
21	50133	R P RADITYA	1711210022247	Papua Barat Daya	Tinggi	NIB, Perizinan Berusaha subsektor Pengangkutan Ikan Hidup antar Tempat Pembudidayaan Ikan	Membuat perjanjian kerjasama dengan nelayan (pembudidaya kecil) sesuai ketentuan yang berlaku, Perlunya peningkatan sertifikasi keahlian teknis untuk ABK (Kelasi, juru minyak, juru masak);

22	03111	PT. DWI BINA UTAMA	9120201772324	Papua Barat Daya	Tinggi	NIB, Perizinan Berusaha subsektor penangkapan dan pengangkutan ikan, NPWP, SKAT VMS, Pas Besar, Surat Ukur Internasional, Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan, Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal, Stasiun Radio Kapal Laut, Sertifikat klasifikasi lambung, SIOPSUS, Sertifikat ANKAPIN II, Surat Laut,	Perlu adanya sertifikasi keahlian teknis untuk Awak Kapal (Kelasi, Operator mesin pendingin, juru minyak, juru masak); Agar dilengkapi dokumen sertifikat Cara Penanganan ikan yang Baik/HCCP pada Awak Kapal yang belum memiliki.
23	03112	PT. DWI BINA UTAMA	9120201772324	Papua Barat Daya	Tinggi	NIB, Perizinan Berusaha subsektor penangkapan dan pengangkutan ikan, NPWP, SKAT VMS, Pas Besar, Surat Ukur Internasional, Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan, Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal, Stasiun Radio Kapal Laut, Sertifikat klasifikasi lambung, SIOPSUS, Sertifikat ANKAPIN II, Surat Laut,	Perlu adanya sertifikasi keahlian teknis untuk Awak Kapal (Kelasi, Operator mesin pendingin, juru minyak, juru masak); Agar dilengkapi dokumen sertifikat Cara Penanganan ikan yang Baik/HCCP pada Awak Kapal yang belum memiliki.
24	03113	PT. DWI BINA UTAMA	9120201772324	Papua Barat Daya	Tinggi	NIB, Perizinan Berusaha subsektor penangkapan dan pengangkutan ikan, NPWP, SKAT VMS, Pas Besar, Surat Ukur Internasional, Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan, Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal, Stasiun Radio Kapal Laut, Sertifikat klasifikasi lambung, SIOPSUS, Sertifikat ANKAPIN II, Surat Laut,	Perlu adanya sertifikasi keahlian teknis untuk Awak Kapal (Kelasi, Operator mesin pendingin, juru minyak, juru masak); Agar dilengkapi dokumen sertifikat Cara Penanganan ikan yang Baik/HCCP pada Awak Kapal yang belum memiliki.
25	03111	KOPERASI NELAYAN DAN PERIKANAN MINA MARITIM (KAMARUDDIN)	9120001920394	Papua Selatan	Tinggi	NIB, Perizinan Berusaha, Struktur Organisasi, Akta Pendirian Koperasi, Akta Notaris Koperasi, Surat Ukur Dalam Negeri, Pas Besar	Perlu adanya sertifikasi keahlian teknis untuk ABK (Kelasi, Operator mesin pendingin, juru minyak, juru masak); Agar segera melengkapi dokumen sertifikat Cara Penanganan ikan yang Baik karena belum memiliki sertifikat CPIB;
26	03111	SUTIMAN TASRIPIN	0242010221479	Papua Tengah	Tinggi	NIB, SIUP, Perizinan Berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI, Surat Keterangan Aktivasi Transmitter, ANKAPIN III, ATKAPIN III/Buku Pelaut, Sertifikat BST, Surat ukur Internasional, Pas Besar, SKK 60 mil, Sertifikat kelaikan kapal perikanan,	Perlu adanya sertifikasi keahlian teknis untuk ABK (Kelasi, Operator mesin pendingin, juru minyak, juru masak); Agar segera melengkapi dokumen sertifikat Cara Penanganan ikan yang Baik karena belum memiliki sertifikat CPIB;

27	50133	HARDHA DEDALI POERNOMO PUTRA	301220024604	Papua Barat Daya	Tinggi	NIB, Perizinan Berusaha, SKAT, Peretujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP), E-BKP, Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal, Sertifikat Kelaikan kapal Perikanan, Sertifikat ANT Tingkat III Manajemen, Sertifikat ANT Tingkat IV, Sertifikat ANT Tingkat V Manajemen, Sertifikat ATT Tingkat IV Manajemen, Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan, Sertifikat Keterampilan Rating as able seafarer deck, Sertifikat Keterampilan Rating as able seafarer engine	Membuat perjanjian kerjasama dengan nelayan (pembudidaya ikan) sesuai ketentuan yang berlaku; Perlu nya perubahan sertifikasi Nahkoda dan perwira kapal serta peningkatan sertifikasi keahlian teknis untuk ABK (Kelasi, juru minyak, juru masak); Agar segera melengkapi dokumen sertifikat Cara Penanganan ikan yang Baik karena belum memiliki sertifikat CPIB.
28	03111	PT. HAMPARAN SEGARA ARTHA	8120018011561	Papua Tengah	Tinggi	NIB, SIUP, Perizinan Berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI, Surat Keterangan Aktivasi Transmitter, Surat Ukur Dalam Negeri, Pas Besar, Sertifikat ANKAPIN III, BST, SKK 60 mil, Sertifikat kelaikan kapal perikanan, sertifikat perangkat radio telekomunikasi,	Telah memenuhi persyaratan teknis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan
29	03111	NURYANTO	0908210008512	Papua Selatan	Tinggi	NIB, Pas Besar, SIUP, Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI, SIUP, Surat Ukur Dalam Negeri, NPWP	Perlu adanya sertifikasi keahlian teknis untuk ABK (Kelasi, Operator mesin pendingin, juru minyak, juru masak); Agar segera melengkapi dokumen sertifikat Cara Penanganan ikan yang Baik karena belum memiliki sertifikat CPIB;
30	03111	HUI ENG	9120101161256	Maluku	Menengah Rendah	NIB, Perizinan Berusaha, Log Book, Surat perjanjian kerja laut, sertifikat cara pengolahan ikan yang baik	Perlu dilakukan pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaku usaha, diantaranya mendorong pelaku usaha untuk membuat surat perjanjian kerja laut, mengisi log book dan mengikutkan pelatihan kepada ABK untuk memiliki sertifikat Cara Pengolahan Ikan yang Baik (CPIB).
31	03111	DRS SANAJI	1911210013418	Papua Tengah	Tinggi	NIB, Perizinan Berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI, SKAT, Sertifikat Kelaikan, Persyaratan Perlengkapan Kelaikan Kapal Perikanan, E-BKP, Pas Besar, Surat Ukur Dalam Negeri	Perlu adanya sertifikasi keahlian teknis untuk ABK (Kelasi, Operator mesin pendingin, juru minyak, juru masak)

32	03111	ISMAEL DAENG	2401220059248	Papua Selatan	Tinggi	NIB, Perizinan Berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI, SKAT, Sertifikat Kelaikan, Persyaratan Perlengkapan Kelaikan Kapal Perikanan, E-BKP, Pas Besar, Surat Ukur Dalam Negeri	Telah memenuhi Persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
33	03111	KENNEDY	1247000201374	Papua Selatan	Tinggi	NIB,	Telah memenuhi Persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
34	03111	DIRON	8120100840192	Papua Tengah	Tinggi	NIB, SIUP, Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan, SKAT, Surat Ukur Kapal, Pas Besar, Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan, Buku Kapal Perikanan, SKK 60 mil, Perjanjian Kerja Laut	Telah memenuhi Persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
35	03111	HUSEIN	9120005411821	Maluku	Tinggi	NIB, NPWP, SLO dan SPB,	Perlu dilakukan pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaku usaha, diantaranya mendorong pelaku usaha untuk membuat surat perjanjian kerja laut, mengisi log book dan mengikutkan pelatihan kepada ABK untuk memiliki sertifikat Cara Pengolahan Ikan yang Baik (CPIB).
36	03111	PT. MANUNGGAL SUKO JAYA	9120009912352	Papua Barat Daya	Tinggi	NIB, SIUP, Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPP NRI, SKAT VMS, E-BKP, Surat Ukur, Pas Besar, Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan	Perlu adanya sertifikasi keahlian teknis untuk awak kapal (kelasi, operator mesin pendingin, juru minyak, juru masak); Agar dilengkapi dokumen sertifikat Cara Penanganan ikan Yang Baik (CPIB)/HCCP pada awak kapal yang belum memiliki
37	03111	PT. MANUNGGAL SUKO JAYA	9120009912352	Papua Barat Daya	Tinggi	NIB, SIUP, Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPP NRI, SKAT VMS, E-BKP, Surat Ukur, Pas Besar, Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan	Perlu adanya sertifikasi keahlian teknis untuk awak kapal (kelasi, operator mesin pendingin, juru minyak, juru masak); Agar dilengkapi dokumen sertifikat Cara Penanganan ikan Yang Baik (CPIB)/HCCP pada awak kapal yang belum memiliki
38	03111	PT. CAHAYA KHARISMA TIMUR	9120109541044	Papua Tengah	Tinggi	NIB, SIUP, Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan, SKAT VMS, Surat Ukur, Pas Besar	Perlu adanya sertifikasi keahlian teknis untuk ABK (Kelasi, Operator mesin pendingin, juru minyak, juru masak); Agar segera melengkapi dokumen sertifikat Cara Penanganan ikan yang Baik karena belum memiliki sertifikat CPIB;
39	03111	M. MAULANA SAFARI	2507220067302	Papua Selatan	Tinggi	NIB, SIUP, Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan, SKAT VMS, Surat Ukur, Pas Besar	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan karena kegiatannya hanya sebagai penampung ( Gelembung)
40	03111	MULYONO	1240000713305	Papua Selatan	Tinggi	NIB, SIUP, Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan, SKAT VMS, Surat Ukur, Pas Besar	1. Untuk Segera menggantikan atau merubah Perpanjangan SIPI Kapal Yamane; 2. Telah memenuhi Syarat (TMS)

41	03111	ACENG SUMARLIN	1908220046891	Papua Selatan	Tinggi	NIB, SIUP, Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan, SKAT VMS, Surat Ukur, Pas Besar	Telah memenuhi Persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
42	03111	PT. PERIKANAN INDONESIA	2312210030696	Papua Barat	Tinggi	-	Tidak memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha pada KBLI '03111 (penangkapan Pisces/ikan bersirip di laut) dengan lokasi proyek papua barat, karena tidak memiliki armada kapal penangkap ikan dan tidak melakukan aktivitas kegiatan penangkapan sehingga direkomendasikan untuk dilakukan perbaikan (dinonaktifkan)
43	03111	PT. HANSEN MINA JAYA	9120013280936	Maluku	Tinggi	NIB, PKKPR darat	Pencabutan kegiatan usaha KBLI (03111) Penangkapan Pisces/ikan Bersirip di laut milik PT. Hansen Mina Jaya dari Perizinan Berusaha melalui OSS

## a.2 Kualitas penyelesaian pemeriksaan unit pengolahan ikan

Pengawasan terhadap UPI dilaksanakan selama Tahun 2023 kepada 46 Pengusaha dengan metode pengawasan rutin maupun insidental. Berikut disajikan dalam tabel:

Tabel 3. 24 Rekap Pengawasan Pengolahan

No	UPT/ Satwas	(KBLI)	Nama Perusahaan/Perorangan	NIB	Provinsi	Standar Usaha yang Dimiliki	Status
1	Satwas Kaimana	10213	Gatot Riyanto	9120118073505	Papua Barat	NIB, SKP	Insidental
2	Satwas Kaimana	10217	Gatot Riyanto	9120118073505	Papua Barat	NIB, SKP	insidental
3	Satwas Maluku Tenggara Barat	10213	Ahmad Robin	811220006895	Maluku	NIB	Insidental
4	Satwas Kaimana	03133	PT. Over Seas Seafood	1209000720569		NIB	OSS
5	Satwas Merauke	10213	PT. Perikanan Indonesia	8120110232884	Papua	NIB, SKP, Izin Usaha	Insidental
6	Satwas Merauke	10217	PT. Perikanan Indonesia	8120110232884	Papua	NIB, SKP, Izin Usaha	Insidental
7	Satwas Sorong	10293	UD.Sumber Windu	8120118261832	Papua Barat	NIB, SKP	Insidental
8	Satwas Kaimana	10213	PT. Harda Indo Perkasa	9120104311548	Papua Barat	NIB, SKP, HACCP, PKKPR, Sertifikat Standar, SPPL	OSS
9	Satwas Kaimana	10213	PT. Industri Perikanan Namatota	9120010110054	Papua Barat	NIB, SKP, PKKPR, Persetujuan Lingkungan, Sertifikat Standar	Insidental
10	Satwas Kaimana	10219	PT. Industri Perikanan Namatota	9120010110054	Papua Barat	NIB, SKP, PKKPR, Persetujuan Lingkungan, Sertifikat Standar	Insidental
11	Satwas Sorong	10213	PT. Bina Nelayan Jaya	220107231847	Papua Barat	NIB, SKP, HACCP, PKKPR, Sertifikat Standar, Persetujuan Lingkungan	Insidental
12	Satwas Maluku Tenggara Barat	10211	PT. Enam Bersaudara Manoha	2112210037848	Maluku	NIB, Sertifikat Standar	Insidental
13	Satwas Maluku Tenggara Barat	10213	PT. Enam Bersaudara Manoha	2112210037848	Maluku	NIB, Sertifikat Standar	Insidental
14	Satwas Maluku Tenggara Barat	10217	PT. Enam Bersaudara Manoha	2112210037848	Maluku	NIB, Sertifikat Standar	Insidental
15	Satwas Merauke	10213	PT. Mitra Timur Raya Tama	9120310131255	Papua	NIB, SKP,	Insidental
16	Satwas Sorong	10293	UD. Piala	8120118251535	Papua Barat	NIB, SKP, Sertifikat Standar	Insidental
17	Satwas Sorong	10213	PT. YFIN	8120005861765	Papua Barat	NIB, SKP, Sertifikat Standar	Insidental
18	Satwas Maluku Tenggara Barat	10213	Nasri (perorangan)	8120102801461	Papua	NIB	Insidental
19	Pangkalan PSDKP Tual	10293	PT. Samudera Indo Sejahtera	8120103840915	Maluku	NIB, Sertifikat Standar, SKP, HACCP, Amdal	Insidental
20	Wilker Dobo	10213	CV. Anugerah Bahari Mandiri	8120315131496	Maluku	NIB, Sertifikat Standar, SKP, UKL UPL/SPPL	Insidental
21	Wilker Dobo	10293	CV. Anugerah Bahari Mandiri	8120315131496	Maluku	NIB, Sertifikat Standar, SKP, UKL UPL/SPPL	Insidental
22	Satwas Kaimana	10293	PT. Industri Perikanan Namatota	9120010110054	Papua Barat	NIB, Sertifikat Standar, SKP	Insidental
23	Satwas Kaimana	10414	PT. Industri Perikanan Namatota	9120010110054	Papua Barat	NIB, Sertifikat Standar, SKP	Insidental
24	Satwas Maluku Tenggara Barat	10213	Hariyanto (Perorangan)	3108220051219	Maluku Tenggara Barat	NIB, sertifikat Standar	Insidental
25	Wiler Fakfak	10213	PT. Marine Gratia	1219000322726	Papua	NIB, Sertifikat Standar	Insidental
26	Satwas Mimika	10213	UD. Arafura	1287000342048	Papua	NIB, Sertifikat Standar, SKP	Insidental
27	Satwas Kaimana	10217	PT. Holi Mina Jaya	8120312042393	Papua Barat	NIB, Sertifikat Standar, SKP, PKKPR, UKL-UPL, Persetujuan Lingkungan	Insidental
28	Satwas Kaimana	10213	PT. Holi Mina Jaya	8120312042393	Papua Barat	NIB, Sertifikat Standar, SKP, PKKPR, UKL-UPL, Persetujuan Lingkungan	Insidental
29	Satwas Kaimana	10293	PT. Holi Mina Jaya	8120312042393	Papua Barat	NIB, Sertifikat Standar belum	Insidental

						terbit (kegiatan usaha berlaku efektif sebelum UU Cipta Kerja Terbit), SKP, PKKPR, UKL-UPL, Persetujuan Lingkungan	
30	Pangkalan PSDKP Tual	10213	PT. Bintang Karya Sejati	9120201482142	Maluku	NIB, Sertifikat Standar, SKP, Persetujuan Lingkungan, SPPL	Insidental
31	Wilker Dobo	10213	PT. Darna Aru Mina	220001271425	Maluku	NIB, SKP	Insidental
32	Wilker Dobo	10293	PT. Darna Aru Mina	220001271425	Maluku	NIB, SKP	Insidental
33	Satwas Merauke	10216	UD. Baciboo	1223000712498	Papua Selatan	NIB, Sertifikat Standar, SKP	Insidental
34	Satwas Sorong	10213	PT. Marina Sorong Indomesia	220003381609	Papua Barat	NIB, Sertifikat Standar, SKP, SPPL, PKKPR	OSS
35	Satwas Sorong	10293	UD. Piala	8120118251535	Papua Barat	NIB, SKP, Sertifikat Standar	Insidental
36	Satwas Maluku Tenggara Barat	10213	Hui Eng	9120101161256	Maluku	NIB, Sertifikat Standar	Insidental
37	Wiler Fakfak	10213	PT. Indoprima Utama Mina	9120001272067	Papua Barat	NIB, SKP, Sertifikat Standar	Insidental
38	Satwas Merauke	10213	Mitra Timur Rayatama	9120310131255	Papua Selatan	NIB, Sertifikat Standar, Izin Lingkungan, SPPL	Insidental
39	Satwas Kaimana	10213	Gatot Riyanto	9120118073505	Papua Barat	NIB, SKP	Insidental
40	Satwas Merauke	10216	Hasnawati	51020044982	Papua Selatan	NIB	Insidental
41	Satwas Mimika	10213	Usman S	0219010140529	Papua Tengah	NIB, Sertifikat Standar, SPPL	Insidental
42	Satwas Mimika	10217	Usman S	0219010140529	Papua Tengah	NIB, Sertifikat Standar, SPPL	Insidental
43	Satwas Maluku Tenggara Barat	10213	PT. Rasyid Lintas Bahari	0811220006895	Maluku	NIB	Insidental
44	Satwas Kaimana	10293	Ronal Wiradinata	1609210048809	Papua Barat	NIB, Sertifikat Standar	Insidental
45	Satwas Kaimana	10213	PT. Elitism International Papua	9120013020893	Papua Barat	NIB, Sertifikat Standar, SIUP, Izin Lokasi, Izin Lingkungan, SKP, SPPL	Insidental
46	Satwas Kaimana	10293	PT. Elitism International Papua	9120013020983	Papua Barat	NIB, Sertifikat Standar, SIUP, Izin Lokasi, Izin Lingkungan, SKP, SPPL	Insidental

### a.3 Kualitas penyelesaian pemeriksaan distribusi ikan

Pengawasan terhadap distribusi dilaksanakan pada Tahun 2023 kepada 44 Pengusaha dengan metode pengawasan rutin maupun insidental. Berikut disajikan dalam tabel:

Tabel 3. 25 Rekap Pengawasan Distribusi/ Pemasaran

No	UPT/ Satwas	KBLI	Nama Perusahaan	Nomor Induk Berusaha	Nomor Kode Proyek	Status
1	Satwas Kaimana	47215	Gatot Riyanto	9120118073505	-	Insidental
2	Satwas Merauke	47215	UD. Nelayan Barokah	267010102703	-	Insidental
3	Satwas Mimika	46206	CV. Seefood Sejahtera Papua	1239000202578	-	Insidental
4	Satwas Mimika	46324	CV. Seefood Sejahtera Papua	1239000202578	202102-2709-5437-2181-364	Insidental
5	Satwas Maluku Tenggara Barat	47215	Ahmad Robin	811220006895	-	Insidental
6	Satwas Maluku Tenggara Barat	46324	PT. Fuzhiyuan Aquatic Trading	2306220032557	202206-2311-1244-3125-081	OSS
7	Satwas Maluku Tenggara Barat	46206	PT. Fuzhiyuan Aquatic Trading	2306220032557	202206-2311-2602-3506-234	OSS
8	Satwas	46206	PT. Harda Indo Perkasa	9120104311548	202102-1307-4744-4102-	OSS

	Kaimana				683	
9	Satwas Sorong	46206	PT. Bina Nelayan Jaya	220107231847	202002-1413-0222-0119-444	Insidental
10	Satwas Kaimana	46206	PT. Industri Perikanan Namatota	9120010110054	202101-1418-3621-3637-001	Insidental
11	Satwas Muluku Tenggara Barat	46206	PT. Enam Bersaudara Manoha	2112210037848	202101-1418-3621-3637-001	Insidental
12	Satwas Muluku Tenggara Barat	46324	PT. Enam Bersaudara Manoha	2112210037848	202112-2116-4854-4851-543	Insidental
13	Satwas Mimika	47215	CV. Mutiara Laut Timur	0110210004213	202110-0108-2315-8108-878	Insidental
14	Satwas Kaimana	47215	CV. Antara Inti Lautan	1210000630322	202106-1622-2613-5174-375	Insidental
15	Satwas Merauke	46206	CV. Bintang Fahri Internasional	8120102801461	202-101-2008-0830-1788-183	Insidental
16	Satwas Sorong	46206	PT. YFIN	8120005861765	-	Insidental
17	Satwas Muluku Tenggara Barat	47215	Nasri (perorangan)	8120102801461	-	Insidental
18	Satwas Merauke	47215	UD. IFSA	0211010112169	202011-2609-2315-0587-948	Insidental
19	Satwas Kaimana	46206	PT. Industri Perikanan Namatota	9120010110054	-	Insidental
20	Satwas Muluku Tenggara Barat	47215	Hariyanto (Perorangan)	3108220051219	202208-3114-3450-4495-335	Insidental
21	Wiler Fakfak	46206	PT. Marine Gratia	1219000322726	-	Insidental
22	Satwas Mimika	47215	UD. Arafura	1287000342048	202210-1308-2910-0478-357	Insidental
23	Wilker Dobo	46206	PT. Darma Aru Mina	0220001271425	202002-1208-1745-5343-436	Insidental
24	Satwas Sorong	46206	PT. Sahabat Karya Sentosa	9120400200465		Insidental
25	Satwas Muluku Tenggara Barat	46206	CV. Weru	2308210012126	202111-2416-5523-7651-604	Insidental
26	Satwas Merauke	47215	UD. Cahaya	9120019131419	-	Insidental
27	Satwas Muluku Tenggara Barat	47215	CV. Revinara Jaya	1302230064683	202303-1318-0214-3699-871	Insidental
28	Satwas Muluku Tenggara Barat	47215	Liberatus Fenanlampir	2610210004213	202110-2608-4030-2003-289	Insidental
29	Satwas Muluku Tenggara Barat	46206	CV LH Korindo Saumlaki	1297000351376	202109-1309-2204-2689-395	Insidental
30	Satwas Sorong	46206	PT. Marina Sorong Indomesia	220003381609	202003-1008-5850-1066-943	OSS
31	Satwas Kaimana	47215	CV. Tirta Senja Berkarya	1905230052296	202305-1912-0710-4782-005	Insidental
32	Satwas Merauke	46206	UD. Amanah Rizky	1232000212434	202102-2310-4116-3104-301	Insidental
33	Satwas Muluku Tenggara Barat	46206	Hui Eng	9120101161256		Insidental
34	Satwas Mimika	47215	Ridwan	2302220012547		Insidental
35	Satwas Kaimana	46206	Matahari Timur	220005330166		Insidental
36	Satwas Merauke	47215	UD. Nelayan Barokah	267010102703	-	Insidental
37	Satwas Mimika	47215	Usman S	0219010140529	-	Insidental
38	Satwas Muluku Tenggara Barat	47215	Amin	0906220034883	-	Insidental
39	Satwas Muluku Tenggara Barat	47215	PT. Rasyid Lintas Bahari	0811220006895	-	Insidental
40	Satwas Muluku Tenggara	47215	Johan Gunawan	0409210014334	-	Insidental

	Barat					
41	Satwas Maluku Tenggara Barat	47215	Remi Oktavianus	1406220069674	-	Insidental
42	Satwas Kaimana	46206	Ronal Wiradinata	1609210048809	-	Insidental
43	Satwas Kaimana	46206	PT. Elitism International Papua	9120013020983	-	Insidental
44	Satwas Maluku Tenggara Barat	47215	Bonni Taner	9120002180573	-	Insidental

#### a.4 Kualitas penyelesaian pemeriksaan budidaya perikanan

Pengawasan terhadap budidaya dilaksanakan selama Tahun 2023 kepada 44 Pengusaha dengan metode pengawasan rutin maupun insidental. Berikut disajikan dalam tabel:

Tabel 3. 26 Rekap pengawasan budidaya

NO	Nama Perusahaan / Perorangan	Alamat kantor	Kegiatan Usaha	KBLI	Jenis Ikan yg dibudidayakan	SIUP Nomor/ NIB	SIUP Masa Berlaku	Taat/Tidak Taat	Rekomendasi
1	PT Dafin Mutiara	Satelit Utara III Blok DT-5Kel. Tanjungsari Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur	Pembesaran Mollusca laut (Kerang Mutiara)	03215	Kerang Mutiara	8120000970671	terbit 7 September 2018 perubahan ke-7 28 September 2020	Taat	Akan dilaksanakan pemantauan untuk melihat progres pengurusan KKPRL
2	PT. Globalindo Mutiara	Jl. Gajahmada Desa Taar Kec. Pulau Dullah Selatan Kota Tual Provinsi Maluku	Pembenihan Ikan Laut	03212	Kerang Mutiara	9120402282266	terbit 26 Februari 2019	Taat	Telah memenuhi beberapa kriteria pemeriksaan teknis, sudah menerapkan CPIB perlu membuat LKU secara rutin
3	PT. Globalindo Mutiara	Jl. Gajahmada Desa Taar Kec. Pulau Dullah Selatan Kota Tual Provinsi Maluku	Pembesaran Mollusca laut (Kerang Mutiara)	03215	Kerang Mutiara	9120402282266	terbit 26 Februari 2020	Taat	Telah memenuhi beberapa kriteria pemeriksaan teknis, sudah menerapkan CBIB perlu membuat LKU secara rutin
4	Novi Heret Laurens Songjanan	Desa Taar Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, Provinsi Maluku	Budidaya Biota Air Laut Lainnya	3219	Teripang		-	Taat	Usaha pembesaran rumput laut milik Bapak Novi telah memiliki PKKPR Darat tetapi belum memiliki PKKPRL, melakukan kegiatan pembesaran dan menerapkan cara pembesaran ikan yang baik (CBIB) dengan nilai 75% dengan nilai kepatuhan teknis KBLI 03217 sebesar 70% (baik), Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan

5	MARKUS RESIMANU K	DESA TAAR, Desa/Kelurahan Taar, Kec. Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Provinsi Maluku	Budidaya Biota Air Laut Lainnya	3219	Teripang	2606230175957	-	Taat	Usaha milik Markus Resimanuk dengan KBLI 03219 telah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dan persyaratan dasar persyaratan dasar perizinan berusaha berupa PKKPR Darat, melakukan kegiatan pembesaran teripang dan telah dinilai 69,4% dan Nilai Kepatuhan Teknisnya sebesar 60,2% (Baik), Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan
6	HISKIA HANS RUMANGUN	DESA TAAR, Desa/Kelurahan Taar, Kec. Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Provinsi Maluku	Budidaya Biota Air Laut Lainnya	3219	Teripang	2606230172976	-	Taat	Kegiatan usaha budidaya teripang milik hiskia Hans Rumangun di Kampung Budidaya Desa Taar dengan skala usaha mikro telah dilengkapi dengan perizinan berusaha (NIB) nomor 2606230172976. Nilai kepatuhan teknis untuk KBLI 03219 adalah 68%. Usaha yang dilakukan dikelola sendiri dan tidak ada dokumentasi pada saat kegiatan usaha, Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan
7	OKTOFIANU S RANO TANLAIN	DESA TAAR, Desa/Kelurahan Taar, Kec. Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Provinsi Maluku	Budidaya Biota Air Laut Lainnya	3219	Teripang	2806230009764	-	Taat	Usaha milik Oktofianus dengan KBLI 03219 (Desa Taar) telah memiliki persyaratan dasar perizinan berusaha berupa PKKPR Darat, melakukan kegiatan pembesaran teripang dan telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dengan nilai 58,3% dan Nilai Kepatuhan Teknis KBLI 03219 sebesar 60,2% (Baik), Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan

8	ANTONIUS OHOIRAT	DESA TAAR, Desa/Kelurahan Taar, Kec. Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Provinsi Maluku	Budidaya Biota Air Laut Lainnya	3219	Teripang	2606230177893	-	Taat	Hasil pemeriksaan penerapan CBIB pada usaha pembesaran Teripang milik Antonius Ohoirat (Kampung Budidaya Desa Taar) sebesar 68 persen, Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan, Perbaikan
9	YOHANIS RUMANGUN	DESA TAAR, Desa/Kelurahan Taar, Kec. Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Provinsi Maluku	Budidaya Biota Air Laut Lainnya	3219	Teripang	2606230174515	-	Taat	Usaha milik Yohanis Rumangun dengan KBLI 03219 (Kampung Pembudidaya Desa Taar, Kota Tual) telah memiliki persyaratan dasar perizinan berusaha berupa PKKPR Darat, melakukan kegiatan pembesaran teripang dan telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dengan nilai 69,4% dan Nilai Kepatuhan Teknis KBLI 03219 sebesar 68% (Baik), Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan
10	MOSES JOSEP RENYAAN	DESA TAAR, Desa/Kelurahan Taar, Kec. Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Provinsi Maluku	Budidaya Biota Air Laut Lainnya	3219	Teripang	2606230177059	-	Taat	Usaha milik Moses Josep Renyaan dengan KBLI 03219 (Desa Taar, Kota Tual) telah memiliki persyaratan dasar perizinan berusaha, melakukan kegiatan pembesaran teripang dan telah menerapkan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) dengan nilai 69,4 dan nilai kepatuhan teknis KBLI 03219 sebesar 68 persen (baik), Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan, Perbaikan
11	PELIPUS NATANIEL SABONO	DESA TAAR, Desa/Kelurahan Taar, Kec. Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Provinsi Maluku	Budidaya Biota Air Laut Lainnya	3219	Teripang	2806230007016	-	Taat	Usaha Bapak Pelipus Nataniel Sabono dengan KBLI 03219 (Desa Taar) telah memiliki persyaratan dasar perizinan berupa NIB, Sertifikat standar dalam melakukan pembesaran teripang

									dan telah menerapkan cara budidaya ikan yang baik dengan nilai 68,57 %, dan nilai kepatuhan teknis KBLI 03219 sebesar 60,2% (Baik), Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan
12	PT. Rajawali Laut Timur	Hasan/ Halong RT. 003/RW. 001 Kel. Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut	03211	Kerapu	9120200161673	terbit 17 Januari 2019	Taat	Perlu pembinaan dan pendampingan untuk mengikuti pelatihan sertifikat CBIB
13	Donatus Laratmase	Desa Lauran Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut	03211	Kakap	Tidak memiliki	-	Tidak taat	Perlu pembinaan dan pemantauan pengurusan perizinan berusaha /NIB
14	CV. Enam Bersaudara Manoha	Desa Ustutun Kec. Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut	03211	belum ada	2112210037848	terbit sejak 21 Desember 2021	Taat	Pelaku usaha telah memiliki NIB namun sampai sekarang usaha pembesaran pisces/ ikan bersirip laut belum dilaksanakan
15	CV. Enam Bersaudara Manoha	Desa Ustutun Kec. Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku	Pembenihan Ikan Laut	03212	belum ada	2112210037848	terbit sejak 21 Desember 2022	Taat	Pelaku usaha telah memiliki NIB namun sampai sekarang usaha pembenihan ikan laut belum dilaksanakan
16	CV. Enam Bersaudara Manoha	Desa Ustutun Kec. Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku	Pembesaran Tumbuhan Air Laut	03217	belum ada	2112210037848	terbit sejak 21 Desember 2023	Taat	Pelaku usaha telah memiliki NIB namun sampai sekarang usaha pembesaran tumbuhan air laut belum dilaksanakan
17	PT. Rajawali Laut Timur	Hasan/ Halong RT. 003/RW. 001 Kel. Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut	03211	Kerapu	9120200161673	terbit 17 Januari 2019	Taat	Perlu pembinaan dan pendampingan untuk mengikuti pelatihan sertifikat CBIB
18	PT Tanimbar Mutiara Indopasifik	Pulau Ungar Desa Labobar Kec. Wuar Labobar Kab. Kepulauan Tanimbar	Pembenihan ikan laut (Kerang Mutiara)	03212	Kerang Mutiara			Tidak taat	kepada pemilik usaha agar segera mengurus perizinan berusaha
19	Johan Gunawan	Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	47215	Lobster dan Kepiting Bakau	409210014334	-	Taat	Usaha Budidaya Johan Gunawan telah memiliki NIB, namun belum menambahkan KBLI bidang Budidaya, KBLI yang tertera yaitu 47215 (Perdagangan eceran hasil perikanan), unit usaha menampung Lobster dan Kepiting Bakau didalam bak penampung. Diberikan arahan agar menambahkan KBLI 03216

									dilampiran NIB dan mengurus sertifikat CBIB
20	PT Rajawali Laut Timur	Desa Tutunametal, Kecamatan Molu Maru Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku	Pembesaran Pisces/Ikan bersirip	3211	Ikan Kerapu	9120200161673	-	Taat	Usaha Budidaya PT. Rajawali Laut Timur telah memiliki NIB, menampung ikan kerapu hidup, dan memiliki 10 petak di dalam KJA. Disampaikan kepada pengelola PT. Rajawali Laut Timur untuk membuat sertifikat CBIB
21	CV. Weru	Desa Weratan, Kecamatan Wermaktian Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku	Perdagangan Besar Hasil Perikanan	46206	Kerang Mutiara	2308210012126	-	Taat	Usaha Budidaya CV. WARU telah memiliki NIB, dan belum memiliki sertifikat CBIB, sehingga diberikan arahan untuk melengkapi fasilitas yang masih kurang memadai dan agar segera mengurus sertifikat CBIB
22	PT Rajawali Laut Timur	Desa Namtabung, Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku	Pembesaran Pisces/Ikan bersirip	3211	Ikan Kerapu	0,912020016	-	Taat	Usaha Budidaya PT. Rajawali Laut Timur telah memiliki NIB, menampung ikan kerapu hidup dengan sistem KJA, dikirim ke ambon untuk di ekspor dan memiliki 11 petak KJA. Disampaikan kepada pengelola PT. Rajawali Laut Timur untuk membuat sertifikat CBIB
23	Johan Gunawan	Desa Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	47215	Lobster Hidup	0409210014334	-	Taat	Usaha Budidaya Johan Gunawan telah memiliki NIB, namun belum menambahkan KBLI bidang Budidaya, KBLI yang tertera yaitu 47215 (Perdagangan eceran hasil perikanan), unit usaha menampung Lobster dan Kepiting Bakau didalam bak penampung. Diberikan arahan agar menambahkan KBLI 03216 dilampirkan NIB dan mengurus sertifikat CBIB
24	Remi Oktavianus	Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	47215	Lobster	1406220069674	-	Taat	Usaha Budidaya Remi Oktavianus telah memiliki NIB, namun belum menambahkan KBLI bidang Budidaya, KBLI yang tertera yaitu 47215 (Perdagangan eceran hasil perikanan), unit usaha menampung Lobster hidup didalam bak

									penampungan. Diberikan arahan agar menambahkan KBLI 03216 dilampirkan NIB dan mengurus sertifikat CBIB
25	UD. Sinar Mutiara Tanimbar	Desa Teineman, Kecamatan Warlabobar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku	Pembesaran Mollusca Laut	3215	Kerang Mutiara	9120307372713	-	Taat	Usaha Budidaya UD. Sinar Mutiara Tanimbar telah memiliki NIB, dan belum memiliki sertifikat CBIB, sehingga diberikan arahan untuk melengkapi fasilitas yang masih kurang memadai dan agar segera mengurus sertifikat CBIB
26	Nurfatin	Jl. Apel Kelurahan malawii Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	03221	Lele	0410210033977	terbit 4 Oktober 2021	Taat	sudah menerapkan prinsip CBIB
27	AGUSTINUS NANANG	Distrik mayamuk Sp 3 Kabupaten Sorong	Pembenihan Ikan Air Tawar	3226	Pembenihan Ikan Nila			Taat	Budidaya milik Agustinus telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan cara pembesaran ikan Nila dengan baik, Bobot penilaian kepatuhan 80%,Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan
28	AGUSTINUS NANANG	Distrik mayamuk Sp 3 Kabupaten Sorong	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	3221	Pembesaran Ikan Nila			Taat	Budidaya yang dimiliki Agustinus telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar dipertahankan prinsip pembesaran ikan Nila dengan baik, Bobot penilaian 80%,Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan
29	SUGIYONO	Jl.Aimas Seget Kelurahan Malagusa, Kec.Aimas Kabupaten Sorong	Pembenihan Ikan Air Tawar	3226	Pembenihan Ikan Nila			Taat	Telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai prinsip cara membudidayakan ikan dengan baik dan benar skor 85%, Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan

30	SUGIYONO	Jl.Aimas Seget Kelurahan Malagusa, Kec.Aimas Kabupaten Sorong	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	3221	Pembesaran Ikan Nila			Taat	Telah sesuai ketentuan dan agar mempertahankan prinsip penanganan benih yang baik dan benar, bobot penilaian 80%, Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan
31	Syamsul Mu'arif	Jl.Aimas Seget Kelurahan Malagusa, Kec.Aimas Kabupaten Sorong	Pembenihan Ikan Air Tawar	3226	Pembenihan Ikan Nila			Taat	Telah sesuai ketentuan, agar dipertahankan dalam prinsip pembenihan yang baik maka skornya 80%, Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan
32	Syamsul Mu'arif	Jl.Aimas Seget Kelurahan Malagusa, Kec.Aimas Kabupaten Sorong	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	3221	Pembesaran Ikan Nila			Taat	Telah sesuai ketentuan, agar dipertahankan dalam prinsip pembenihan yang baik maka skornya 80%, Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan
33	Yayasan Orang Laut Papua	Kampung Warmasen Suaembon Distrik Waisai Kota Kabupaten raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya	Budidaya karang (coral)	03214	Terumbu karang	1402220056379	terbit 14 februari 2022 perubahan ke -2 tanggal 31 Oktober 2022	Taat	sudah menerapkan prinsip CBIB
34	CHANDRA HALIM	Jl. Kimindores Desa Sapordanco Kec. Kota Waisai Kab. Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya	Pembesaran Piscess/Ikan Bersirip Laut	03211	Kerapu	9120108561633	terbit 13 Mei 2019 perubahan ke-3 tanggal 19 April 2022	Taat	sudah menerapkan prinsip CBIB/ sudah memenuhi kriteria
35	Kelompok Pembudidayaan Ikan Aurari	Pulau Merpati, kampung Sauwandarek, Distrik Meos Mansar, Kab. Raja Ampat Prov. Papua Barat Daya	Pembesaran Piscess/Ikan Bersirip Laut	3211	Kerapu	SK Pokdakan : 523.1/256/DP- RA/IV/2023	-	Taat	Perlu perbaikan melalui pendampingan dan bimbingan terhadap kelompok Aurari untuk segera melengkapi persyaratan dasar perizinan berusaha.
36	Kelompok Pembudidayaan Ikan Maju	Kampung Sauwandarek, Distrik Meos Mansar, Kab. Raja Ampat Prov. Papua Barat Daya	Pembesaran Piscess/Ikan Bersirip Laut	3211	Kerapu	SK Pokdakan : 523.1/256/DP- RA/IV/2023	-	Taat	Perlu perbaikan melalui pendampingan dan bimbingan terhadap kelompok Aurari untuk segera melengkapi persyaratan dasar perizinan berusaha.

37	Kelompok Pembudidayaan Ikan Tunas Sejahtera	Kampung Sauwandarek, Distrik Meos Mansar, Kab. Raja Ampat Prov. Papua Barat Daya	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut	3211	Kerapu	SK Pokdakan : 523.1/260/DP-RA/IV/2023	-	Taat	Perlu perbaikan melalui pendampingan dan bimbingan terhadap kelompok Aurari untuk segera melengkapi persyaratan dasar perizinan berusaha.
38	Kelompok Pembudidayaan Ikan Sauw Yafaduru	Kampung Sauwandarek, Distrik Meos Mansar, Kab. Raja Ampat Prov. Papua Barat Daya	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut	3211	Kerapu	SK Pokdakan : 523.1/260/DP-RA/IV/2023	-	Taat	Perlu perbaikan melalui pendampingan dan bimbingan terhadap kelompok Aurari untuk segera melengkapi persyaratan dasar perizinan berusaha.
39	PT. Kabui Mutiara Sejahtera	Pulau Gam, Kampung Kabui, Distrik Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat	Pembenihan ikan laut (Kerang Mutiara)	3212	Pembenihan Ikan Laut	1306230124774	terbit 13 Juni 2023	Taat	Dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk kegiatan pembesaran molusca laut, dan diberikan teguran agar segera melengkapi persyaratan dasar dan sertifikat standar atau perizinan yang belum dimiliki
40	CV. Putra Raja Bahari	Kampung Rutum distrik Ayau ,Kab. Raja Ampat Prov. Papua Barat Daya	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut	3211		1308230047815	-	Taat	CV. Putra Raja Bahari memenuhi persyaratan administrasi telah memiliki NIB dan sertifikat standar dan izin pengelolaan lingkungan. Nilai kepatuhan teknis dari KBLI 03211 (Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut) sebesar 85%. Melengkapi perizinan dasar PKKPRL karena usaha ini memanfaatkan ruang laut untuk menempatkan keramba pembesaran. Perlunya peningkatan sertifikasi keahlian teknis untuk karyawan bidang teknis agar sesuai dengan standar yang berlaku
41	PT AMERA NUS	Jl Satelit Utara Blok III Blok DT-5 ( Raya Satelit Utara 3 DT-5) Kel. Tanjung Sari Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur	Pembesaran Mollusca laut (Kerang Mutiara)	03215	Kerang Mutiara	8120002732305		Taat	Pelaku usah telah memenuhi perizinan berusaha

42	Kelompok Budidaya Rumput laut	Desa Marsi, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat	Budidaya Rumput Laut	3217	Rumput laut (Eucheuma sp)	-	-	Tidak taat	Pelaku usaha belum memiliki dokumen perizinan (NIB), sehingga perlu dilakukan pengawasan secara rutin untuk melakukan pembinaan dan perbaikan
43	PT. Rajawali Laut Timur	Desa Rumah Tiga RT. 002/004, Kel. Rumah Tiga, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut	3211	Kerapu, Kakatua, Raja Bau	25/IUP.B-C//19K / 9120200161673	-	Taat	Perlu dilakukan sosialisasi mengenai perizinan berusaha berbasis risiko baik kepada pelaku usaha maupun petugas terkait dan Perlu adanya Pengawasan Rutin ke Pelaku Usaha
44	Muhammad Amir Maksud Fawaid dan Indra	Desa Onimsari Kelurahan Onimsari, Kecamatan Bomberai, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	3221	Ikan Nila dan Ikan Lele	258000922152	-		

## 6. Sasaran Kegiatan 6: Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan

Sasaran kinerja ini menurunkan 1 indeks kinerja utama, yaitu "Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)". Indeks kinerja ini merupakan indeks kinerja baru yang diturunkan kepada Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan. Berikut kami paparkan tabel capaian IKU dimaksud.

Tabel 3. 27 Capaian IKU SK. 6

Indikator Kinerja	Capaian					
	2021	2022	Target 2023	2023	%	Renstra
<b>Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)</b>	-	-	100%	140%	120	-

Tabel 3. 28 Perbandingan IKU UPT SK. 6

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Tual	Batam	Jakarta	Bitung	Benoa	Lampulo
SK.6	<b>Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan</b>	IKU 8 Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)	140	100	100	100	100	100

### a. Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)

Data dan informasi intelijen perikanan yaitu data dan informasi yang dikumpulkan oleh Pengawas Perikanan atau pihak yang diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya perikanan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi. Penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan yaitu data intelijen yang sudah dalam bentuk produk atau bahan keterangan yang sudah dikumpulkan atau diolah yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penyusunan rencana, kebijakan, dan pengambilan keputusan/ penindakan yang akan ditempuh.

Formula:

$$X_{intl} = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan:

- Xintl* : Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan  
*a* : jumlah data dan informasi intelijen perikanan yang selesai dikumpulkan  
*b* : jumlah data dan informasi intelijen perikanan yang ditargetkan dikumpulkan

Pangkalan PSDKP Tual menargetkan data informasi intelijen pada Tahun 2023 sebanyak 10 data dan berhasil dikumpulkan 14 data sehingga berdasarkan formula di atas capaian atas IKU ini sebesar 140%. Secara garis besar untuk IKU ini Pangkalan PSDKP Tual mengumpulkan data pengawasan yang berasal dari pengaduan. IKU ini merupakan IKU baru yang dituangkan ke dalam PK revisi ke II sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Analisa pencapaian keberhasilan antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan pulbaket atas pelaporan masyarakat dalam mendukung tercapainya IKU persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan dengan menidaklanjuti 14 laporan aduan yang dijalankan dalam kegiatan pengawasan sebagai bentuk konfirmasi atas pelaporan aduan;
2. Pendelegasian tim Pengawas Perikanan yang kompeten dalam pelaksanaan tugas dengan memperhatikan asas intelijen sehingga data yang dikumpulkan akurat dan dapat disandingkan dengan regulasi yang berlaku. Kompetensi pengawas perikanan dikembangkan dengan melakukan internalisasi secara internal dan penugasan

pengawas perikanan dalam kegiatan bimbingan teknis dan kegiatan pelatihan lainnya yang mendukung tugas dan fungsi sebagai pengawas perikanan.

Sedangkan kegiatan yang turut membantu keberhasilan pencapaian antara lain:

1. Kegiatan perencanaan yang mendukung kegiatan intelijen diantaranya penyediaan anggaran dan peralatan pendukung pengawasan;
2. Kegiatan pelaporan dan pengaduan yang telah dijalankan secara efektif.

## 7. Sasaran Kegiatan 7: Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan

Sasaran kegiatan ini hanya menurunkan 1 (satu) IKU, yang merupakan IKU 9 yang ditetapkan Pangkalan PSDKP Tual yaitu "Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)". Berikut merupakan penyajian data capaian dan perbandingan pencapaian.

Tabel 3. 29 Capaian IKU SK. 7

Indikator Kinerja	Capaian					
	2021	2022	Target 2023	2023	%	Renstra
<b>Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)</b>	100	100	100	100	100	-

Tabel 3. 30 Perbandingan IKU UPT SK. 7

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Perbandingan					
			Tual	Batam	Jakarta	Bitung	Benoa	Lampulo
SK.7	<b>Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan</b>	IKU 9 Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)	100	100	100	100	100	100

### a. IKU 9: Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%).

Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah Jumlah persentase kegiatan Pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat

diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Pangkalan PSDKP Tual memiliki 2 unit Kapal Pengawas dan 10 unit speedboat pengawasan yang dirawat dengan ketentuan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari :

- a. perawatan pencegahan (preventive maintenance **50%**),
- b. perawatan prediktif (predictive maintenance **40 %**)
- c. perawatan darurat (breakdown maintenance **10%**).

Formula:

$$Xp=(50\%.x_a) + (40\%.x_b) + (10\%.x_c)$$

**Keterangan:**

*Xp = Persentase Perawatan Sarana*

*xa = Preventive*

*xb = Predictive*

*xc = Darurat*

Pangkalan PSDKP Tual berhasil memperoleh capaian yang baik dengan melaksanakan perawatan baik preventif, prediktif, maupun darurat dengan baik dengan dibuktikan realisasi atas kebutuhan perawatan dan adanya pelaporan tentang kegiatan perawatan yang dilakukan. IKU ini telah tercapai dan sesuai dengan target, akan tetapi data hanya dapat dibandingkan hingga tahun 2021 dikarenakan IKU dimaksud baru ditetapkan sejak 2021 hingga 2023. Capaian 100 pada IKU ini dikarenakan beberapa analisa penunjang keberhasilan antara lain:

1. Memantau seluruh kebutuhan dan kesiapan operasi armada baik di Pangkalan PSDKP Tual maupun yang tersebar pada satwas dan wilker serta melaksanakan Upaya perawatan dengan skala prioritas dan mengatur kebutuhan penganggarnya dengan pembiayaan lewat mekanisme LS kontraktual, non kontraktual, ataupun swakelola dengan mekanisme GUP maupun TUP sehingga perawatan armada dapat dijalankan secara merata;
2. Adanya monitoring dan evaluasi terhadap kondisi armada yang telah dilaksanakan perawatan oleh Pangkalan PSDKP Tual dan evaluasi melalui capaian kegiatan PN bersama sesditjen PSDKP. Kegiatan evaluasi secara internal akan menguatkan kegiatan perawatan dikarenakan akan berdampak pada capaian hari ops dan kinerja armada sedangkan evaluasi ditingkat sesditjen akan memacu percepatan kegiatan perawatan apabila terdapat kerusakan karena data akan disandingkan dengan seluruh UPT lingkup ditjen PSDKP.

Realisasi atas kegiatan perawatan armada sebesar Rp2.797.969.329,- atau sebesar 96,82% dari total anggaran Rp2.889.790.000,-. Terdapat juga beberapa kegiatan yang secara langsung berkontribusi dalam pencapaian IKU ini antara lain:

1. Melaksanakan pengadaan suku cadang mesin utama KP. Hiu 14;
2. Melaksanakan pengadaan suku cadang mesin utama KP. Hiu Macan 6
3. Melaksanakan pengadaan suku cadang mesin bantu kapal pengawas;
4. Perbaiki deck KP. Hiu Macan 6;
5. Penggantian plat geladak navigasi KP. Hiu Macan 6;
6. Perbaiki interior ruang kemudi KP. Hiu Macan 6;
7. Pengadaan ACP kapal pengawas.

Dalam pelaksanaan kegiatan perawatan armada sering kali ditemukan adanya beberapa permasalahan, sejauh ini belum sampai pada taraf yang mengkhawatirkan akan tetapi cukup menghambat diantaranya:

1. Wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual belum memiliki agen maupun toko yang menjual peralatan pendukung perawatan kapal secara lengkap;
2. Terdapat beberapa keperluan mesin yang tidak ready stock dan harus indent;
3. Biaya pengiriman besar serta memakan waktu yang lama.

#### **8. Sasaran Kegiatan 8: Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas**

Sasaran kegiatan ini awalnya hanya memiliki 1 indeks kinerja diawal tahun 2023 yang kemudian disemester II terjadi perubahan dengan menambahkan 2 IKU baru sehingga ada 3 IKU dimana kesemua IKU merupakan IKU baru yang tidak dapat dibandingkan pencapaiannya, IKU tersebut antara lain:

1. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks);
2. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks);
3. Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks).

Berikut kami sajikan capaian data capain dan perbandingannya

Tabel 3. 31 Capaian IKU SK. 8

No.	Indikator Kinerja	Capaian					Renstra
		2021	2022	Target 2023	2023	%	
1	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	-	-	80	100	120	-
2	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	-	-	80	58,99	73,74	-
3	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	-	-	80	100	120	-

Tabel 3. 32 Perbandingan IKU UPT SK. 8

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Tual	Batam	Jakarta	Bitung	Benoa	Lampulo
SK.8	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	IKU 10	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	100	86,79	100	100	100
		IKU 11	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	58,99	73,59	74,10	100	87,75
		IKU 12	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	100	86,79	100	100	80

#### a. IKU 10: Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)

Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang pada UPT Pangkalan PSDKP Tual untuk;

1. pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;
2. pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah

Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang KP dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$x = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$$

- x* : Indeks pengenaan sanksi administratif bidang KP  
*a* : Jumlah pengenaan sanksi administratif bidang KP berdasarkan penetapan pertama  
*b* : Jumlah keseluruhan kasus pelanggaran administratif yang ditangani berdasarkan hasil ekspose

Pangkalan PSDKP Tual memperoleh nilai 100 atas IKU ini berdasarkan perhitungan di atas. Total pangkalan PSDKP Tual menyelesaikan 35 kasus pengenaan administrasi 23 diantaranya berdasarkan hasil ekspose. Secara keseluruhan dari 35 kasus maka 2 diantaranya adalah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan 33 bidang perikanan. 1 diantaranya merupakan UPI. IKU ini mengalami perubahan cara perhitungan pada triwulan IV dengan menggantikan komponen perbandingan yang semula **total kasus pelanggaran sanksi administratif yang direkomendasikan dikenakan sanksi administratif** menjadi **jumlah keseluruhan kasus pelanggaran administratif yang ditangani berdasarkan hasil ekspose**. Berikut kami sajikan tabel rekapannya.

Tabel 3. 33 Rekap pengenaan sanksi administratif

NO	LOKASI PENANGANAN (UPT/SATWAS)	JENIS PELANGGARAN							PENANGANAN		JENIS SANKSI									
		Jenis Ikan	DPI	Jalur III (>12NM)	Transshipment	PPKP	SKP	Perizinan nonaktif	TOTAL	Dalam Proses	Selesai	SP1	SP2	SP3	Paksaan pemerintah	Denda Administratif	Pembekuan Perizinan Berusaha	Pencabutan Perizinan Berusaha	Bukan Pelanggaran	TOTAL
1	TUAL	-	1	4	2	-	-	-	7	-	7	6	-	-	-	1	-	-	-	7
2	DOBO	1	-	5	9	-	-	1	16	-	16	12	-	-	3	1	-	-	-	16
3	WARABAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	BENJINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SORONG	-	2	3	-	3	-	-	8	-	8	2	-	-	5	-	-	-	1	8
6	RAJA AMPAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	MERAUKE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1
8	KAIMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	FAKFAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	MTB (SAUMLAKI)	-	-	2	-	-	1	-	3	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	3
11	MIMIKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		2	3	14	11	3	1	-	35	-	35	22	1	-	3	8	-	-	1	35

Analisa penyebab keberhasilan IKU dimaksud antara lain:

1. Melakukan internalisasi kepada setiap pengawas perikanan yang melaksanakan tugas agar profesional dalam melakukan pemeriksaan dan penetapan sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku, internalisasi dilakukan baik secara internal maupun secara nasional dengan melibatkan pada kegiatan pelatihan maupun forum rapat dan diskusi yang diselenggarakan secara daring;
2. Melaksanakan pemantauan VMS secara rutin dan menganalisa pergerakan kapal perikanan sehingga data analisa dugaan pelanggaran dapat dijadikan sebagai dasar pemanggilan dan dilakukan pemeriksaan bahkan penindakan jika terbukti bersalah;
3. Melaksanakan pengawasan dan penginformasian secara merata sehingga pendekatan persuasif telah dibangun sebagai dasar penetapan sanksi administrasi dikemudian hari apabila ditemukan pelanggaran;
4. Memasang jaringan informasi eksternal yang berkontribusi sebagai laporan awal adanya pelanggaran;

Kegiatan yang menunjang dalam pencapaian IKU ini adalah pelaksanaan bimtek maupun internalisasi atas kemampuan pengawas perikanan dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan Pangkalan PSDKP Tual dan BAP atas dugaan pelanggaran yang terjadi. Kegiatan pengenaan sanksi administratif selama tahun 2023 menghabiskan anggaran sebesar Rp99.998.450,- atau sekita 99,99% dari total pagu Rp100.000.000,-.

#### **b. IKU 11: Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)**

Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Pemeriksaan dilaksanakan oleh: a). Kepala UPT PSDKP dimana pelaku usaha berdomisili; b).Kepala UPT PSDKP dimana kegiatan berusaha dilaksanakan atau dimana Kapal perikanan berpangkalan; atau; c). Ditjen PSDKP Pusat (Dit PP) dalam hal pemeriksaan tidak memungkinkan dilaksanakan oleh Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, atau apabila pelanggaran melibatkan pelaku usaha skala besar/ menjadi perhatian publik.

Formula :

$$X_{TLP} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_n)}{n} \times 100\%$$

$x_{TLP}$  : Indeks Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Sistem Pemantauan Kapal Pelaku Usaha KP;

$x_{n..}$  : Jumlah orang/pelaku usaha yang telah selesai diperiksa;

$n$  : Jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan

- 1) IKU ini menjadi satu-satunya IKU yang berpredikat cukup dengan capaian 58,99. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capain tahun sebelumnya dikarenakan merupakan IKU baru yang ditetapkan dengan revisi PK ke II. Terdapat perbedaan data pemeriksaan hasil analisis pemantauan SDKP antara pusat (Dit. PP) dan UPT Pangkalan PSDKP Tual. Perbedaan ini dikarenakan perbedaan *closing periode* memasukan data pada google sheet perkembangan hasil analisis pemantauan yang disi secara kolektif, dimana Dit PP telah menghentikan (*close*) data pada 31 Desember 2023, sementara UPT memasukan dan memperhitungkan data yang masuk setelah *closing periode* dengan pertimbangan data tersebut masih merupakan data hasil pemantauan tahun 2023 (berdasarkan tanggal surat hasil pemantauan yang disampaikan Dit. POA) walaupun masuk dalam pengisian google sheet setelah 31 Desember 2023. Rekapitan atas capaian IKU ini kami sajikan pada tabel berikut

Tabel 3. 34 Rekapitulasi SPKP

NO	UPT	HASIL ANALISIS PUSDAL (INDIKASI PELANGGARAN)						ANALISIS LANJUTAN			TINDAK LANJUT				
		PELABUHAN PANGKALAN	DPI	JALUR (<12 NM)	IZIN HABIS			JUMLAH	DALAM PROSES	SUDAH	BUKAN PELANGGARAN	SP1	SP2	DENDA	PIDANA
					<30 hari	>30 hari	Total								
1	LAMPULO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BATAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	BENOA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	BITUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	TUAL	1	27	111	-	-	139	57	82	9	69	4	-	-	-
7	CILACAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	BELAWAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	KUPANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PONTIANAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	TARAKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	TAHUNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	AMBON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	BIAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>111</b>	-	-	<b>139</b>	<b>57</b>	<b>82</b>	<b>9</b>	<b>69</b>	<b>4</b>	-	-	-

Analisis atas tidak tercapainya kegiatan atas indeks kinerja ini disebabkan antara lain

1. Kapal yang belum diproses dan dalam proses adalah kapal-kapal yang berdomisili diluar wilayah kerja Pangkalan PSDKP Tual, sehingga belum dapat dimintai keterangan;

2. Berdasarkan informasi indikator kinerja, kapal-kapal tersebut dapat juga dilimpahkan ke UPT dimana kantor atau pemilik kapal tersebut berdomisili, atau membantu berdasarkan surat dari Pangkalan PSDKP Tual untuk dihadirkan agar dimintai keterangan secara online, akan tetapi target yang dimiliki UPT mitra terkait IKU yang sama juga membuat fokus terbagi sehingga tidak optimal.

Selain itu kegiatan yang turut membuat UPT tidak optimal dalam pencapaian antara lain, perumusan kebijakan terkait Informasi Indikator Kinerja dan teknis perhitungan perlu dilaksanakan dengan formulasi yang tepat dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

### **c. IKU 12: Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)**

Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif yaitu merupakan tingkat pencapaian kinerja MONEV pengenaan sanksi administratif oleh UPT Pangkalan PSDKP Tual

Formula:

$$P = \sum_{i=1}^n \left( \frac{ACTi \dots + ACTn}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

P = Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif

ACT = Jumlah nilai tahapan Monev pengenaan sanksi administratif (Tahapan sebagaimana Tabel)

N = Jumlah pelaksanaan MONEV pengenaan sanksi administratif

Pangkalan PSDKP Tual telah melaksanakan kegiatan monev/ supervisi untuk memenuhi indeks kinerja utama atas penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif. Dobo merupakan lokasi yang dipilih Pangkalan PSDKP Tual untuk melaksanakan kegiatan supervisi sebanyak 2 kali atas kegiatan pengenaan sanksi administratif.

IKU ini berhasil dipenuhi dengan nilai capaian sebesar 100 dari target yang ditetapkan yaitu 80. Kegiatan ini dapat berhasil dengan beberapa analisa seperti:

1. Pangkalan PSDKP Tual aktif melakukan monitoring terhadap aktifitas pengenaan sanksi administrasi dilingkup kerjanya, dengan mendelegasikan penyidik pegawai negeri sipil dan pengawas perikanan agar dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi atas beberapa pelanggaran administratif yang ada di wilker PSDKP Dobo;
2. Melaksanakan perencanaan supervisi pada wilayah yang dirasa memiliki keterbatasan jumlah personal sehingga penyelesaian pengenaan sanksi administratif dipastikan telah tuntas;

Adapun kegiatan yang turut menunjang pencapaian ini antara lain:

1. Penganggaran, melakukan perencanaan terhadap total anggaran yang akan dialokasikan pada kegiatan supervisi;
2. Pelaksanaan kontrol secara kontinu atas pencapaian sanksi administrative.

## 9. Sasaran Kegiatan 9: Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas

Sasaran kegiatan 9 menurunkan 1 indikator kinerja utama Pangkalan PSDKP Tual yaitu "Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)". Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Tabel 3. 35 Capaian IKU SK. 9

No.	Indikator Kinerja	Capaian					
		2021	2022	Target 2023	2023	%	Renstra
1	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	-	-	93	93	100	93

Tabel 3. 36 Perbandingan IKU UPT SK.9

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Tual	Batam	Jakarta	Bitung	Benoa	Lampulo
SK.9	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	IKU 13 Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)	93	97,78	-	100	-	100

### a. IKU 13: Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)

Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II). Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan dapat dihitung berdasarkan rumus berikut :

$$\text{Indeks Penyelesaian Penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan}(xa) = \left(\frac{a}{\sum b}\right) \times 100\%$$

xa = Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

a = Jumlah kasus ditahun berjalan yang telah selesai ditangani dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan sampai dengan selesai (P-21 dan/atau penyerahan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan)(SP-3)

$\sum b$  = Total kasus yang dilakukan proses penyidikan pada tahun berjalan

Apabila sudah ditetapkan target capaian pertriwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dan tidak ada capaian kasus di periode tersebut, maka realisasi capaian sebesar target yang telah ditetapkan. Pangkalan PSDKP Tual pada Tahun 2023 belum memiliki kasus TPKP yang ditangani sehingga besaran capaian yang diperoleh sebesar target yang ditetapkan yaitu 93. Anggaran terkait penyidikan kemudian dilaksanakan revisi dan diubah menjadi kegiatan penguatan kapastitas PPNS Pangkalan PSDKP Tual yang dilaksanakan pada hotel Kimson, Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara. IKU ini juga tidak dapat dibandingkan karena ada perubahan nomenklatur dan tatacara perhitungan yang semula persentase efektifitas menjadi indeks penyelesaian.

### 10. Sasaran kinerja 10: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP

Sasaran kinerja ini menurunkan 14 indikator kinerja yang telah ditetapkan Pangkalan PSDKP Tual dalam perjanjian kinerja Tahun 2023. 14 indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja yang melekat pada kegiatan penatausahaan dan merupakan kerja administrasi keseharian. Berikut disajikan 14 indikator kinerja dengan target dan capaiannya:

Tabel 3. 37 Capaian IKU SK. 10

No.	Indikator Kinerja	Capaian						
		2020	2021	2022	Target 2023	2023	%	Renstra
1	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) kapal perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	87,12	91,73	90,61	80	99,29	120	-
2	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	-	91,25	94,31	80	99,96	120	-
3	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk	84,17	84,17	84,17	75	81,52	108,69	-

	Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual								
<b>4</b>	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)	-	-	-	100	100	100	-	
<b>5</b>	Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	78,84	82,07	81,21	78	90,63	116,19	76	
<b>6</b>	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	-	-	-	80,5	82,65	102,67	87,75	
<b>7</b>	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	-	-	100	75%	100%	120	80	
<b>8</b>	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	-	-	26,66	21	29,84	120	-	
<b>9</b>	Inovasi yang dihasilkan UPT Pangkalan PSDKP Tual (inovasi)	-	1	1	1	1	100	1	
<b>10</b>	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	98,89	98,06	100	92%	108	117	90	
<b>11</b>	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	-	100	100	77,5%	100%	120	-	
<b>12</b>	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	-	100	100	77,5%	95,04%	120	-	
<b>13</b>	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	98,68	93,05	94,82	93,75	92,82	99,01	90	
<b>14</b>	Nilai kinerja anggaran (NKA) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Nilai)	-	87,05	89,55	82	87,58	106,80	89	

Tabel 3. 38 Perbandingan IKU UPT SK.10

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Tual	Batam	Jakarta	Bitung	Benoa	Lampulo
<b>SK.10</b>	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	IKU 14 Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) kapal perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	99,29	89	87,19	88,07	88,04	78,82
		IKU 15 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	99,96	-	88,61	95,83	-	93,89
		IKU 16 Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup	81,52	90,90	85,95	79,49	77,37	88,83

UPT Pangkalan PSDKP Tual							
IKU 17	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)	100	100	100	88,33	100	100
IKU 18	Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	90,63	89,04	83,17	87,2	87,37	84,39
IKU 19	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	82,65	81,25	79,25	80,55	87,15	79,50
IKU 20	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	100%	100%	100%	100%	100%	75%
IKU 21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	29,84	28,18	23,83	25,51	21,18	22,01
IKU 22	Inovasi yang dihasilkan UPT Pangkalan PSDKP Tual (inovasi)	1	1	2	1	1	1
IKU 23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	108,01	105,09	96,48	95,23	101,85	102,98
IKU 24	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 25	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	95,04%	94,38%	93,39%	95,04%	98,75%	98,75%
IKU 26	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual	92,82	91,59	90,71	94,45	94,59	93,52
IKU 27	Nilai kinerja anggaran (NKA) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Nilai)	87,58	86,5	84,82	85,88	90,76	84,96

Dari 14 indikator kinerja selama Tahun 2023, semua telah dilaksanakan dan memenuhi target 8 diantaranya berpredikat Istimewa dan 6 berpredikat baik.

### a. **IKU 14: Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) kapal perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual**

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Pangkalan PSDKP Tual adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Tual;

Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Tual, yaitu Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO).

Formula:

Perhitungan/pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP, sebagai berikut:

$$x_{ikm} = x_1$$

$x_{ikm}$  : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP

$x_1$  : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO

IKU Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) Kapal Perikanan merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait pelayanan yang ada di Lingkup Pangkalan PSDKP Tual yaitu SLO. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan cara survei. Survei kepuasan masyarakat dilakukan pada Tahun 2023, IKU Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) Kapal Perikanan telah terealisasi sebesar **99,29 dari target 80. Pencapaian IKU ini dilakukan dengan melaksanakan survey kepuasan masyarakat kepada pengguna jasa di seluruh unit kerja yang ada di Pangkalan PSDKP Tual serta memberikan pelayanan publik yang profesional kepada pengguna jasa.** Bila dibandingkan dengan target pada perjanjian kinerja, pencapaian di Tahun 2023 sudah melewati target dan cukup memuaskan.

Analisa keberhasilan pencapaian IKU dikarenakan beberapa faktor antara lain:

1. Pengawas perikanan sebagai garda terdepan dalam pelayanan SLO telah melaksanakan kegiatan sebagaimana yang diamanatkan UU dan telah memenuhi etika pelayanan publik sehingga pengguna jasa menerima manfaat pelayanan dengan baik;

2. Pengguna jasa telah mendapatkan fasilitas, yang nyaman selama bermitra baik dalam penggunaan aplikasi yang memudahkan seperti e-SLO ataupun ruang tunggu yang nyaman.

Kegiatan yang berdampak langsung dalam pencapaian antara lain

1. Penyelenggaraan kegiatan *core value* Ber-akhlak pada Pangkalan PSDKP Tual yang diikuti secara luring maupun daring;
2. Perawatan Gedung, salah satu aspek yang secara langsung berdampak kepada kenyamanan para pengguna jasa.
3. Penggunaan aplikasi e-SLO yang mempermudah permohonan keberangkatan kapal perikanan.

#### **b. IKU 15: Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual**

IKU Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan) merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait pelayanan yang ada di Lingkup Pangkalan PSDKP Tual yaitu LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan). Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan cara survei.

Survei kepuasan masyarakat dilakukan pada Tahun 2023. IKU Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan) telah terealisasi sebesar **99,96 dari target 80 atau sebesar 120%**. **Pelaksanaan IKU dilakukan dengan melaksanakan survey kepuasan masyarakat kepada pengguna jasa di Satwas SDKP Sorong sebagai satu-satunya Satwas pada lingkup Pangkalan PSDKP Tual yang melaksanakan pelayanan penerbitan LVHPI.** Bila dibandingkan dengan target pada perjanjian kinerja Tahun 2022, capaian di Tahun 2023 ini sudah melebihi dengan rencana aksi yang telah ditetapkan. Pencapaian IKU ini secara esensi sama yaitu kepada kepuasan pelanggan dan etika pelayanan publik, sehingga analisa keberhasilan dan kegiatan penunjang antara IKM SLO dan LHVPI adalah sama secara substantif yaitu:

Pengawas perikanan sebagai garda terdepan dalam pelayanan LVHPI telah melaksanakan kegiatan sebagaimana yang diamanatkan UU dan telah memenuhi etika pelayanan publik

sehingga pengguna jasa menerima manfaat pelayanan dengan baik dan dikung dengan sarana pelayanan yang memadai;

### c. **IKU 16: Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual**

Komponen penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMEN PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kriteria:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0.
4. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 15.

Pangkalan PSDKP Tual memperoleh capaian sebesar 81,52 berdasarkan hasil penilaian itjen. Hasil ini telah melewati target yang ditetapkan. Sejatinya Analisa keberhasilan raihan ini dikarenakan **organisasi sudah mempertahankan Pembangunan zona integritas sebagai bagian dari sistem organisasi yang berjalan**. Secara lazim ketika PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 telah dijalankan maka sebagian besar aspek dalam roda organisasi menjadi aspek penilaian yang berhubungan menjadi penunjang capaian IKU dimaksud. Kegiatan yang menunjang tercapainya IK ini antara lain Penilaian ZI yang dilaksanakan oleh inspektorat 5 pada tahun 2023.

#### d. IKU 17: Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (%)

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin. Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Formula:

$$X = \frac{a}{b} \times 100$$

Keterangan:

- X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko
- a = Dokumen pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko yang dipenuhi
- b = Jumlah dokumen Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

Pangkalan PSDKP Tual telah melakukan pengendalian resiko dan dipantau oleh tim sesdit terkait kelengkapam data dukung dan tahapan pengendalian. Capaian yang diperoleh Pangkalan PSDKP Tual **sebesar 100 dari target 100 pada tahun 2023**. kegiatan manajemen resiko tidak dapat dilakukan perbandingan dikarenakan IKU ini merupakan IKU baru. Pencapaian ini dikarenakan seluruh tahapan resiko pada Pangkalan PSDKP Tual telah dilaksanakan dan telah terdokumentasikan serta telah diverifikasi.

Analisa penyebab keberhasilan kegiatan ini antara lain:

1. Setiap tim kerja mengidentifikasi setiap skala resiko yang kemungkinan bisa terjadi dalam rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dan dituangkan dalam form kendali yang mendapat perhatian dan arah pimpinan;

2. Menentukan langkah pencegahan yang dilakukan untuk meminimalisir resiko tersebut;
3. Mengarsipkan dokumen manajemen resiko.

Sedangkan kegiatan yang menunjang kegiatan ini adalah evaluasi, kegiatan organisasi berjalan seirama sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan sebagai acuan kerja. Kegiatan yang sama akan berjalan terus sehinggalan peran evaluasi akan memberikan gambaran terhadap rencana dan pencegahan kedepan atas dasar eveluasi kegiatan sebelumnya.

#### **e. IKU 18: Indeks profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Tual (Indeks)**

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP. **Pada tahun 2023 Pangkalan PSDKP Tual memperoleh capaian sebesar 90,63 dengan persentase sebesar 116,19%.** Analisa keberhasilan capaian ini adalah:

1. Mengkomunikasikan dan mendelegasikan semua staff Pangkalan PSDKP Tual agar terlibat pada kegiatan yang mendukung dan memperbaiki kompetensi pegawai, baik secara daring maupun luring;
2. Melibatkan pimpinan dalam controlling peningkatan IP ASN yang esensinya adalah memenuhi kebutuhan pegawai dalam meningkatkan kapasitas diri dengan diklat 20 JP.

Pada tahun 2023 Pangkalan PSDKP Tual juga menyelenggarakan kegiatan core value Ber-akhlak yang tidak hanya menjadi kegiatan internasisasi nilai nilai Ber-akhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif) kepada pegawai akan tetapi sekaligus menjadi sarana pemenuhan kebutuhan kegiatan diklat 20 JP yang juga menunjang capaian IKU.

#### **f. IKU 19: Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual**

Dalam penilaian mandiri SAKIP yang dilaksanakan pada Tahun 2023 ada empat aspek yang dinilai yaitu:

- Aspek perencanaan

- Aspek pengukuran
- Aspek pelaporan
- Aspek evaluasi

Dimana hasil pengukuran merupakan pemenuhan data LKE pada aplikasi kinerjaku dengan upload bukti dukung yang sesuai kriteria penilaian. Ini merupakan IKU baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Pangkalan PSDKP Tual memperoleh nilai **82,65 atau 102,67%** melebihi target tahunan. Analisa keberhasilan terhadap IKU ini dikarenakan

1. Pemenuhan data dukung sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Melakukan tindak lanjut terhadap koreksi ketika self assessment.

Sedangkan kegiatan yang menunjang tercapainya IKU ini adalah

1. Kegiatan perencanaan kinerja Pangkalan PSDKP Tual, baik berupa dokumen maupun kegiatan rapat;
2. Kegiatan pengukuran, seperti penginputan capaian pada aplikasi kinerjaku, bukti asistensi penilaian;
3. Pelaporan kinerja Pangkalan PSDKP Tual;
4. Kegiatan evaluasi penilaian capaian kinerja;

#### **g. IKU 20: Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan**

Sebagai bentuk pengawasan dari APIP lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal KKP maka telah dirumuskan IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Pangkalan UPT PSDKP Tual yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan". IK ini telah berhasil dilengkapi Pangkalan PSDKP Tual sejak semester I Tahun 2023 dengan kata lain Pangkalan PSDKP Tual telah mencapai capaian 100 untuk pemenuhan IK dimaksud. Analisa penyebab keberhasilan yang mendukung capaian ini adalah **mendelegasikan pihak yang bertanggung jawab atas rekomendasi untuk ditindaklanjuti.**

Dan kegiatan yang menunjang adalah kegiatan monitoring internal setelah rekomendasi disampaikan yang dipimpin langsung oleh kasubag umum agar tindak lanjut dapat segera disampaikan.

## **h. IKU 21: Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual**

Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker. Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja Unsur Budaya Kerja yang dinilai implementasinya terdiri dari:

1. Tim Satker (6)
2. Hasilkan Inovasi Unit Kerja (12)
3. Lima Menit Sebelum Jadwal (2)
4. Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (2)
5. Upayakan Data Terkini (2)
6. Organisasikan, Catat, Aksi, dan Arsipkan (3)
7. Tegakan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan (1)
8. Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel dan Amanah (1)
9. ASN PSDKP Produktif Kerja (1)
10. Menyelesaikan Tugas dengan Tepat (3)
11. Hargai, Motivasi, dan Inisiatif (2)
12. Gelorakan Gerakan hemat Energi (3)

Formula:

$$N = \sum n$$

$N$  = Nilai Implementasi Program Budaya Kerja UPT Pangkalan PSDKP Tual

$n$  = Unsur Budaya Kerja yang dinilai (terdiri dari 12 unsur)

Penilaian terhadap IKU ini diperoleh capaian sebesar 29,84 atau 120%. IKU ini dinilai dengan LKE yang dipandu oleh pihak sesdit PSDKP. Penilaian optimal yang didapat dikarenakan ke 12 aspek yang dijadikan indikator telah dilaksanakan dengan baik

Analisa keberhasilan indeks kinerja ini adalah

- Internalisasi point budaya kerja dalam kegiatan organisasi baik dalam apel pagi maupun dengan kegiatan dan menjadi bagian sistem.

Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator ini adalah

- Keterlibatan pimpinan dalam setiap kegiatan yang mengimplementasikan budaya kerja;
- Memberikan reward bagi pegawai yang memahami nilai budaya kerja.

#### **i. IKU 22: Inovasi yang dihasilkan UPT Pangkalan PSDKP Tual (inovasi)**

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

- Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan
- Kelompok inovasi: umum, replikasi, khusus

Pangkalan PSDKP Tual berhasil menghasilkan 1 buah inovasi pelayanan publik dengan nama Tim Panther 06 yang merupakan aplikasi pengaduan yang terintegrasi dan dioperasikan dilingkup kerja Pangkalan PSDKP Tual.

Analisa penyebab tercapai IKU ini karena adanya kendala yang sebelumnya dihadapi Pangkalan PSDKP Tual dalam menindaklanjuti adanya laporan dari e-lapor yang sebelumnya terjadi kesalahan disposisi dari pihak admin. Berdasarkan keresahan itu Pangkalan PSDKP Tual kemudian melahirkan aplikasi pengaduan baru yang bertujuan untuk menghindari terjadi kesalahan disposisi tersebut dan agar pengaduan lebih cepat ditindaklanjuti karena system pengaduannya telah dibuat lebih spesifik.

Kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah kegiatan diklat PKP yang diikuti oleh Kepala Subbagian Umum Pangkalan PSDKP Tual dan menjadi pemantik lahirnya inovasi dimaksud.

#### **j. IKU 23: Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual**

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Terdapat 2 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:

- o Keikutsertaan: Pimpinan UPT Pangkalan PSDKP Tual, Kepala Subbagian Umum, dan seluruh KaTimja;

- o Keaktifan: Pimpinan UPT Pangkalan PSDKP Tual, Kepala Subbagian Umum, dan seluruh KaTimja.

**Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan Aplikasi coffice dengan target 92% pada Tahun 2023. Capaian IKU Pangkalan PSDKP Tual sebesar 108,01%. Perhitungan capaian Persentase unit kerja Pangkalan PSDKP Tual yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada Tahun 2023 mengadopsi dari perhitungan data yang diberikan oleh Eselon I.** Capaian pada tahun ini sangat optimal dan memenuhi unsur 5w1h, hal ini dikarenakan keaktifan akun coffice dipantau secara berkala dengan memberikan notes atas serangkaian kegiatan yang memenuhi kriteria agar dapat diposting. **Capaian tidak dapat dibandingkan mengingat penggunaan aplikasi baru yang menggantikan aplikasi bitrix sebelumnya.**

Analisa keberhasilan pencapaian indeks kinerja ini antara lain:

- Mendukung pencapaian indeks kinerja dengan melakukan monitoring keaktifan internal oleh operator kinerja yang diinformasikan melalui WAG agar ditindaklanjuti oleh pemegang akun;
- Memberikan catatan atas kegiatan yang telah terlaksana lingkup Pangkalan PSDKP Tual baik kegiatan teknis maupun majerial agar history kegiatan dapat dituangkan ke dalam aplikasi coffice.

Kegiatan yang turut berpengaruh dalam pencapaian IKU ini adalah

- Keaktifan Pangkalan PSDKP Tual dalam berpartisipasi dalam kegiatan eksternal dalam mendukung kinerja organisasi missal, kegiatan diskusi LLAT dengan KPPN, pelaksanaan kegiatan patrol maupun pengawasan dengan Cabang dinas ataupun instansi terkait;
- Melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas pegawai secara internal, pelaksanaan rapat perencanaan maupun monev, pelaksanaan kegiatan rapat revisi anggaran.

#### **k. IKU 24: Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual**

IKU ini merupakan Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Pelaksana Teknis yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Pangkalan PSDKP Tual tercapai berdasarkan beberapa analisa penyebab keberhasilan antara lain:

- 1). Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023;
- 2). Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 Tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
- 3). Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2023 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;
- 4). Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Pangkalan PSDKP Tual berhasil memperoleh capaian 100% dari target 77,5% yang ditetapkan pada Tahun 2023.

1. Kegiatan pengadministrasian BMN meliputi persuratan yang telah dilaksanakan secara tertib, dengan memperbaiki system pengelolaan BMN setiap tahunnya;
2. Pendistribusian BMN yang tepat guna.

#### **I. IKU 25: Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual**

IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Tual yaitu suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Pangkalan PSDKP Tual telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Analisa keberhasilan IKU :

- 1). Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP, kegiatan ini telah dipenuhi tapi belum optimal dikarenakan banyaknya revisi yang dijalankan;
- 2). Pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE oleh Pangkalan PSDKP Tual;
- 3). Kelengkapan laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pangkalan PSDKP Tual;
- 4). Kesesuaian tahap pelaksanaan.

Pangkalan PSDKP Tual berhasil memperoleh raihan 95,04 untuk Tahun 2023 melewati target yaitu 77,5 tapi turun dari tahun sebelumnya yaitu 100. Kendala sehingga capaian tidak optimal karena penginputan SIRUP, belum sesuai hingga revisi terakhir sehingga SPSE belum optimal.

Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini antara lain:

1. Melakukan updating data revisi;
2. Melengkapi administrasi pengadaan pada setiap tahapan;
3. Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa.

## m. IKU 26: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual

Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Tual (Nilai) merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Target IKPA Tahun 2023 sebesar 89.00 (nilai). Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA  $\geq 95$ ;
- b. Baik, apabila  $89 \leq$  nilai IKPA  $< 95$ ;
- c. Cukup, apabila  $70 \leq$  nilai IKPA  $< 89$ ; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA  $> 70$

Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan *spending review* terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 13 (tiga belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu; Capaian Output, Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu Minus. Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OMSPAN) Kementerian Keuangan. **Pada Tahun 2023 Pangkalan PSDKP Tual mendapatkan nilai IKPA sebesar 92,82 dan tidak memenuhi target yaitu 93,75, nilai ini menurun dari tahun 2022 sebesar 94,82. Penurunan capaian ini karena Pangkalan PSDKP Tual memiliki deviasi antara RPD dan realisasi yang cukup besar dengan nilai hanya 5,43, sehingga adapapun rencana perbaikan antara lain**

1. Melakukan rapat evaluasi atas capaian RPD dengan semua unit ketua tim kerja;
2. Melakukan perhitungan prognosa RPD yang sesuai untuk dijalankan;
3. Menjaga deviasi masih dalam batas normal.

Tabel 3. 39 IKPA 2023 Pangkalan PSDKP Tual

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
1	084	032	440853	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	Nilai	100.00	54.34	96.92	94.00	100.00	86.04	100.00	100.00	92.82	100%	92.82
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.43	19.38	9.40	10.00	8.60	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	77.17		95.39			100.00					

## n. IKU 21: Nilai kinerja anggaran (NKA) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Nilai)

Nilai Kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan oleh Satuan Kerja Pangkalan PSDKP Tual pada Tahun 2023 kedalam SAKTI yang kemudian akan diolah aplikasi SMART Kemenkeu ([monev.anggaran.kemenkeu.go.id](http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id)). Pada tahun 2023 Pangkalan PSDKP Tual memperoleh capaian sebesar 87,58 melebihi target yang ditetapkan sebesar 82, dengan nilai efisiensi 3,9 dengan kategori baik. Efisiensi belum dapat diraih secara optimal akan tetapi secara keseluruhan Pangkalan PSDKP Tual mampu menyelesaikan anggaran dengan target yang melebihi walaupun belum mendapatkan hasil ideal. Secara teori, efisiensi akan baik apabila dengan anggaran yang direalisasikan mampu menghasilkan output yang lebih banyak, dengan kelipatan yang tidak menyebabkan anomali.

Analisa yang mendukung keberhasilan indeks kinerja ini antara lain

1. Menargetkan kegiatan teknis dapat melebihi target yang diberikan;
2. Melakukan perencanaan serapan kegiatan dan target yang optimal;
3. Melaksanakan revisi apabila dirasa anggaran tidak dapat menunjang tercapainya target.

Kegiatan yang menunjang tercapainya IK ini antara lain:

1. Kegiatan pengawasan maupun patrol secara optimal;
2. Penghematan anggaran.



Gambar 3. 2 NKA 2023 Pangkalan PSDKP Tual

### **C. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Secara sederhana analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya adalah pemanfaatan sumber daya ekonomi yang minimal untuk perbaikan proses sehingga menghasilkan output yang maksimal. Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin.

Pangkalan PSDKP Tual selama tahun 2023 telah menyelesaikan anggaran yang diamanatkan dengan capaian nilai kinerja organisasi sebesar 106,76 dengan realisasi sebesar 99,80% sebagaimana akan dijabarkan pada pembahasan selanjutnya. Penghitungan efisiensi atas kinerja dapat mengacu pada perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART Kemenkeu yang mana Pangkalan PSDKP Tual memiliki CRO sebesar 100 konsistensi sebesar 95,13 dan nilai efisiensi sebesar 59,75 sehingga efisiensi yang didapatkan Pangkalan PSDKP Tual untuk Tahun 2023 sebesar 3,9.

Pangkalan PSDKP Tual sudah berhasil melaksanakan prinsip efisiensi sumberdaya yaitu, dengan anggaran yang ada mampu memperoleh capaian kinerja yang lebih, walaupun belum optimal. Pengoptimalan dalam anggaran dengan pencapaian target yang besar harus dilaksanakan dan terus dibenahi.

Upaya yang telah dilaksanakan Pangkalan PSDKP Tual antara lain:

1. Melakukan kontroling terhadap pelaksanaan kegiatan dengan mengutamakan asas prioritas dan melakukan penggabungan kegiatan yang dapat dilaksanakan secara bersama sehingga output yang didapat optimal dengan anggaran yang terbatas;
2. Melakukan perhitungan kembali atas penyimpangan anggaran sehingga dapat memenuhi target yang dicapai, sebagai contoh perencanaan kembali pemenuhan hari operasi kapal pengawas setelah BBM mengalami kenaikan. Perhitungan dilaksanakan sehingga kekurangan anggaran dalam pencapaian target dapat dihitung dilakukan penambahan kemudian terjadi optimalisasi hari operasi;
3. Melakukan optimalisasi dalam kegiatan pengawasan maupun operasi seperti penggabungan kegiatan pengawasan yang memiliki rentang kendali jauh sehingga dapat dilaksanakan bersamaan dengan gelar operasi;
4. Melakukan internalisasi terkait kemampuan SDM dalam pelaksanaan kegiatan, seperti pendelegasian Pengawas Perikanan, Polsus PWP3K, PPNS, dalam kegiatan

- bimbingan teknis ataupun penguatan kapastitas pengawas agar para petugas dapat meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas;
5. Pangkalan PSDKP Tual telah melaksanakan kegiatan core value ASN Ber-Akhlak kepada para pegawai sebagai wujud peningkatan kapasitas ASN.
  6. Melakukan reformulasi terhadap penugasan agar pembagian tugas dapat merata disaat pangkalan PSDKP Tual memiliki sejumlah personel yang sedang dalam tugas belajar.

#### **D. Akuntabilitas Keuangan**

Anggaran yang dikelola Pangkalan Pengawasan SDKP Tual pada Tahun 2023 sesuai DIPA Nomor: 032.05.2.440853/2023 tanggal 30 November 2022, mendapat alokasi dana sebesar Rp54.389.879.000,- (*Lima puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh Sembilan juta delpaan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah*). Realisasi anggaran Tahun 2023 yang telah dicapai oleh Pangkalan Pengawasan SDKP Tual sebesar sebesar 99,80% atau sebesar Rp54.283.587.512,- (*Lima puluh empat miliar dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus dua belas rupiah*).

# BAB IV

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Selama Tahun 2023, kinerja Pangkalan PSDKP Tual telah mencapai hasil yang baik. Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Program, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada Tahun 2023, terdapat 27 Indikator Kinerja yang menjadi komitmen kinerja UPT Pangkalan PSDKP Tual. Pencapaian IKU Tahun 2023 dengan nilai NKO sebesar 106,76, Pangkalan PSDKP Tual telah menetapkan 27 IKU level UPT Pangkalan PSDKP Tual 25 tercapai 2 tidak mencapai target dengan satu predikat kurang. 14 IKU biru (istimewa) 12 IKU lainnya berstatus hijau (baik, walaupun ada 1 IKU predikat baik namun tidak mencapai target) sedangkan 1 IKU lainnya mendapat predikat cukup.

### B. Saran dan Rekomendasi

Memperhatikan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan pada bagian – bagian sebelumnya dan dalam rangka upaya untuk meningkatkan kinerja Pangkalan PSDKP Tual pada periode Tahun 2024. Saran dan Rencana untuk memperbaiki capaian IKU pada Tahun 2024 terangkum dalam Tabel berikut :

Tabel 4. 1 Saran dan Rencana Tindak Lanjut atas pencapaian kinerja Pangkalan PSDKP Tual Periode Tahun 2023

No	Saran	Rencana Aksi	Waktu
1	Melaksanakan evaluasi terhadap ketepatan RPD	<ul style="list-style-type: none"><li>Mengadakan rapat evaluasi setiap triwulan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Triwulan I- IV</li></ul>
2	Penyelesaian pemeriksaan hasil analisis SPKP	<ul style="list-style-type: none"><li>Menghubungi UPT terdekat guna membantu proses BAP</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Triwulan I- IV</li></ul>